

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PENCAPAIAN INDIKATOR  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
PENDIDIKAN DASAR SMP/MTs  
DI KABUPATEN NUNUKAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**M I S A D I**

**NIM. 500646879**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2016**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul “Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan ada penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Samarinda, Juni 2016  
Yang menyatakan,



*Misadi*  
*andy*

Misadi  
NIM. 500646879

*“Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  
(QS. Al-Mujaadilah ayat 11).*



*“Seseorang yang berilmu dan mengamalkannya akan ditempatkan dalam syurga bersama ilmu dan amal perbuatannya, maka apabila seseorang yang Berilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka ilmu dan amal perbuatannya tetap berada di dalam syurga, sedangkan dirinya akan berada dalam neraka”.*  
*(HR. Daiylami)*

## ABSTRAK

### **Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan**

**Misadi (misadi.sst@gmail.com)**

**Program Pascasarjana Universitas Terbuka**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: (1) studi dokumentasi, (2) observasi, dan (3) wawancara mendalam. Data primer diambil dengan teknik *purposive sampling* dari SMP/MTs di Kabupaten Nunukan. Data hasil observasi dianalisis secara deskriptif, sedangkan data hasil studi dokumentasi dan wawancara mendalam dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia melalui alat pengumpul data, yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumen resmi dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan indikator-indikator SPM SMP/MTs yang belum tercapai 100% adalah: (a) ketersediaan satuan pendidikan SMP/MTs yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 6 km (90,20%); (b) jumlah setiap rombongan belajar yang tidak melebihi 36 orang dan setiap ruang kelas lengkap dengan meja dan kursi untuk setiap rombongan belajar (92,27%); (c) ketersediaan ruang laboratorium IPA yang dilengkapi satu set peralatan praktik IPA (33,33%); (d) ketersediaan guru yang berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik di setiap sekolah (81,38%); (e) ketersediaan guru yang berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris di setiap sekolah (25,98%); (f) ketercapaian setiap kepala sekolah berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik (99,02%); (g) ketercapaian pengawas telah berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik (85,71%); (h) ketersediaan buku teks semua mata pelajaran satu set per siswa tercapai (0%); (i) ketersediaan 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi 50%. Indikator yang sudah mencapai 100%, adalah: ketersediaan satu orang guru untuk setiap mata pelajaran, jumlah guru yang melaksanakan tugas 37,5 jam per minggu, sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka 27 jam per minggu, sekolah yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, guru yang menerapkan Rencana Program Pembelajaran dalam pembelajaran, dan sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah. Pencapaian indikator SPM secara umum masih belum memenuhi target indikator yang telah ditetapkan yaitu 13 dari 22 indikator yang berhasil dicapai sebesar 59,09%. Dengan demikian masih terdapat kesenjangan sebesar 40,91%. Oleh karenanya harus dilakukan upaya untuk mencapai indikator yang masih belum tercapai dengan lebih mengoptimalkan peran faktor pendukung dan meminimalisasi faktor penghambat.

**Kata Kunci:** Pendidikan Dasar, Pencapaian Indikator, Standar Pelayanan Minimal.

## ABSTRACT

### **Indicator Accomplishment Minimum Service Standart Elementary Education SMP/MTs In Kabupaten Nunukan**

**Misadi (misadi.sst@gmail.com)  
Post Graduate Terbuka University**

This research head for analyze Indicator Accomplishment Elementary Education (SMP/MTs) in Kabupaten Nunukan and along with to analyze proponent and obstacle factors. This research resort to qualitative approachment by descriptive method. Technique data accumulation by : (1). Documentation study, (2). Observation, and (3). Deep interview. Primary data taking by purposive sampling technique from SMP/MTs in Kabupaten Nunukan. The result of observation data analyze by descriptive method, whereas the result of documentation and interview data study analyzed by qualitative method. Analysis data process started with review data entire which is available by means of data accumulation and official document by data reduction, data presentation and conclusion drawing. The result of research shows that indicators accomplishment minimum service standart of elemantary education SMP/MTs have not reached are: (a) SMP/MTs education unit which is reached by walk 6 KM maximal (90,20%); (b) every study group that no exceed 36 people and every classroom fully equipped with table and chair for study group (92,27%); (c) sains laboratory complete with one set practical tools (33,33%); (d) qualified teacher S1/D-IV in every school and educator certification teacher in every school (81,38%); (e) qualified teacher S1/D-IV sertification of Math, Sains, Indonesian language and english in every school (25,98%); (f) achievement of every headmaster qualified S1/D-IV and have educator certification (99,02%); (g) achievement of all of school's controllers qualified S1/D-IV and have educator certification (85,71%); (g) all lesson books supply one set per student reached in every school (0%); (i) 200 enrichment title book supply and 20 reference title book suply (50%). In the meantime the others indicators have reached 100%, such are: availability one theacher for one lesson in every school, total teacher who implement duty 37,5 hour per week, *the school that implement direct learning 27 hour per week*, the school that applying education level unit curriculum, and the teacher who applying Learning Program Plan, and the school that applying Base on School of Management. Accomplishment indicator of SPM generally is not constancy indicator fulfill, that is 13 of 22 indicators are reached as many as 59,09%. Thus there is still a gap as many as 40,91%. Because of that, it have to making effort to reach the indicator that have no achieve by more optimalitation role of supporting factors and minimize of obstacle factors.

**Keywords :** Elementary Education, Indicator Accomplishment, Minimal Service's Standart.

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Misadi  
 NIM : 500646879  
 Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik  
 Judul TAPM : Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2016  
 Waktu : 08.00-09.30 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji  
 Nama : Dr. Darmanto, M. Ed.

Tanda tangan

Penguji Ahli  
 Nama : Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A., Ph.D.

Pembimbing I  
 Nama : Dr. Heryono Susilo Utomo, M. Si.

Pembimbing II  
 Nama : Dr. Ir. Nurhasanah, M. Si.

## PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : Misadi

NIM : 500646879

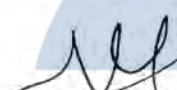
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi  
Publik

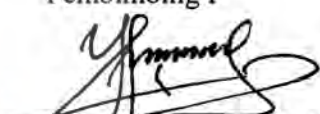
Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2016

Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I

  
Dr. Ir. Nurhasanah, M. Si.  
NIP. 19631111 198803 2 002

  
Dr. Heryono Suslo Utomo, M. Si.  
NIP. 19591023 198803 1 010

Penguji Ahli,

Prof. Muchlis Hamdi, M. P. A., Ph.D.

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi  
Program Studi Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M. Ed.  
NIP. 195910271986031003



Suciati, MSc., Ph.D.  
NIP. 19520213 198503 2 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Misadi  
**NIM** : 500646879  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi bidang minat  
 Administrasi Publik  
**Tempat/Tanggal Lahir:** Banyuwangi, 02 Agustus 1974

### Riwayat Pendidikan :

1. Lulus SD di Banyuwangi pada tahun 1987
2. Lulus SMP di Balikpapan pada tahun 1992
3. Lulus SMEA di Banyuwangi pada tahun 1995
4. Lulus D-IV di Bandung pada tahun 2009

### Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun 2000 s/d 2003 sebagai staf pelaksana di BKD Kabupaten Nunukan
2. Tahun 2003 s/d 2009 sebagai staf pelaksana di Disnakertrans Kabupaten Nunukan
3. Tahun 2009 s/d 2010 sebagai staf pelaksana di Dinsosnakertrans di Kabupaten Nunukan
4. Tahun 2010 s/d 2011 sebagai Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial di Dinsosnakertrans Kabupaten Nunukan
5. Tahun 2011 s/d 2013 sebagai Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di Kelurahan Nunukan Utara Kabupaten Nunukan
6. Tahun 2013 s/d 2014 sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan
7. Tahun 2014 s/d sekarang sebagai Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Samarinda, Juni 2016

Misadi  
 NIM. 500646879



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul: Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan. Penyusunan TAPM ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka, Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M. Ed., Ph.D., beserta jajarannya atas pelayanan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan di program ini;
2. Para dosen Program Magister Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Kelas Nunukan;
3. Dr. Heryono Susilo Utomo, M. Si dan Dr. Ir. Nurhasanah, M. Si selaku dosen pembimbing atas kesabarannya memberikan bimbingan;
4. Pemerintah Kabupaten Nunukan atas izin belajar yang telah diberikan;
5. Kedua orangtuaku Supandi (alm.) dan Uliatin, istriku tercinta Indah Kumalasari, dan anak-anakku tersayang Asmarani dan Dewandaru atas do'a, semangat dan dukungan yang telah diberikan;

6. Seluruh teman kuliah Program Magister Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Kelas Nunukan angkatan masa registrasi 2014.2 atas kebersamaan dan *support*-nya.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih memiliki keterbatasan dan kelemahan. Oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik membangun demi penyempurnaan TAPM ini. Akhir kata semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Amiiin Ya Rabbal Alamiin.

Samarinda, Juni 2016

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Pendidikan di Indonesia.....	17
B. Pelayanan dan Pelayanan Publik .....	22
1. Konsep pelayanan dan pelayanan publik.....	22
2. Paradigma pelayanan publik.....	29
3. Karakteristik pelayanan publik .....	34
4. Model kualitas pelayanan publik .....	36
5. Kinerja pelayanan publik .....	43
C. Standar Pelayanan Publik .....	47
1. Prinsip-prinsip pelayanan berkualitas.....	47
2. Standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik.....	50
3. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar .....	53
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	60
E. Kerangka Berpikir .....	63

	F. Operasional Konsep .....	67
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
	A. Desain Penelitian.....	68
	B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	68
	C. Instrumen Penelitian.....	70
	D. Prosedur Pengumpulan Data.....	70
	E. Metode Analisis Data.....	74
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>84</b>
	A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	84
	B. Hasil Penelitian.....	90
	1. Pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Kabupaten Nunukan .....	90
	2. Pencapaian indikator SPM pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan SMP/MTs.....	101
	C. Pembahasan .....	110
	1. Analisis pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs	110
	a. Analisis pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Kabupaten Nunukan.....	110
	b. Analisis pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan.....	122
	2. Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs.....	128
	a. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.....	128
	b. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan.....	135
	3. Implikasi <i>gap</i> (kesenjangan) terhadap upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.....	138
	4. Matrik perbandingan antara hasil penelitian dengan penelitian	

terdahulu.....	143
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>148</b>
A. Kesimpulan .....	148
B. Saran .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>154</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>158</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Hal.
3.1	Variabel dan Indikator Penelitian .....	77
4.1	Komposisi Penduduk Kabupaten Nunukan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2013.....	86
4.2	Komposisi Penduduk Kabupaten Nunukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 .....	87
4.3	Jarak Antara Pemukiman Permanen Dengan Sekolah.....	91
4.4	Jumlah Peserta Didik Dalam Setiap Rombel.....	91
4.5	Ketersediaan Ruang Kelas, Meja Kursi, Papan Tulis Setiap Rombel	92
4.6	Ketersediaan Ruang Laboratorium IPA, Meja Kursi, Peralatan Praktik.....	93
4.7	Ketersediaan Ruang Kepsek dan Guru.....	94
4.8	Ketersediaan Guru Untuk Setiap Mata Pelajaran di SMP/MTs...	94
4.9	Persentase Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs.....	95
4.10	Persentase Guru Yang Bersertifikat Pendidik di Sekolah.....	95
4.11	Ketersediaan Guru Matematika Yang Bersertifikat Pendidik.....	96
4.12	Ketersediaan Guru IPA Yang Bersertifikat Pendidik.....	97
4.13	Ketersediaan Guru Bahasa Indonesia Yang Bersertifikat Pendidik	97
4.14	Ketersediaan Guru Bahasa Inggris Yang Bersertifikat Pendidik...	98
4.15	Gambaran Kualifikasi Akademik Kepala Sekolah.....	98
4.16	Gambaran Sertifikasi Kepala Sekolah.....	99
4.17	Kualifikasi Akademik Pengawas SMP/MTs .....	99
4.18	Kepemilikan Sertifikasi Pengawas .....	99
4.19	Gambaran Kunjungan Pengawas Sekolah.....	100
4.20	Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum dan Proses Pembelajaran Yang Efektif .....	101
4.21	Ketersediaan Buku Teks Yang Mencakup Semua Mata Pelajaran..	102
4.22	Ketersediaan Buku Pengayaan.....	103
4.23	Ketersediaan buku Referensi.....	103

4.24	Jam Kerja Guru Per Minggu.....	104
4.25	Proses Pembelajaran Per Minggu.....	105
4.26	Kegiatan Tatap Muka Per Minggu.....	105
4.27	Penerapan KTSP Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.....	106
4.28	Penerapan RPP.....	106
4.29	Pengembangan dan Penerapan Program Penilaian.....	107
4.30	Frekwensi Supervisi Kepala Sekolah.....	108
4.31	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Guru Kepada Kepala Sekolah	108
4.32	Penyampaian Laporan Hasil UAS, UKK, US/UN.....	109
4.33	Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)..	110
4.34	Gambaran Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.....	111
4.35	Gambaran Pencapaian Indikator SPM Dikdas SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan .....	123
4.36	Analisis SWOT.....	137
4.37	Matrikulasi Perbandingan Hasil Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu.....	144



**DAFTAR GAMBAR**

Nomor	Judul Gambar	Hal.
2.1	Kerangka Berpikir Pencapaian SPM Pendidikan Dasar.....	66
3.1	<i>Flowchart</i> Tahapan Penelitian.....	73
3.2	Analisis Data Model Interaktif .....	76
4.1	Peta Kabupaten Nunukan.....	85





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan demikian faktor mutu sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan sudah selayaknya menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, pendidikan menjadi begitu penting. Proses pendidikan adalah salah satu “industri” yang menjadi penentu tercapainya mutu sumber daya manusia yang diharapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, bermakna konstitusi mengamanatkan bahwa negara mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan warga negaranya tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga negaranya yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun yang menjamin bahwa setiap warga negara setidaknya harus tuntas mengikuti pendidikan sampai jenjang SLTP atau sederajat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara harus berupaya menjamin pemerataan akses pelayanan pendidikan kepada warga negaranya setidaknya 9 tahun masa belajar atau sampai lulus SLTP.

Kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tidak hanya terbatas pada pemerataan akses pelayanan saja. Tetapi juga berkewajiban menjamin mutu pelayanan pendidikan itu sendiri.

Sebagai bentuk usaha dalam menjamin mutu pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan perlunya diadakan standarisasi pendidikan nasional sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, standar bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai payung hukum dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Salah satu instrumen yang dijadikan acuan operasional upaya peningkatan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar bagi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang meliputi: (a) pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan; (b) pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Mendiknas di atas sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sudrajat (2012), indikator-indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

- b. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
- c. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
- d. Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
- e. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
- f. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
- g. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
- h. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

- i. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- j. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
- k. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Sedangkan indikator-indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs yang harus dicapai oleh Satuan Pendidikan meliputi:

- a. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- b. Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
- c. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
- d. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka Kelas VII – IX : 27 jam per minggu;

- e. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
- g. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
- h. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
- i. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
- j. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
- k. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar diatas merupakan standar yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota yang harus dilaksanakan sesuai pedoman/standar teknis perencanaan yang berlaku. SPM ini merupakan kriteria

minimal mengenai sistem pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dari SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs ini adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dasar SMP/MTs dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan diterbitkannya standar ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan demikian jelaslah bahwa penerapan SPM tersebut dimaksudkan untuk menjamin pemerataan akses pelayanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap. Berdasarkan pemikiran ini, pemerintah daerah seharusnya membuat perencanaan matang dan pembangunan yang maksimal di bidang pendidikan dasar.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di era otonomi daerah pemerintah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kewenangan ini juga dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang

menyatakan bahwa urusan pendidikan adalah salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib yang didesentralisasikan perlu diatur dalam SPM. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM pendidikan dasar di Kabupaten/Kota yang telah diuraikan sebelumnya merupakan terjemahan dari Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sekaligus memiliki korelasi dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam kebijakan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa kebijakan otonomi daerah melalui desentralisasi atau pendelegasian kewenangan, sejatinya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih leluasa berkeaktifitas dalam pembangunan mutu pendidikan di daerah. Melalui desentralisasi politik dan desentralisasi administratif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara prinsipil, kewenangan otonomi yang diberikan kepada pemerintahan daerah, ditujukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah lebih tahu akan potensi-potensi yang dapat dikembangkan dari masyarakat. Jika aparatur pemerintahan di daerah benar-benar mampu menyerap aspirasi masyarakat, mereka diharapkan mampu merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mampu mendorong pembangunan daerah dan keberdayaan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih mandiri dan lebih maju. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil jika pelayanan publik menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian pemerintah daerah wajib melaksanakan fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*) dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di bidang pendidikan yang ditujukan kepada pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga sudah mengupayakan penganggaran semaksimal mungkin bagi keberlangsungan proses pendidikan melalui kebijakan yang mengatur anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kuantitatif kebijakan ini menjadi daya dukung untuk mengoptimalkan upaya pemerataan akses pelayanan dan pencapaian kualitas pendidikan mengingat SPM pendidikan dasar dimaksudkan sebagai acuan dalam upaya meningkatkan akses layanan pendidikan dasar yang berkualitas di daerah. Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 termuat penjelasan yang rinci mengenai pengertian, metoda pengukuran indikator, analisis kebutuhan biaya pemenuhan SPM, dan langkah-langkah untuk dituangkan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Melalui kewenangan desentralisasi, seharusnya pemerintah daerah berkompetisi dalam pencapaian SPM pendidikan dasar yang menjadi kewenangannya dengan cara menerbitkan berbagai kebijakan yang mendukung mengingat peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan dasar sudah menjadi kewenangan dan urusan wajib pemerintah daerah.

Kesenjangan mutu pelayanan pendidikan dasar antar kabupaten/kota, antar sekolah dengan sekolah dan antar sekolah dengan madrasah masih terjadi. Kesenjangan dalam pemenuhan SPM pendidikan dasar seringkali disebabkan oleh berbagai alasan, misalnya akibat perbedaan kapasitas SDM, kurangnya kesadaran pemangku kepentingan, terbatasnya kemampuan penganggaran, kurangnya sarana-prasarana dan pengaruh faktor geografis. Hal ini ditunjukkan oleh SPM pendidikan dasar yang telah ditetapkan dan mendapat dukungan berbagai kebijakan. Menurut berbagai hasil kajian dan penelitian mengenai pencapaian SPM pendidikan dasar menunjukkan indikator-indikator

SPM pendidikan dasar belum tercapai dan memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan akses pelayanan dan kualitas pendidikan dasar. Input yang dibutuhkan dalam proses pendidikan belum terpenuhi sesuai kebutuhan. SDM guru dan non guru yang secara kuantitas dan kualitas masih rendah dan penempatannya tidak merata, sarana pendidikan yang belum memadai, materi kurikulum yang masih karut marut, dan pengelolaan pendidikan yang belum terkelola dengan baik. Kondisi tersebut masih didukung dengan proses pendidikan itu sendiri yang masih belum berorientasi kepada standar kualitas pelayanan (Tilaar, 2006:80).

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, hal ini dibuktikan dengan indeks pengembangan manusia Indonesia yang semakin menurun. Berdasarkan laporan *Education for All Global Monitoring Report* yang dirilis UNESCO 2012, menyatakan bahwa Indonesia berperingkat 64 dari 120 negara. *Education Development Index (EDI)*, Indonesia berada dibawah Malaysia dan Brunei Darussalam dengan menghasilkan empat orang anak putus sekolah dalam setiap menitnya. Kondisi ini diperkuat oleh data Kemendikbud 2010, yang menyatakan di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak tiap-tiap tahun tak mampu menyambung pendidikan. Dalam laporan paling baru Acara Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bahkan menurut artikel yang berjudul "Potret Dunia Pendidikan di Indonesia" yang dimuat dalam [www.pendidikanindonesia.com](http://www.pendidikanindonesia.com) pada Januari 2015, Indonesia tertinggal dari

dua negara tetangga ASEAN yakni Malaysia (peringkat 64) dan Singapura (peringkat 18). Daya saing Indonesia menurut *World Economic Forum* (WEF) berada di level 54 dari 131 negara jauh dibawah Malaysia yang berada di urutan ke-21 dan Singapura di urutan ke-7.

Masih dikutip dari situs yang sama, kualitas guru di Indonesia juga mendapat sorotan tajam sebab lebih dari 50 % guru tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengajar, sebuah angka yang sangat fantastis, apabila kita melihat kembali tujuan negara ini yang katanya “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ketertinggalan dalam berbagai bidang dari negara lain, yang disebabkan karena sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pendidikan yang ada di Indonesia berkualitas rendah.

Menurut data dari Kemendiknas RI tahun 2014, masa belajar penduduk Indonesia rata-rata masih 8 tahun, yang artinya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat adalah sampai dengan kelas 2 SLTP. Kondisi ini menunjukkan pula bahwa secara nasional program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun saja belumlah tuntas. Menurut data yang dirilis oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kendikbud RI Tahun 2013, Angka Partisipasi Murni (APM) Nasional pada jenjang pendidikan SD/MI besaran APM jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI sebesar 95,71 %. Ini berarti bahwa setiap 100 anak berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun yang bersekolah SD/MI hanya 95-96 anak dan yang tidak bersekolah 4-5 anak. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs besaran APM jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs sebesar 78,43 % yang berarti dalam setiap 100 anak berusia 13-15

tahun hanya 78-79 anak yang bersekolah di SMP/MTs dan yang tidak bersekolah 21-22 anak. Data tersebut menunjukkan bahwa indikator APM SD/MI sudah tercapai jika dibandingkan dengan SPM Pendidikan Dasar SD/MI yang menetapkan minimal 90%. Sedangkan indikator APM SMP/MTs belum tercapai yakni kurang dari 90% dari yang ditetapkan dalam SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs.

Lebih mengejutkan lagi, Mendikbud Anis Baswedan, dalam artikel yang berjudul “Pendidikan Indonesia Gawat Darurat” yang dimuat dalam [www.educasi.kompas.com](http://www.educasi.kompas.com) tanggal 1 Desember 2014, menyebut bahwa kondisi pendidikan Indonesia saat ini dalam kondisi gawat darurat. Berdasarkan data Kemendikbud dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan Indonesia menunjukkan hasil buruk yang ditunjukkan oleh: 1) 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi SPM Pendidikan, 2) nilai rata-rata kompetensi guru hanya 44,5 padahal nilai standar kompetensi guru adalah 75, 3) Indonesia masuk dalam peringkat 40 dari 40 negara pada pemetaan kualitas pendidikan menurut lembaga The Learning Curve, 4) Pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64 dari 65 negara yang dikeluarkan oleh lembaga Programme for International Study Assesment (PISA) pada tahun 2012. Data tersebut menunjukkan kinerja buruk pemerintah dalam pengelolaan pendidikan.

Gambaran mengenai ranking pendidikan pada tataran internasional menunjukkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dewasa ini. Seperti kita ketahui, dan masyarakat luas menyadari, bahwa mutu pendidikan nasional sudah

jauh tercecceer dari bangsa-bangsa lain termasuk negara-negara tetangga kita. Padahal sesuai tuntutan era globalisasi, Indonesia tidak terlepas dari kewajibannya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya dalam menghadapi persaingan bebas dalam dunia terbuka abad-21. (Tilaar, 2006: 74).

Menurut Taruna (dalam Tilaar, 2006:200), menyatakan bahwa permasalahan pendidikan yang terjadi hingga saat ini antara lain: (a) kurangnya pemerataan pendidikan; (b) kurangnya kualitas pendidikan; (c) kurangnya relevansi pendidikan; dan (d) kurangnya efisiensi dan efektifitas manajemen pendidikan. Oleh karenanya upaya pembangunan di bidang pendidikan selalu terfokus ke empat komponen tersebut (pemerataan, kualitas, relevansi serta efisiensi dan efektifitas manajemen).

Pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan sudah selayaknya dapat dinikmati oleh semua warga negara baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik oleh masyarakat ekonomi mapan maupun yang tidak mapan. Pembangunan bidang pendidikan sudah semestinya menempatkan pemerataan akses layanan dan peningkatan kualitas pendidikan pada prioritas utama, sehingga seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan berkualitas.

Pendidikan dasar adalah faktor yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Pada jenjang ini peserta didik dibekali dengan ilmu pengetahuan dasar yang akan menjadi modal dasar bagi pengembangannya dalam mengikuti jenjang berikutnya untuk memperoleh ilmu lanjutan. Elfindri (2008), sebagaimana dikutip oleh Herwin dalam

thesisnya (2014: 7-8) menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan target dari MDGs (Milenium Development Goals) 2015 dan gerakan EFA (Education For All). Oleh karenanya Kementerian Pendidikan Nasional dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional, disamping mengacu kepada visi, isi dan tujuan serta evaluasi capaian pembangunan pendidikan, seharusnya juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, seperti Konvensi Dakkar tentang EFA, Konvensi Hak Anak, MDGs, dan World Summit on Sustainable Development.

Menurut data pokok pendidikan (2015), di Kabupaten Nunukan saat ini memiliki 51 SMP/MTs yang terdiri dari 38 sekolah negeri dan 13 sekolah swasta. Jumlah guru yang tersedia sebanyak 627 orang yang terdiri dari 571 orang berkualifikasi S1/D-IV dan 56 orang sisanya masih dibawah S1/D-IV. Sementara jumlah siswa sebanyak 9314 orang, yang terbagi dalam 317 rombongan belajar dengan jumlah kelas yang tersedia sebanyak 292 kelas. Angka Partisipasi Murni (APM) baru mencapai 56,80% yang berarti bahwa sebanyak 43-44 anak dari 100 anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah di SMP/MTs. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) baru mencapai 73,56%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa APM dan APK untuk jenjang pendidikan dasar SMP/MTs belum mencapai SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs yang menetapkan APM dan APK sebesar 90%. Data angka putus lanjut dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir (2013-2015) jumlah lulusan SD/MI usia 13-15 tahun

yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs masing-masing 100 anak pada tahun 2013 (3,2%), 189 anak pada tahun 2014 (5,6%), dan 244 anak pada tahun 2015 (6,9%). Data tersebut semakin menunjukkan belum tercapainya pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun untuk anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs. Sementara itu, APM dan APK untuk SD/MI telah mencapai masing-masing 98% dan 112% atau melebihi APM dan APK yang ditentukan dalam SPM yakni 90% dan 95%. Berdasarkan hasil penilaian akreditasi satuan pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Nunukan, dari 51 SMP/MTs yang ada, 6 sekolah terakreditasi A, 12 sekolah terakreditasi B, 11 sekolah terakreditasi C dan sisanya 22 sekolah belum terakreditasi. Berdasarkan data tersebut pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan belum tercapai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan” dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang tingkat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar khususnya SMP/MTs di Kabupaten Nunukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimanakah pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pencapaian

indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian indikator SPM pendidikan dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara praktis dan akademis adalah:

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam mengevaluasi kinerja pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) dan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerja pendidikan khususnya di bidang pendidikan dasar SMP/MTs.

2. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi dunia pendidikan atau peneliti selanjutnya yang ingin mendalami studi/penelitian yang bertema serupa.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pendidikan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Herwin dalam tesisnya (2014:5), pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sejatinya pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, negara menyediakan pelayanan pendidikan yang dilaksanakan

melalui jalur formal, nonformal dan informal. Pendidikan jalur formal meliputi SD, SLTP, SLTA sederajat, dan perguruan tinggi yang diselenggarakan melalui lembaga pelayanan pendidikan (sekolah) baik negeri maupun swasta. Sedangkan pendidikan jalur nonformal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, kursus dan keterampilan, dan pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan di luar sekolah formal. Sementara pendidikan informal diperoleh melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan merupakan kunci sukses pembangunan suatu negara dan merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan social. Oleh karenanya pendidikan menjadi agenda penting bagi suatu Negara. Pendidikan harus menjadi dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif dalam konteks yang lebih luas,. Mengingat penting dan strategisnya peran pendidikan, sudah selayaknya pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan baik di pusat, propinsi maupun daerah.

Michael P. Todaro (2000) dalam Elfindri (2008) yang dikutip oleh Herwin dalam tesisnya (2014:6) menyatakan bahwa:

**Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan bermanfaat baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan negara secara umum dalam pelaksanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Menyadari hal ini negara-negara di dunia terutama negara-negara berkembang berlomba-lomba dalam rangka melaksanakan pembangunan bidang pendidikan untuk penduduknya.**

Berkaitan dengan tujuan didirikannya negara Indonesia berdasarkan konstitusi dasar yakni Undang-undang Dasar 1945 adalah menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keinginan bangsa ini untuk dapat maju dan berkembang menjadi suatu bangsa yang disegani dan memiliki peranan besar di mata dunia tentunya dapat dicapai dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia, yakni dengan adanya kemajuan dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dan penentu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tidak terus menerus kalah bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain. Upaya peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan memperbaiki buruknya kondisi pendidikan.

Menurut Tilaar (2006:73), era reformasi yang dimulai sejak 1998 merupakan suatu era transisi dengan tumbuhnya proses demokratisasi di dalam masyarakat Indonesia termasuk dalam dunia pendidikan nasional. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah menangkap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam masyarakat Indonesia dewasa ini yaitu:

a. Desentralisasi sistem pendidikan

Desentralisasi sistem pendidikan adalah perubahan system pendidikan yang sentralistis menjadi suatu system yang desentralistis. Dimana pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Perubahan sistem pendidikan ini tentunya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang jauh dalam penyelenggaraan pendidikan nasional terkait dengan komitmen dan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi rakyatnya.

b. Peningkatan mutu sumber daya manusia

Sesuai tuntutan era globalisasi, Indonesia tidak terlepas dari kewajiban untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya dalam menghadapi persaingan bebas dalam dunia yang terbuka abad ke-21 dan pentingnya tenaga guru dan dosen sebagai ujung tombak dari reformasi pendidikan nasional. Kebutuhan ini telah ditampung dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tilaar (2006: 12), menyatakan bahwa:

Pendidikan merupakan pemasok sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh dunia kerja, serta bagi perkembangan ekonomi. Lembaga-lembaga pendidikan lebih berfungsi sebagai lembaga-lembaga untuk memperoleh kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan masyarakat. Modernisasi dan era globalisasi menuntut dunia pendidikan terus menerus berubah dan lebih terbuka yang menyebabkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah sesuai dengan standar, terutama yang telah ditentukan oleh episma ekonomi.

Dengan demikian, untuk mencetak sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja di era globalisasi perlu didukung oleh lembaga-lembaga pendidikan yang harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh standar yang sesuai tuntutan episma ekonomi global.

Berkaitan dengan otonomi daerah, Tilaar (2006:110) menyatakan bahwa:

Dalam rangka otonomi daerah pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian wajib belajar 12 tahun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Secara filosofis tanggung jawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks rumah tangga negara pendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka di dalamnya mengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada warganya. Karena itu pengolahan sistem pelayanan minimal bidang pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara bermutu, efektif dan efisien. Pelayanan pendidikan harus berorientasi pada upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan seluas-luasnya bagi warga masyarakat.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, menurut Umaedi (2000) yang dikutip oleh Sri Sumarni dalam tesisnya yang berjudul “Diterminan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa SMP Negeri 5 Yogyakarta dan SMP Negeri 8 Yogyakarta” (2010), dari berbagai pengamatan dan analisis menyatakan bahwa:

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, antara lain adalah kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen.

Pendekatan tersebut melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap apabila *input* pendidikan sudah terpenuhi, maka mutu pendidikan (*output*) akan terjadi. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Hal ini karena

selama ini dalam menerapkan pendekatan *education production function* terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan proses pendidikan itu sendiri. Padahal proses pendidikanlah yang menentukan output pendidikan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sri Sumarni dalam tesisnya (2010: 2), menyatakan bahwa:

Mutu pendidikan yang tidak mengalami peningkatan secara merata juga disebabkan karena penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang sangat bergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Selain itu juga peran serta masyarakat, khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegagalan pembangunan dunia pendidikan Indonesia dalam pemerataan akses pelayanan pendidikan bermutu dewasa ini lebih dikarenakan oleh lembaga pendidikan sebagai mesin produksi pencetak sumber daya manusia masih fokus terhadap *output* dan masih mengabaikan proses pendidikan itu sendiri. Disisi lain, penyelenggaraan pendidikan masih bergantung kepada kebijakan birokrasi yang seringkali menghambat kreatifitas lembaga pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

## **B. Pelayanan dan Pelayanan Publik**

### **1. Konsep pelayanan dan pelayanan publik**

Menurut Sinambela, *et. al.* (2014:3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Flora Han

dan Debbie Leong (1996) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:22) mendefinisikan pelayanan sebagai proses atas pelayanan khusus yang terdiri atas sejumlah kegiatan tahap sebelumnya (*back stage*) dan tahap yang akan datang (*front stage*) dimana konsumen berinteraksi dengan organisasi jasa pelayanan. Tujuan interaksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kepuasan konsumen serta memberikan nilai kepada konsumen yang bersangkutan.

Definisi pelayanan sebagai suatu proses juga disampaikan oleh Kotler (dalam Laws, 1997) sebagaimana dikutip oleh Marhany V. P. Pua dalam tesisnya (2010: 22) mendefinisikan pelayanan sebagai "*activity that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything*". Definisi tersebut menjelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas yang tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam menggunakan jasa yang dihasilkan.

Pendapat ini senada dengan pendapat C. Gronroos (1990) yang dikutip Marhany V. P. Pua dalam tesisnya (2010:36) yang mendefinisikan pelayanan sebagai berikut:

Pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Dengan demikian pelayanan memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan produk barang.

Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Steve Macaulay dan Sarah Cook (1997) yang dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:24) mengatakan:

Pelayanan merupakan citra organisasi. Pelayanan yang memuaskan terdiri atas tiga komponen, dan semuanya mencerminkan citra organisasi. Adapun ketiga komponen itu adalah: (a) kualitas produk dan layanan yang dihasilkan, (b) cara karyawan memberikan layanan, dan (c) hubungan pribadi yang terbentuk melalui layanan tersebut. Menciptakan citra positif, berarti:

- a. Membantu pelanggan melihat keistimewaan produk perusahaan melalui cara terbaik.
- b. Melakukan apa saja yang mungkin untuk menampilkan citra positif dari perusahaan dan layanan anda.
- c. Mengembangkan hubungan yang mampu membuat pelanggan merasa diistimewakan dan dihargai sebagai seorang pribadi.
- d. Memahami bahwa inti dari pelayanan yang baik adalah belajar untuk berkomunikasi secara baik dengan setiap anggota masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi tentang pelayanan diatas, dapat dipahami bahwa pelayanan merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk membantu orang lain (pelanggan), bersifat tidak kasat mata namun dapat dirasakan yang terjadi akibat interaksi antara pemberi layanan dan pengguna layanan dalam rangka menciptakan suatu citra organisasi pemberi layanan.

Berkaitan dengan pelayanan publik, Kurniawan (2005:4) berpendapat bahwa pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat, yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik umumnya dipahami sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.



Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Inu Kencana, *et. al.* dalam Sinambela (2014:5) yang mengartikan pelayanan publik sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 dalam Sinambela (2014:5) mendefinisikan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang telah diuraikan di atas tentang pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam rangka memberikan manfaat keuntungan dan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

M. Ryaas Rasyid (1997) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:41-42), mengemukakan bahwa manfaat yang diperoleh dari optimalisasi pelayanan yang efisien dan adil, yaitu secara langsung dapat merangsang lahirnya respek masyarakat atas sikap profesional para birokrat sebagai abdi masyarakat (*servant leader*). Pada tingkat tertentu kehadiran birokrat sebagai abdi masyarakat secara tulus akan mendorong terpeliharanya iklim kerja keras, disiplin, dan kompetitif.

Melalui pelayanan yang baik selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri.

Pendapat diatas dipertegas oleh Albrecht dan Zemke dalam Collins and McLaughlin (1996) dalam Simbolon (1998:9) sebagaimana yang dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:42), yang menyebutkan bahwa ciri pelayanan organisasi publik adalah harus memiliki: (1) susunan strategi pelayanan yang baik, (2) orang-orang di level operasional yang memiliki orientasi yang tinggi kepada pengguna layanan (pemohon), (3) sistem yang tidak menyulitkan para pengguna layanan (pemohon)nya.

Keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan semakin berkembang seiring dengan munculnya paham atau pandangan tentang filsafat negara. Hal ini diungkapkan oleh Prawiroharjo (1993) yang dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:42) yang menyatakan bahwa:

Semenjak dilaksanakannya cita-cita negara kesejahteraan, maka pemerintah semakin intensif melakukan campur tangan terhadap interaksi kekuatan-kekuatan kemasyarakatan, dengan tujuan agar setiap warga dapat terjamin kepastian hidup minimalnya. Oleh karena itu, agar secara berangsur-angsur, fungsi awal dari pemerintahan yang bersifat represif (polisi dan peradilan), kemudian bertambah dengan fungsi-fungsi lain yang bersifat melayani.

Lebih lanjut berkaitan dengan fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintahan modern saat ini dapat pula dikaitkan dengan tujuan pembentukan pemerintah itu sendiri, seperti yang dikemukakan M. Ryaas

Rasyid (1997) yang dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:43) yang mengatakan bahwa:

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat dapat menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam mencapai kemajuan bersama. Pelayanan pada hakekatnya adalah salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintahan, disamping fungsi pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*).

Dengan demikian jelaslah bahwa keberhasilan seseorang dalam menjalankan misi pemerintahan dapat dilihat dari kemampuannya mengemban ketiga fungsi hakiki tersebut. Oleh karena itu, aparat pemerintah pada tingkat tertentu haruslah menjadikan semangat melayani kepentingan masyarakat sebagai dasar dari motivasi pegawai bekerja di bidang pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Rousseau (dalam Supriatna 1996) yang dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:43) berpendapat tentang teori *social contract*, menyatakan bahwa "untuk membenarkan pelayanan kepada masyarakat seolah-olah terjadi suatu persetujuan antara pemerintah dan masyarakat bahwa masyarakat telah menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah untuk diatur dan dilayani". Dari teori Rousseau ini dapat disimpulkan bahwa sudah menjadi kewajiban setiap aparat pemerintah untuk memiliki komitmen pengabdian yang tinggi serta memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.

Senada dengan pendapat Rousseau diatas, Suryadi (2009:7), menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas tentang pelayanan dan pelayanan publik, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses yang didalamnya terdapat serangkaian aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan khusus yang memiliki tahapan dengan cara-cara tertentu baik dengan menggunakan atau tanpa peralatan yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal (interaksi) yang dilakukan oleh organisasi publik dalam rangka memenuhi dan memberikan kepuasan kepada orang lain yang membutuhkan secara efektif, efisien dan *equal* dalam rangka mencapai keberhasilan dan membangun citra organisasi publik.

Berkaitan dengan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara, dapat dipahami pula bahwa pelayanan publik adalah suatu sistem yang merupakan salah satu fungsi dari pemerintah dalam kewajibannya memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang, jasa maupun pelayanan administrasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

## 2. Paradigma Pelayanan Publik

Terkait dengan paradigma pelayanan publik, Suryadi (2009:21-25), menyebutkan bahwa ada beberapa teori yang berkembang saat ini, yaitu:

- a. *The Old Public Administration (OPA)*. yaitu konsep tentang bagaimana negara berperan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Max Webber, dimana birokrasi sebagai mesin utama dalam mewujudkan pelayanan publik merupakan instrumen penggerak yang harus bekerja secara efisien dan rasional. Menurut teori ini, pelaksanaan pelayanan publik dilakukan melalui lembaga-lembaga khusus, makin banyak pelayanan makin banyak pula lembaganya. Dalam konsep ini jelas terlihat adanya hirarki berdasarkan urutan kepentingan. Dengan konsep ini maka dapat terbangun sebuah kondisi "prismatic society", dan keadaan ini bisa mendorong adanya pungutan liar (*illegal income*) di tiap level. Konsep ini juga memberikan gambaran tentang terbentuknya basis-basis politik dalam setiap hirarki yang terbangun berdasarkan kepentingan-kepentingan. Karena itu, intervensi politik dapat mengkooptasi birokrasi. Akibatnya netralitas birokrasi menjadi terganggu. Kritik terhadap teori OPA antara lain diarahkan pada sistem administrasi publik bersifat tertutup sehingga keterlibatan masyarakat sangat rendah. Teori ini memposisikan efisiensi sebagai ukuran utama bukannya pertanggungjawaban atas pelayanan. Model administrasi bersifat *top down* dan hirarkis.

b. *The New Public Administration* (NPM). Teori ini didasarkan pada ide kontemporer dan praktek-praktek yang mendorong pengembangan pendekatan bisnis untuk diterapkan pada sektor publik. Dalam konsep ini, pemerintahan dijalankan seperti mengelola bisnis. Penggunaan mekanisme pasar sangat dominan dalam konsep teori NPM ini, dimana intervensi negara dalam pelayanan publik berkurang. Ini berarti bahwa tidak semua orang dapat menikmati pelayanan publik. Inti dari konsep NPM ini adalah mereformasi pelayanan publik yang berbasis tradisional menjadi *market based* dengan mengembangkan kompetisi. Semakin ada kompetisi, semakin baik pula pelayanan. Konsep ini menimbulkan apa yang disebut dengan Reformasi Global dalam Pelayanan Publik (*Global Public Management Reform*) yang antara lain mendorong adanya insentif mekanisme pasar untuk menghilangkan patologi birokrasi, alternatif pelayanan publik yang lebih luas dengan mengurangi monopoli, pemisahan antara regulator dan *service deliverer* dalam pelayanan publik serta fokus pelayanan pada *output* dan *outcome* ketimbang proses dan struktur. Doktrin penting dalam konsep NPM adalah pemanfaatan manajemen profesional, penggunaan indikator kinerja, penekanan pada kontrol output, pergeseran ke unit-unit yang lebih kecil, pergeseran kompetisi yang lebih tinggi, penekanan pada gaya sektor privat serta penekanan pada penghematan.

- c. *The New Public Services*. Konsep ini dikemukakan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt dalam bukunya "*The New Public Services*". Teori ini menyarankan untuk meninggalkan prinsip-prinsip administrasi klasik dan juga konsep NPM dan beralih ke *New Public Services*. Teori ini menekankan pada konsep pertukaran mengikat antara negara dengan masyarakatnya (*service citizen, not customer*). Artinya untuk masyarakat yang telah membayar pajak, maka negara wajib memberikan pelayanan publik yang memadai. Konsep ini memberikan penghargaan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara (*value citizenship over entrepreneurship*). Birokrasi didorong berkreasi dengan mengembangkan pemikiran strategis dengan tidak meninggalkan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, menurut teori ini bahwa birokrasi haruslah memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat, jelas dan terukur. Tugas negara adalah melayani masyarakatnya, karena itu birokrasi harus memberikan penghargaan yang tinggi dan penghormatan terhadap manusia disamping penghargaan terhadap hasil pelayanan / produktifitasnya.
- d. *The Dynamic Governance (DG)*. Menurut Prasodjo (2008), bahwa gagasan *The Dynamic Governance* didorong oleh pemikiran Neo and Chen (2007), " ... *sustained economic and social development takes place when there is leadership intention, cognition and learning which involves continual modification of perception, belief structure and mental models*". Pemikiran ini menggabungkan prinsip-prinsip OPA,

NPM dan NPS. Konsep DG mengedepankan 3 (tiga) pilar utama, yakni: *Capabilitiesm* (berpikir masa depan, berpikir terus menerus dan berpikir melalui perbandingan dengan negara-negara lain), *Culture* (prinsip tidak korupsi, membangun keunggulan, pragmatis, kompetisi pasar, *multiracialism*, keyakinan pada negara, produk yang bersifat jangka panjang, membangun stabilitas, percaya diri), kemudian *Change* (adanya inovasi dan penyesuaian kebijakan dengan perkembangan yang terjadi).

Pelayanan publik identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di masa lalu, paradigma pelayanan publik lebih memberi peran yang sangat besar kepada pemerintah sebagai sole provider. Peran pihak di luar pemerintah tidak pernah mendapat tempat atau termarginalkan. Masyarakat dan dunia swasta hanya memiliki sedikit peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karenanya berkenaan dengan reformasi di sektor publik, salah satu prinsip penting yang merubah paradigma pelayanan public adalah prinsip *steering rather than rowing*. Berkenaan dengan prinsip ini, pemerintah diharapkan untuk lebih berperan sebagai pengarah daripada sekedar pengayuh. Fungsi pengayuh bisa dilakukan secara lebih efisien oleh pihak lain yang profesional. Prinsip ini



menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat secara terus menerus bekerja sendirian, dan harus mulai mengubah paradigma pelayanan agar tujuan dari penyelenggaraan pelayanan dapat tercapai lebih baik lagi.

Dengan paradigma baru di bidang pelayanan yang dilandasi oleh filosofi *entrepreneurial government* dan NPM, maka cara pandang tradisional terhadap peran pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik haruslah diubah. Osborne dan Plastrik (1996) dalam Suryadi (2009:26), menyatakan bahwa:

Untuk mewujudkan *entrepreneurial government* dan NPM, sedikitnya ada 5 strategi penting yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Strategi inti: menciptakan kejelasan tujuan
- b. Strategi konsekuensi: menciptakan konsekuensi untuk kinerja
- c. Strategi pelanggan: menempatkan pelanggan di posisi penentu.
- d. Strategi pengendalian: memindahkan pengendalian dari puncak dan pusat
- e. Strategi budaya: menciptakan budaya wira usaha

Dalam perspektif lain, secara umum pergeseran paradigma pelayanan adalah pergeseran dari birokrasi yang “dilayani” menjadi birokrasi yang “melayani”. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat harus ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. (Sinambela, 2014:4).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa fungsi pelayanan yang diemban dan melekat pada birokrasi, tidak serta merta menempatkan warga masyarakat sebagai kelompok pasif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pelayanan harus ditingkatkan, karena sejalan dengan misi pemberdayaan yang harus lebih diutamakan (*empowering rather*

*than serving*). Pemberdayaan ini akan menuntun pada adanya peningkatan partisipasi warga masyarakat dalam pelayanan publik.

### 3. Karakteristik Pelayanan Publik

Sebagaimana pendapat para ahli yang mendefinisikan pelayanan sebagai suatu aktivitas yang tidak berwujud yang diberikan pemberi pelayanan kepada pelanggan dalam rangka memecahkan masalah dan memberikan kepuasan, maka dengan demikian pelayanan memiliki sejumlah karakteristik tertentu yang membedakannya dengan aspek-aspek lainnya seperti produk barang.

Zemke (dalam Collins and McLaughlin, 1996) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:36), menyebut beberapa karakteristik dalam pelayanan sebagai berikut:

- a. Konsumen memiliki kenangan yang disimpan sebagai pengalaman dimana pengalaman yang tersimpan dalam memori tersebut tidak bisa dijual atau diberikan kepada orang lain.
- b. Tujuan penyelenggaraan pelayanan adalah keunikan dimana setiap konsumen dan setiap kontak adalah istimewa.
- c. Suatu pelayanan terjadi pada saat tertentu yang tidak dapat disimpan atau dikirimkan contohnya.
- d. Konsumen adalah sebagai rekanan yang terlibat dalam proses produksi.
- e. Konsumen melakukan kontrol terhadap kualitas pelayanan dengan cara membandingkan harapannya dengan pengalamannya.

- f. Apabila terjadi kesalahan, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki adalah dengan meminta maaf.
- g. Moral karyawan memiliki peran yang sangat menentukan.

Sedangkan menurut Philip Kotler (2002) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:25), menyatakan bahwa:

Suatu perusahaan harus memperhatikan empat karakter khusus suatu pelayanan dalam merencanakan suatu program pemasaran yakni: (1) tanpa wujud (*service intangibility*), (2) keterikatan jasa pelayanan dan penyedia jasa tidak dapat dipisahkan (*service inseparability*), (3) variabilitas pelayanan (*service variability*), dan (4) pelayanan langsung digunakan dan habis (*service perishability*).

*Service intangibility*, yaitu bahwa jasa/pelayanan tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli mencari “tanda” dari kualitas pelayanan itu. Mereka menarik kesimpulan tentang produk jasa itu melalui tempat, pekerja, harga, perlengkapan dan komunikasi yang dapat mereka amati. Oleh karena itu tugas penyedia jasa pelayanan adalah membuat pelayanan tampak wujud menurut cara-cara tertentu. Keterikatan pelayanan jasa dan penyedia jasa dimisalkan sebagai suatu produk fisik dihasilkan, kemudian disimpan, lalu dijual, dan akhirnya dikonsumsi. Sebaliknya pada sisi lain, jasa dijual terlebih dahulu, baru diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang sama (*service are first sold, then produced and consumed at the same time*).

Sedangkan tentang *service inseparability*, Kotler berpendapat bahwa jasa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasa pelayanan

- f. Apabila terjadi kesalahan, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki adalah dengan meminta maaf.
- g. Moral karyawan memiliki peran yang sangat menentukan.

Sedangkan menurut Philip Kotler (2002) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:25), menyatakan bahwa:

Suatu perusahaan harus memperhatikan empat karakter khusus suatu pelayanan dalam merencanakan suatu program pemasaran yakni: (1) tanpa wujud (*service intangibility*), (2) keterikatan jasa pelayanan dan penyedia jasa tidak dapat dipisahkan (*service inseparability*), (3) variabilitas pelayanan (*service variabiltiy*), dan (4) pelayanan langsung digunakan dan habis (*service perishability*).

*Service intangibility*, yaitu bahwa jasa/pelayanan tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli mencari “tanda” dari kualitas pelayanan itu. Mereka menarik kesimpulan tentang produk jasa itu melalui tempat, pekerja, harga, perlengkapan dan komunikasi yang dapat mereka amati. Oleh karena itu tugas penyedia jasa pelayanan adalah membuat pelayanan tampak wujud menurut cara-cara tertentu. Keterikatan pelayanan jasa dan penyedia jasa dimisalkan sebagai suatu produk fisik dihasilkan, kemudian disimpan, lalu dijual, dan akhirnya dikonsumsi. Sebaliknya pada sisi lain, jasa dijual terlebih dahulu, baru diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang sama (*service are first sold, then produced and comsumed at the same time*).

Sedangkan tentang *service inseparability*, Kotler berpendapat bahwa jasa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasa pelayanan

itu sendiri, baik penyedia jasa itu sebuah mesin atau seseorang, atau suatu kelompok orang (organisasi). Bila seorang pegawai memberikan jasa, maka pegawai itu adalah bagian dari jasa itu. Karena konsumen hadir pada saat jasa dihasilkan atau disediakan, maka interaksi penyedia jasa dan konsumen adalah suatu keadaan yang unik dalam pemasaran jasa. Keduanya, baik penyedia jasa maupun konsumen sama-sama mempengaruhi hasil keluaran jasa pelayanan.

Selanjutnya tentang *service variability* dijelaskan bahwa kualitas jasa pelayanan tergantung pada siapa yang menyediakan atau menghasilkan jasa itu, juga tergantung pada kapan, di mana, dan bagaimana jasa pelayanan itu diselenggarakan. Sementara pelayanan langsung habis (*service perishability*) berarti bahwa jasa pelayanan tidak dapat disimpan untuk kemudian dijual kembali atau digunakan. Sifat jasa yang demikian bukanlah masalah bila tingkat permintaan mantap. Namun, bila permintaan berfluktuasi, maka instansi penyedia jasa mengalami masalah.

#### 4. Model Kualitas Pelayanan Publik

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan yang prima yang harus dilakukan birokrat terhadap masyarakat. Kualitas adalah atribut yang dilekatkan pada suatu barang atau jasa. Kualitas menggambarkan sekumpulan karakteristik barang atau jasa, baik yang

terlihat (*tangible*) atau tak terlihat (*intangible*). Jadi konsep kualitas dalam pelayanan sangat penting.

Meskipun sampai sekarang belum ada sudut pandang dan definisi mengenai kualitas yang secara universal diterima oleh berbagai kalangan, namun beberapa ahli mencoba mendefinisikan kualitas pelayanan dengan berbagai cara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D.H. Stamatis (1996), yang dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:20), yang menyatakan bahwa:

Kualitas didefinisikan dengan berbagai cara oleh para pakar, yang antara lain didasarkan pada kesesuaian dengan permintaan, kecocokan untuk digunakan, perbaikan secara berkelanjutan, didefinisikan oleh pelanggan, kerugian pada masyarakat, dan tidak ada cacat. Para pakar juga cenderung memberikan definisi kualitas sesuai latar belakang keilmuannya.

Garvin (dalam Lovelock, 1995) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:20), memandang kualitas ke dalam lima pendekatan, yang meliputi:

- a. *Transcendence approach*, yaitu pendekatan yang memandang kualitas sebagai *innate excellence*. Dalam hal ini, kualitas dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit untuk didefinisikan atau dioperasionalisasikan.
- b. *The product-based approach*, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa kualitas merupakan karakteristik atau *attribute* yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan kualitas suatu produk diukur dari perbedaan sejumlah unsur atau atribut yang dimiliki produk.

- c. *User based definitions*, yaitu pendekatan didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas suatu produk tergantung pada orang yang memakainya. Produk yang berkualitas tinggi bagi seseorang adalah produk yang paling memuaskan persepsinya. Dengan demikian perspektifnya adalah subyektif dan *demand-based*, karena tiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda.
- d. *The manufacturing-based approach*, yaitu pendekatan yang bersifat *supply-based*. Di sini, kualitas didefinisikan sebagai suatu kesesuaian dengan persyaratan (*conformance to requirements*). Pendekatan ini lebih bersifat *operation-driven* dan cenderung berfokus pada penyesuaian spesifikasi dan didorong oleh tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- c. *Value-based definitions*, yaitu pendekatan yang memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Maksudnya, kualitas suatu produk diukur dengan mempertimbangkan *trade-off* antara kinerja produk dan harganya, sehingga kualitas didefinisikan sebagai *affordable-excellence*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kualitas bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu merupakan produk yang paling bernilai yang merupakan produk yang paling tepat untuk dibeli.

Sejalan dengan pandangan tersebut, kualitas didefinisikan secara beragam oleh para pakar. Sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:21), Feigenbaume (1992) misalnya, menyatakan

bahwa kualitas adalah keseluruhan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, pembikinan dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan-harapan pelanggan. Di pihak lain Gaspersz (2002), memberikan pengertian kualitas sebagai segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Sedangkan Reksohadiprodo (1996), mendefinisikan kualitas sebagai ukuran seberapa dekat suatu barang atau jasa sesuai dengan standar tertentu.

Berdasarkan uraian berbagai pandangan dan definisi tersebut tampak bahwa sesungguhnya kualitas terkait dengan kondisi dinamis yang mencerminkan sejauh mana kehadiran suatu produk atau jasa sesuai atau telah memenuhi harapan pelanggannya. Ini sesuai dengan pendapat Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono & Diana, 2003:5) yang membrikan definisi bahwa kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Selanjutnya Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman, dan Leonard L. Berry (1990) dalam Shahih (2007:2) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:25), berpendapat bahwa:

Kualitas pelayanan adalah perbedaan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima. Bilamana harapan lebih besar jika dibandingkan dengan kinerja, maka kualitas yang dirasakan lebih kecil jika dibandingkan dengan kepuasannya, disitulah ketidakpuasan konsumen telah terjadi.



Ada banyak model yang dapat digunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan. Salah satu model kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:39-40), terdiri dari lima dimensi yang umumnya disingkat dengan *SERVQUAL*. Kelima dimensi *SERVQUAL* juga dikenal dengan kriteria "RATER", yang meliputi:

- a. *Reliability* (keandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang telah dijanjikan secara handal dan akurat.
- b. *Assurance* (jaminan), meliputi pengetahuan dan kesopanan karyawan dalam melayani pelanggan serta kemampuan mereka untuk menjaga kepercayaan pelanggan.
- c. *Tangibles* (bukti fisik), meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, tenaga kerja dan alat komunikasi.
- d. *Emphaty* (empati), yaitu kepedulian, perhatian individual yang disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan.
- e. *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan dengan segera.

*SERVQUAL* merupakan skala multi-item yang terdiri dari dua bagian utama dengan maksud mengukur harapan dan persepsi pelanggan, serta kesenjangan (*gap*) yang ada di dalam model kualitas jasa. Model kualitas pelayanan (jasa) yang diformulasikan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P.

Pua dalam tesisnya (2010:27) menyoroti syarat-syarat utama dalam penyampaian kualitas pelayanan (jasa) yang sempurna. Menurut Zeithaml *et.al.*, model ini mengidentifikasi adanya lima *gap* yang menyebabkan kegagalan penyampaian dalam pelayanan (jasa), yaitu:

a. *Gap* 1: *gap* persepsi manajemen

Di dalam *gap* persepsi manajemen ditunjukkan adanya perbedaan antara harapan-harapan konsumen dengan persepsi orang-orang dalam organisasi atau manajemen pelayanan terhadap harapan-harapan konsumen. Hal ini biasanya terjadi karena faktor-faktor seperti: kurangnya riset pemasaran dan tidak dimanfaatkannya riset pemasaran, kurang efektifnya komunikasi ke atas di dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan terlalu banyaknya tingkatan manajemen dalam organisasi.

b. *Gap* 2: *gap* persepsi kualitas

*Gap* persepsi kualitas merupakan perbedaan antara persepsi orang-orang dalam organisasi atau manajemen pelayanan mengenai harapan-harapan konsumen dengan spesifikasi kualitas pelayanan yang dirumuskan. Hal ini bisa terjadi bisa akibat faktor-faktor penyebab seperti: lemahnya komitmen manajemen terhadap kualitas pelayanan, tidak tepatnya persepsi tentang *feasibilitas* atau kelayakan, tidak tepatnya standarisasi tugas, dan kurang tepatnya perumusan tujuan.

c. *Gap 3: gap kinerja pelayanan*

*Gap* kinerja pelayanan adalah perbedaan pelaksanaan pelayanan dengan spesifikasi kualitas pelayanan yang telah dirumuskan. Menurut Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman, dan Leonard L. Berry (1990) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:29), menyatakan bahwa spesifikasi kualitas pelayanan adalah penterjemahan persepsi manajerial menjadi standar-standar kualitas yang spesifik, tergantung pada sampai seberapa tugas-tugas yang dijalankan dapat distandarisasi atau dijadikan rutinitas.

Kesenjangan kinerja pelayanan ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti: adanya peran yang ambigu, adanya konflik peran, adanya ketidaksesuaian karakteristik pekerja dengan pekerjaan, adanya ketidaksesuaian teknologi dengan karakteristik pekerjaan, ketidaktepatan sistem pengawasan, adanya kontrol yang lemah, dan adanya kelemahan dalam kerjasama tim.

d. *Gap 4: gap komunikasi pasar*

*Gap* komunikasi pasar merupakan perbedaan antara pelayanan yang diberikan dengan komunikasi eksternal terhadap konsumen. Kondisi ini seringkali terjadi karena kurangnya komunikasi horisontal dan adanya kecenderungan untuk mengobral janji. Kesenjangan ini merupakan kesenjangan yang timbul antara pelaksanaan pelayanan dengan komunikasi organisasi dengan pihak eksternal. Janji yang dinyatakan oleh organisasi kepada pengguna layanan (pemohon) akan

menjadi harapan pengguna layanan (pemohon) terhadap penilaian kualitas yang diberikan. Dalam kenyataan masalah ini muncul karena: janji yang terlalu tinggi, kurangnya koordinasi antara bagian operasi dengan bagian pelayanan, dan tidak konsistennya antara kebijakan dengan prosedur pelayanan.

e. *Gap 5: gap* kualitas pelayanan

*Gap* kualitas pelayanan adalah perbedaan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen dengan pelayanan yang diterima atau dirasakan oleh konsumen senyata-nyatanya. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari akumulasi empat macam *gap* sebelumnya. Menurut Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman, dan Leonard L. Berry (1990) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:30), menyatakan bahwa kesenjangan kelima tidak mudah untuk ditanggulangi, karena organisasi harus menghilangkan kesenjangan 1 sampai dengan 4 yang lebih dikenal sebagai kesenjangan yang timbul dari dalam organisasi.

5. Kinerja Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan tidak bisa dipisahkan dari kinerja pelayanan. Berbicara tentang kualitas pelayanan, mau tidak mau kita harus melihat kinerja dari pelayanan itu sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:22 dan 33), terkait dengan kinerja, A. A. Anwar Prabu Mangkunegara (1995), menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan bagi John Whitmore (1997), kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang yang dianggap representatif dan tergambaranya tanggung jawab yang besar dari pekerjaan seseorang. Sementara Maurice Galton dan Brian Simon (1994), mendefinisikan kinerja atau *performance* sebagai hasil interaksi atau berfungsinya unsur-unsur motivasi (m), kemampuan (k), dan persepsi (p) pada diri seseorang.

Berbeda dengan pendapat ahli diatas, Peter F Drucker (1992) Sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:33), memandang bahwa kinerja karyawan dapat dinilai dari dua sudut pandang, yaitu efisien dan efektivitas kerja. Dari sudut efisiensi kerja mengacu kepada penyelesaian pekerjaan dengan benar dalam waktu yang relatif singkat, sehingga tenaga dan biaya yang dikeluarkan seminim mungkin, sedangkan efektivitas kerja mengacu kepada penyelesaian pekerjaan secara benar, walaupun dengan tenaga dan biaya tinggi. Untuk mengetahui kinerja karyawan, harus ditetapkan standar kinerjanya.

Ada beberapa standar kinerja yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk melihat baik buruknya kinerja seseorang. R. Wayne Mondy, Arthur Sharplin, & Edwin B. Flipo (1995) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:33), menyatakan bahwa:

Upaya untuk melihat kinerja karyawan perlu ada sejumlah standar yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Standar waktu, menyatakan lamanya waktu yang seharusnya diselesaikan untuk membuat produk atau melakukan jasa tertentu.

- b. Standar produktivitas, yaitu standar yang didasarkan pada jumlah produk atau jasa yang harus dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
- c. Standar biaya, merupakan standar yang didasarkan pada biaya dihubungkan dengan barang atau jasa yang diproduksi.
- d. Standar kualitas, yakni standar yang didasarkan pada tingkat kesempurnaan sebagaimana yang dikehendaki.
- e. Standar perilaku, yaitu standar yang didasarkan pada bentuk perilaku yang diinginkan dari pekerja dalam suatu organisasi.

Standar kinerja tersebut cukup komprehensif, karena mencakup banyak aspek penting dalam bekerja. Ketepatan waktu, produktivitas, biaya, kualitas, dan perilaku merupakan aspek yang menentukan kualitas kerja seseorang. Selain standar-standar tersebut tersebut, menurut D. Furtwengler (2003:86), untuk melihat prestasi kerja karyawan dapat dilihat melalui aspek-aspek: kecepatan, kualitas, layanan, nilai, keterampilan interpersonal, mental untuk sukses, terbuka untuk berubah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, inisiatif, dan perencanaan organisasi.

Indikator-indikator lain kinerja juga dapat dilihat dari standar kinerja yang buat oleh *Standard Chartered* sebagaimana dikutip oleh Michael Armstrong (2004:93), yang menyebutkan bahwa indikator-indikator standar kinerja yang dapat digunakan antara lain: (1) pengetahuan kerja, (2) kesadaran terhadap kerja, (3) komunikasi, (4) keterampilan interpersonal, (5) bekerjasama, (6) inisiatif, (7) kemampuan beradaptasi, (8) analitis dan (9) pengambilan keputusan. Apabila merujuk pada indikator-indikator tersebut, terlihat ada beberapa kesamaan dengan indikator kinerja yang dikemukakan oleh Furtwengler, seperti keterampilan berkomunikasi dan inisiatif.

Setelah standar kinerja atau indikator-indikator kinerja ditetapkan, maka selanjutnya digunakan untuk melaksanakan penilaian kinerja. Berkaitan dengan penilaian kinerja ini, John R. Jr.Schemerhorn (2000) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:34-35), menyatakan bahwa *performance appraisal is a process of formally evaluating performance and providing feedback on which performance adjustments can be made*. Penilaian kinerja merupakan proses penilaian yang dilakukan organisasi terhadap para pegawai yang dapat memberikan umpan balik, sehingga organisasi dapat mengidentifikasi secara tegas perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan dalam rangka perbaikan kinerja pegawai.

Sedangkan G. Dessler (1998) sebagaimana dikutip oleh Marhany V.P. Pua dalam tesisnya (2010:35), mengatakan bahwa ada tiga langkah untuk melakukan penilaian kinerja. Pertama, mendefinisikan pekerjaan, yang artinya memastikan bahwa pimpinan dan bawahan sepakat tentang tugas-tugasnya dan standar jabatan. Kedua, menilai kinerja, berarti membandingkan kinerja aktual bawahan dengan standar-standar yang telah ditetapkan; ini menyangkut jenis formulir yang telah ditetapkan. Ketiga, umpan balik, yaitu kinerja dan kemajuan bawahan dibahas dan rencana-rencana dibuat untuk perkembangan apa saja yang dituntut. Banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja.

Menurut Dessler, bagian penilai dapat menggunakan metode penilaian kinerja yang sesuai kondisi di lapangan. Teknik-teknik metode penilaian kinerja yang dapat digunakan antara lain:

- a. *past oriented appraisal method*. Metode ini berorientasi pada masa lalu. Penilaian-penilaian dilakukan terhadap kinerja atau praktek yang telah terjadi. Dengan mengevaluasi kinerja masa lalu, para pegawai memperoleh umpan balik tentang hasil kerja yang telah dicapainya. Kemudian umpan balik tersebut diharapkan dapat mengarahkan pegawai yang bersangkutan pada peningkatan kinerja.
- b. *future oriented appraisal method*. Metode penilaian ini berorientasi ke masa depan, yang memusatkan perhatiannya pada kinerja pegawai di masa yang akan datang. Caranya melalui kegiatan-kegiatan evaluatif terhadap potensi yang dimiliki oleh para pegawai atau dengan cara menetapkan sasaran-sasaran kinerja di masa yang akan datang.

### C. Standar Pelayanan Publik

#### a. Prinsip-Prinsip Pelayanan Berkualitas

Berdasarkan pemahaman tentang pelayanan publik dan terkait dengan standar pelayanan publik, dewasa ini pemerintah menggaungkan tentang pelayanan prima organisasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, efektif dan efisien. Pelayanan prima itu sendiri memiliki pengertian yang cukup luas.

Barata (2003: 27) menyebutkan bahwa, pelayanan prima meliputi:

- a. membuat pelanggan merasa penting,
- b. melayani pelanggan dengan ramah, cepat, dan tepat,



- c. pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan,
- d. menempatkan pelanggan sebagai mitra,
- e. pelayanan optimal yang menghasilkan kepuasan pelanggan, (6) kepedulian kepada pelanggan untuk memberikan rasa puas, dan
- f. upaya layanan terpadu untuk kepuasan pelanggan.

Berkaitan dengan kualitas pelayanan prima, Sinambela *et. al.*(2014:13), mengemukakan bahwa kualitas pelayanan prima dapat tercermin dari:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas;
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan hak, yaitu yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social dan lain-lain;
6. Kescimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Lebih lanjut Sinambela, *et. al.*, (2014:16), menyatakan bahwa kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Oleh karenanya aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN yang meliputi: 1) pemerintah yang bertugas melayani; 2) masyarakat yang dilayani pemerintah; 3) kebikaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan public; 4) peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; 5) *resources* yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan; 6) kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat; 7) manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; dan, 8) perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka.

Dengan demikian perlu adanya penegasan yang mengubah mental profesional sumber daya manusia dari "apa yang dapat saya kerjakan menjadi apa yang dapat saya hasilkan bagi organisasi". Berkaitan dengan kualitas pelayanan merupakan citra organisasi, maka organisasi harus dapat menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif bagi SDM agar mereka memiliki komitmen, integritas dan tanggung jawab secara kolektif terhadap keseluruhan kinerja organisasi, mengingat pelanggan hanya memperhatikan bagaimana perlakuan terhadapnya pada setiap saat dan

waktu membutuhkan pelayanan. Aparatur pelayanan tidak mempunyai alasan sedikit pun untuk tidak berorientasi pada kepuasan pelanggan secara total.

Berkaitan dengan hal tersebut, Patricia Patton (1998) dalam Sinambela (2014:16) mengajukan konsep “layanan sepenuh hati” dalam mencapai pelayanan berkualitas selain peningkatan kualitas pelayanan melalui pelayanan prima. Nilai yang sebenarnya dalam layanan sepenuh hati menurut Patton meliputi empat sikap “P” yaitu aparatur harus mengembangkan kesungguhan sikap-sikap: 1) *passionate* (gairah); 2) *progressive* (progresif); 3) *proactive* (proaktif); dan 4) *positive* (positif).

## 2. Standar Pelayanan Minimal Dalam Pelayanan Publik

Standar pelayanan minimal (*minimum service standard*) merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pemahaman tersebut Oentarto, dkk. (2004:173) menyatakan bahwa standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Nilai strategis tersebut, yaitu: 1) bagi pemerintah daerah standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan, 2) bagi masyarakat, standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan

dalam mengenali kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Kushandjani dalam jurnal ilmiahnya tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peningkatan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah (2004) menyatakan bahwa, Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik. SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya, sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pelayanan publik bergandeng erat dengan kewenangan/urusan/fungsi yang dijalankan oleh daerah. Kemampuan daerah (propinsi, kabupaten/kota) dalam mengidentifikasi kewenangan/fungsi daerah akan sangat mempengaruhi kemampuan mereka menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai bidang-bidang kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan.

Lebih lanjut, Kushandjani menyatakan, bahwa dengan mempertimbangkan keberadaan berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia, maka pihak yang sangat mendesak membutuhkan SPM adalah pihak pemerintah kabupaten/kota. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah

kabupaten/kota. Konsekwensinya, daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Kedua, dibandingkan posisi propinsi maupun pusat, maka posisi kabupaten/kota paling dekat dengan masyarakat. Sehingga tuntutan pelayanan publik akan lebih diarahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Ketiga, dengan tuntutan masyarakat yang bisa langsung disampaikan, maka pemerintah daerah kabupaten/kota dituntut pula untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan bagi masyarakat daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pendapat di atas maka pengertian standar pelayanan minimal menyangkut dua konsep utama. Pertama standar pelayanan minimal sebagai tolok ukur penyediaan layanan bagi penyedia layanan. Adapun yang dimaksud dengan konsep tolok ukur penyediaan layanan ialah kondisi optimal yang dapat dicapai oleh penyedia layanan (pemerintah daerah) yang ditentukan oleh sumberdaya yang dimilikinya (sumberdaya manusia, perlengkapan dan pembiayaan serta sumberdaya pendukung lainnya). Kedua, standar pelayanan minimal sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas layanan bagi pengguna layanan. Maksudnya adalah kondisi minimal yang dapat diperoleh dari penyedia layanan (pemerintah daerah) terkait pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Kedua konsep tersebut, dengan demikian istilah “minimal” dalam pengertian “standar pelayanan minimal” merupakan kondisi “minimal”

dari sudut pandang masyarakat tetapi mengandung arti “optimal” bagi aparat pemerintah daerah. Atau dengan kata lain bahwa standar pelayanan minimal merupakan peristilahan dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas dan kuantitas yang dapat diterima dari pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik.

### 3. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Menurut Tilaar (2006:75), pendidikan merupakan proses yang bertujuan. Setiap proses yang bertujuan tentunya harus mempunyai ukuran atau *yardstick* sudah sejauhmana perjalanan di dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena tujuan pendidikan bersifat *intangibile* dan terus menerus berubah dan meningkat, maka tujuan pendidikan setiap saat perlu direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia diperlukan standar yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Oleh karenanya perlu perumusan yang jelas, terarah dan *visible* mengenai tujuan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional memerlukan standar yang terus menerus meningkat agar kualitas pendidikan nasional semakin lama semakin meningkat pula. Menurut Tilaar (2006:76-77), standarisasi pendidikan nasional sangat diperlukan karena beberapa alasan antara lain: 1) merupakan suatu tuntutan politik untuk menilai sejauhmana warga negara mempunyai visi yang sama, pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan negara

kesatuan tersebut; 2) merupakan suatu tuntutan globalisasi untuk mampu bersaing dalam persaingan global yang semakin ketat dan tajam agar tidak tergerus dan tertinggal dari negara-negara lain; 3) merupakan tuntutan dari progres, bahwa negara mempunyai cita-cita yang ingin dicapai oleh karenanya harus terus menerus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia.

Berkaitan dengan kualitas pendidikan, menurut Tilaar (2006: 66-67), sesungguhnya kualitas pendidikan itu sendiri merupakan sesuatu yang *intangibile*, yang sukar diukur kecuali dengan upaya mengkuantitaskan segala sesuatu. Kualitas pendidikan dapat kita ukur dari berbagai segi seperti perspektif ekonomi, sosial politis, sosial budaya, dan dari perspektif pendidikan itu sendiri. Dari perspektif ekonomi, kualitas pendidikan dikaitkan dengan prinsip efisiensi dimana pendidikan dianggap sebagai bentuk investasi modal dan oleh karenanya perlu dikelola secara efisien. Dengan demikian sangat diperlukan manajerialisme dalam pendidikan dimana untuk memperoleh kualitas yang tinggi, lembaga-lembaga pendidikan haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan (*objective saving*), perencanaan, peninjauan kembali (*reviewing*), monitoring internal, dan laporan eksternal.

Sesuai prinsip-prinsip manajerial, seharusnya antara perumusan kebijakan (*policy formation*) dan kegiatan operasional harus dipisahkan.

Berdasarkan uraian tersebut kelihatan dengan jelas bahwa betapa masalah kualitas pendidikan berkaitan erat dengan tujuan pendidikan apakah ditekankan pada kebutuhan ekonomi, atau kebutuhan sosial budaya dan politik, ataukah diarahkan kepada kebutuhan peserta didik seutuhnya. Itu tergantung dari pemerintahnya, kemana tujuan pendidikan diarahkan.

Berkaitan dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar, sebagaimana dikutip oleh Herwin dalam tesisnya (2014), dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota sesuai dengan Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang SPM Pendidikan Dasar bagi Kabupaten/Kota yang mencakup SPM Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota dan SPM Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan. Adapun Indikator-indikator SPM Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Ketersediaan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
- b. Peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;



- c. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
- d. Ketersediaan ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, ruang kepala sekolah dan ruang staf kependidikan lainnya di setiap SD/MI dan SMP/MTs serta di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- e. Di setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan enam orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus tersedia empat orang guru setiap satuan pendidikan;
- f. Di setiap SMP/MTs tersedia satu orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
- g. Di setiap SD/MI tersedia dua orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
- h. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya atau 35% dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

- i. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
- j. Di setiap Kabupaten/Kota setiap kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- k. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- l. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- m. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
- n. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Sedangkan untuk SPM Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan meliputi:

- a. Di setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah yang mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

- b. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- c. Di setiap SD/MI telah tersedia satu set alat peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
- d. Di setiap SD/MI telah memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan di setiap SMP/MTs telah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
- e. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
- f. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: (a) Kelas I-II : 18 jam per minggu; (b) Kelas III : 24 jam per minggu; (c) Kelas IV-VI : 27 jam per minggu; dan, (d) Kelas VII-IX : 27 jam per minggu;
- g. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
- i. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
- j. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
- k. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
- l. Setiap kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (Ujian Semester/Ujian Nasional) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
- m. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas sesuai dengan acuan SPM Pendidikan Dasar. Oleh karenanya diperlukan komitmen yang tinggi bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dasar di daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip

manajerial modern dalam pelayanan pendidikan dimulai sejak penentuan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga penyusunan laporan eksternal.

#### **D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian mengenai standar pelayanan minimal pendidikan dasar telah dilakukan oleh Herwin pada tahun 2014 dengan judul, “Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar” (Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok). Metoda penelitian yang digunakan adalah analisis *gap* atau kesenjangan antara kondisi riil dengan SPM. Analisis kesenjangan menghasilkan kenyataan bahwa ruang kelas dan guru telah berlebih di Kecamatan Sangir bila distribusi siswa dan guru mengacu kepada SPM Dikdas. Bahkan jumlah guru masih berlebih sampai tahun 2015. Ruang kelas SD cukup sampai 2015, hanya perlu tambahan 6 lokal untuk SLTP. Namun kualifikasi guru dan kepala sekolah masih sangat jauh dari pemenuhan SPM. Sementara untuk fasilitas-fasilitas pendukung masih terdapat kekurangan. Demikian pula dengan buku dan alat peraga, masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk melengkapinya. Hasil analisis terhadap pembiayaan operasi nonpersonalia di sekolah menunjukkan anggaran yang masih kecil termasuk alokasi anggaran untuk alat tulis sekolah dan bahan/alat habis pakai.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subangun (FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo) Tahun 2014 dengan judul, “Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar Penerima

Dana Bos 2014 Di Kabupaten Ponorogo” dengan menggunakan metode kuantitatif dan analisis kesenjangan menyimpulkan bahwa sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Ini dibuktikan dengan SD di Kabupaten Ponorogo yang memenuhi kelayakan dalam pengelolaan dana BOS tahun 2014 mencapai 83% dan penyediaan sarana dan prasarana mencapai 77%. Adapun sekolah dasar yang memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar pada umumnya belum mencapai 100%, terutama pada penyediaan buku teks SD empat mapel per siswa mencapai 73%; penyediaan alat peraga IPA dan bahan berupa model mencapai 82%; penyediaan buku pengayaan dan 10 buku referensi mencapai 81%; pelaksanaan jam kerja guru melaksanakan tugas 78%; jumlah jam pembelajaran per minggu 95%; penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 96%, penyampaian laporan hasil evaluasi kepada atasan 87%. Adapun jumlah sekolah dasar yang memenuhi standar pelayanan minimal mencapai 100% adalah penerapan RPP dalam pembelajaran; pengembangan program penilaian; pelaksanaan supervisi; penyampaian laporan hasil evaluasi kepada masyarakat dan penerapan MBS.

Sementara penelitian dari Fitri Intendia dari Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor pada tahun 2012 yang berjudul “Penentuan Indikator Standar Pelayanan Minimal Mutu Sekolah Dengan Cart Dan Regresi Logistik” yang dilakukan dengan menggunakan metode pohon keputusan, yaitu cart (*classification and regression trees*), serta regresi logistik, menghasilkan adanya tiga indikator SPM yang mempengaruhi

nilai UN, dengan urutan indikator yang paling berpengaruh adalah adanya ketersediaan minimal 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi, adanya penyampaian laporan ulangan akhir sekolah oleh Kepala SMP/MTs, dan adanya penyampaian hasil evaluasi mata pelajaran oleh guru. Sedangkan pencapaian indikator SPM yang mempengaruhi status akreditasi sekolah ada delapan indikator, dengan urutan indikator yang paling berpengaruh yakni adanya ketersediaan minimal 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi, penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), supervisi yang dilakukan Kepala SMP/MTs, guru yang tetap bekerja per minggu  $\geq 37.5$  jam, adanya laporan tahunan, adanya penyampaian laporan ulangan kenaikan kelas oleh Kepala SMP/MTs, jam belajar minimal 34 minggu per tahun dan 27 jam per minggu, serta adanya komite sekolah yang berfungsi dengan baik.

Penelitian Riska Muliawati Permata (Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2015 yang berjudul, "Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Studi Kasus Pada 12 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan pencapaian 20 indikator dalam SPM yang dijadikan patokan pada sekolah. Berdasarkan hasil penghitungan data yang didapatkan dari lapangan di 12 SDN Kecamatan Mangkubumi, bahwa capaian SPM sebesar 70,44%, sedangkan untuk capaian di gugus IV yang dijadikan sampel sebesar 73,33%. Untuk sekolah dengan capaian SPM terbesar yakni SDN Cibanjuran dengan capaian sebesar 85,71% dan capaian

terendah yakni pada SDN I Mangkubumi dan SDN I Cipari dengan capaian sebesar 61,90%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pencapaian SPM Pendidikan Dasar di 12 Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ini masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi, serta perlu adanya peningkatan pada aspek- aspek yang kurang pada setiap sekolah.

Hasil dari beberapa penelitian diatas menjadi landasan sekaligus pembandingan terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Nunukan ini dengan fokus penelitian pada Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar khususnya SMP/MTs dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik analisis *gap* (kesenjangan) atau perbandingan antara hasil pengukuran pencapaian indikator dengan indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan dan factor-faktor yang mendukung dan menghambatnya sehingga hasilnya dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan yang mendukung peningkatan pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs khususnya di Kabupaten Nunukan.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Dengan kewenangan desentralisasi yang telah dilimpahkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki hak mengatur daerahnya sesuai dengan fungsi pemerintahan yakni pelayanan, pemberdayaan, dan



pembangunan. Oleh karenanya pemerintah daerah seharusnya melakukan perencanaan strategik pembangunan yang matang salah satunya perencanaan startegik bidang pendidikan. Perencanaan tersebut harus berdasarkan SPM Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010, yang menjadi acuan dan tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar khususnya di daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan upaya pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar 9 tahun yang telah didukung dengan pengalokasian anggaran minimal 20% dari APBD.

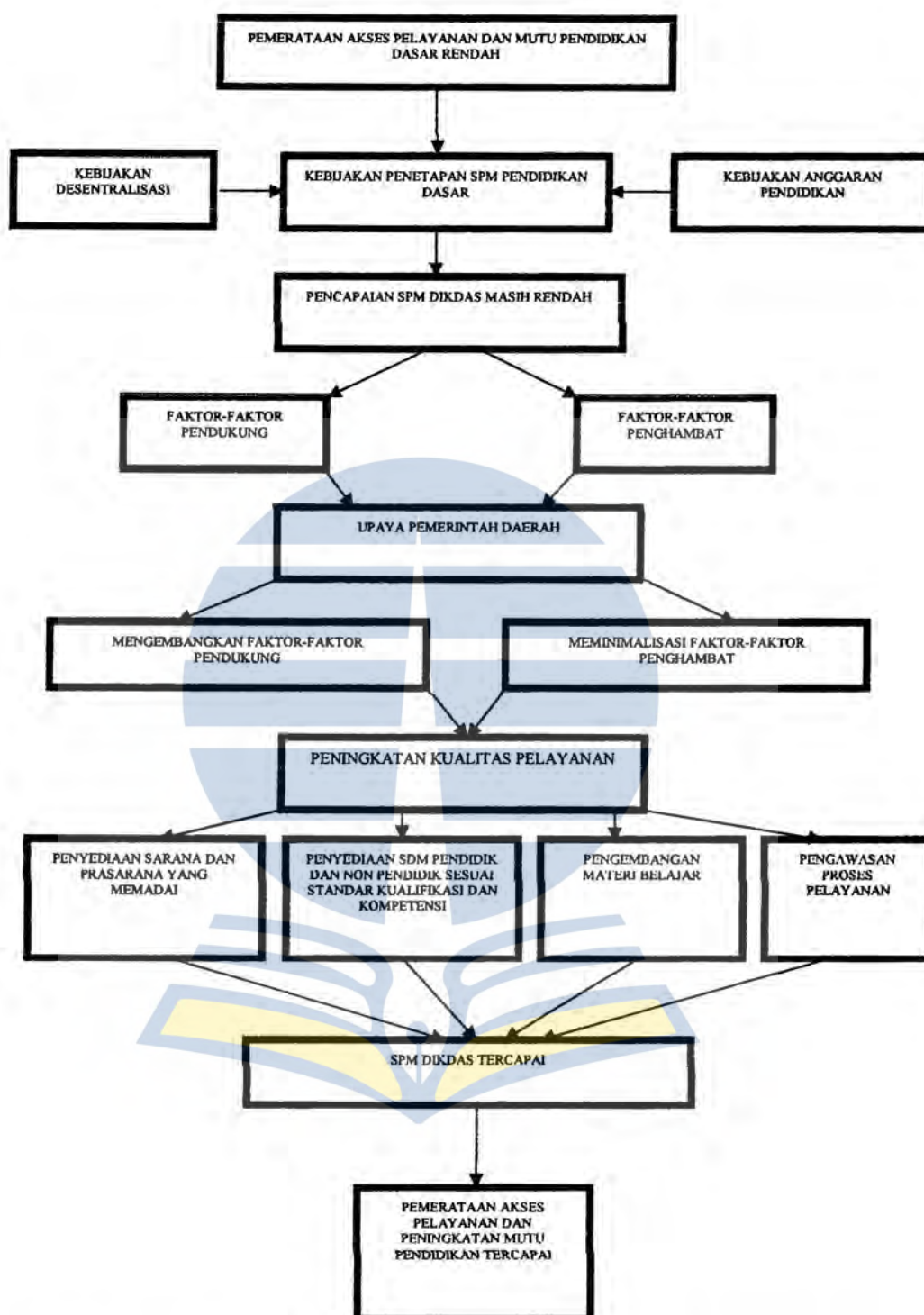
Belum berhasilnya pencapaian indikator SPM pendidikan dasar, menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan maupun implementasinya. Hal ini tentu saja terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator SPM baik dari aspck perencanaan maupun aspck implmentasinya. Terlihat ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi sehingga berakibat *disparitas* antara harapan dan kenyataan.

Seharusnya kondisi ini menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan. Sehingga secara bertahap indikator SPM dapat tercapai dengan meminimalisasi faktor penghambat dan mengoptimalkan faktor pendukung. Namun demikian, keterbatasan anggaran dapat menjadi pertimbangan dalam membuat perencanaan prioritas kebutuhan/masalah mana yang perlu dipecahkan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis akan mengukur pencapaian indikator SPM pendidikan dasar SMP/MTs di Kabupaten

Nunukan yang selanjutnya mengkomparasi dengan SPM pendidikan dasar SMP/MTs yang telah ditetapkan. Kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab kesenjangan diantara keduanya dengan menggunakan teori SERVQUAL yang diformulasikan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990). Dimana teori SERVQUAL merupakan skala multi-item yang terdiri dari dua bagian utama dengan maksud mengukur harapan dan persepsi pelanggan, serta kesenjangan (*gap*) yang ada di dalam model kualitas pelayanan jasa. Model kualitas pelayanan (jasa) ini menyoroti syarat-syarat utama dalam penyampaian kualitas pelayanan (jasa) yang sempurna. Model ini mengidentifikasi lima *gap* yang menyebabkan kegagalan penyampaian pelayanan (jasa), yaitu: *gap* persepsi manajemen, *gap* persepsi kualitas, *gap* kinerja pelayanan, *gap* komunikasi pasar, dan *gap* kualitas pelayanan.

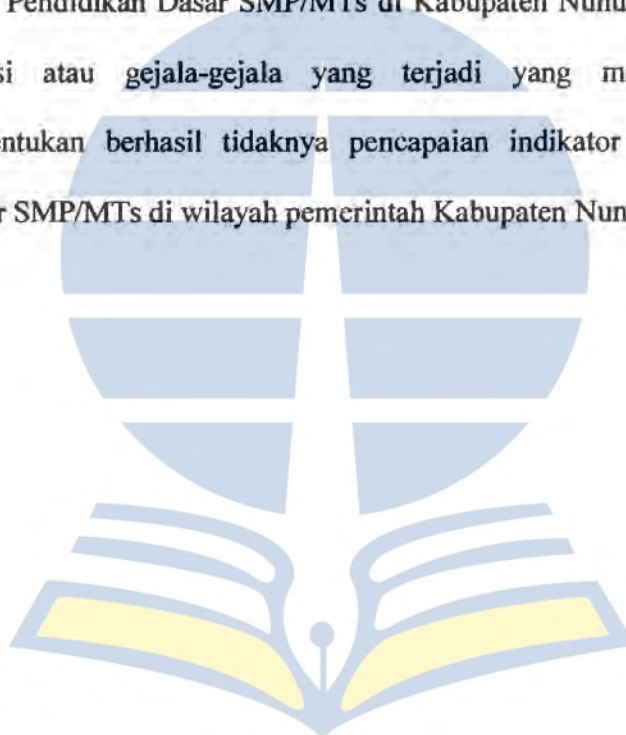
Selanjutnya berdasarkan hasil analisis tersebut penulis akan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor mana yang menjadi penyebab tercapai (pendukung) dan tidak tercapainya (penghambat) SPM pendidikan dasar SMP/MTs. Dengan demikian pada akhir laporan penelitian, peneliti akan menyimpulkan pembahasan hasil penelitian sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan pendidikan khususnya SMP/MTs baik dari aspek kebijakan, perencanaan, maupun impleentasinya. Sehingga tiap-tiap indikator pada jenjang pendidikan tersebut dapat tercapai sesuai SPM pendidikan dasar yang telah ditetapkan.



Gambar 2.1: Kerangka Berpikir Pencapaian SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs

## **F. Operasional Konsep**

- a. SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs adalah standar kualitas yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan bidang pendidikan dasar SMP/MTs.
- b. Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs adalah kriteria-kriteria atau kondisi-kondisi yang menjadi target pencapaian SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs.
- c. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan adalah situasi-situasi atau gejala-gejala yang terjadi yang mempengaruhi dan menentukan berhasil tidaknya pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs di wilayah pemerintah Kabupaten Nunukan.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian difokuskan pada masalah “Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan” dalam meningkatkan kualitas dan akses pemerataan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat. Dalam penelitian, peneliti menempatkan diri sebagai “*insider*” bukan “*outsider*” guna menemukan fakta yang menggambarkan secara deskriptif mengenai obyek penelitian yang meliputi pelaku (*actor*), aktivitas-aktivitas pelaku (*activities*), serta tempat (*place*) di lokasi penelitian.

Penelitian menghasilkan gambaran tentang fenomena atau situasi sosial tertentu secara mendalam dan obyektif yang menjadi masalah penelitian dan memperoleh informasi tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya pencapaian indikator SPM tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pemerataan pelayanan di bidang pendidikan dasar kepada masyarakat khususnya SMP/MTs.

#### B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

##### 1. Ruang lingkup data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yakni tentang “Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Dasar di Kabupaten Nunukan khususnya indikator SPM SMP/MTs” sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam sub-sub masalah. Data primer berasal dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi.

## 2. Sumber Informasi

Sumber informasi terdiri dari sumber informasi utama dan sumber informasi pendukung baik dari internal maupun eksternal Dinas Pendidikan yang memiliki kaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan terkait dengan pengambilan keputusan dan pelaksana keputusan. Sumber informasi internal meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Seksi Pendidikan Dasar SMP/MTs, Pngawas SMP/MTs, pctugas pggelola data sertifikasi guru, dan pctugas pengelola DAPODIK (Data Pokok Pendidikan), kepala sekolah SMP/MTs, pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs, dan Kepala UPTD Pendidikan Dasar dan Menengah (PDM). Sumber informasi eksternal meliputi Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, LSM pemerhati pendidikan, dan perwakilan dari orang tua siswa SMP/MTs. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari informan, dilakukan telaah terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

## 3. Pemilihan informan

Penentuan informan dalam penelitian ini, menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik

pemilihan informan yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi sebagai sumber data tetapi melalui pertimbangan tertentu dari peneliti (Sugiyono, 2015:300). Sumber data diambil dari orang yang peneliti anggap memiliki banyak informasi tentang obyek penelitian menurut pertimbangan populasi dan pertimbangan keterwakilan keragaman populasi sehingga memudahkan peneliti menggali data dan informasi yang dibutuhkan.

### **C. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi untuk pengambilan data yang disusun sebelum melakukan pengumpulan data. Disamping itu peneliti melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan melakukan kajian dokumentasi yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian. Hal-hal yang diobservasi seperti yang terdapat pada lampiran 2 sedangkan hal-hal yang ditanyakan pada saat wawancara seperti yang disajikan pada Lampiran 1.

### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menetapkan langkah-langkah prosedur pengumpulan data yaitu: persiapan, yang meliputi pengumpulan dokumen-dokumen terkait obyek penelitian, melakukan observasi sekilas, kemudian menyusun pedoman wawancara dan pedoman observasi. Selanjutnya melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah terkumpul, melakukan janji temu dengan para informan

untuk wawancara, dan selanjutnya melakukan wawancara dan observasi secara mendalam.

Berdasarkan prosedur pengumpulan data diatas, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara mendalam (*deep interview*)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2015:317). Wawancara mendalam atau tidak berstruktur adalah teknik wawancara yang bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara tetapi hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang belum jelas terungkap (Sugiyono, 2015:197).

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam obyek penelitian yaitu dengan Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kepala Seksi Pendidikan Dasar SMP/MTs, Kepala SMP/MTs, guru, Ketua Dewan Pendidikan, Pengawas SMP/MTs, petugas pengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik), petugas pengelola aset sekolah, petugas pengelola sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, Kepala UPTD Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Komite Sekolah, LSM pemerhati pendidikan, dan perwakilan orang tua siswa SMP/MTs.



## 2. Observasi tersamar

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap obyek. Dalam teknik ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan menggunakan observasi, data yang diperoleh lebih lengkap, tajam dan mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku *actor* yang tampak (Sugiyono, 2015:204). Observasi tersamar atau tidak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini peneliti lakukan untuk mengungkap informasi yang belum pasti. Dalam melakukan pengamatan tidak digunakan instrumen yang telah baku tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Peneliti menggunakan observasi tersamar tanpa sepengetahuan informan untuk memperoleh informasi yang sekiranya masih dirahasiakan oleh informan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang lain. Selain itu observasi digunakan peneliti untuk menganalisis kesesuaian informasi (triangulasi teknik) yang telah diperoleh dalam teknik wawancara mendalam.

## 2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pendukung dalam proses pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau literatur dan bahan-bahan yang tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk melengkapi keakuratan data.

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mempelajari catatan peristiwa yang sudah ada baik yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Selain itu studi dokumentasi juga diperoleh melalui data sekunder yang tersedia pada instansi atau lembaga yang ada yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan alat dokumentasi (kamera) sebagai alat bantu.

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari literatur yang berkaitan dalam bentuk kebijakan/peraturan, buku referensi, artikel, data laporan pelayanan, dan laporan pengaduan layanan. Disamping itu peneliti melengkapi dengan gambar-gambar dan rekaman peristiwa dari situasi sosial yang ada di lapangan penelitian.



Gambar 3.1: Tahapan Penelitian

## E. Metode Analisis Data

### 1. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman (2002) dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga tuntas dan datanya sampai jenuh. Tahapan dalam kegiatan ini meliputi tahap pengumpulan data kolektif (*data collection*), tahap pereduksian data (*data reduction*), tahap men-*display* data, dan tahap pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Kegiatan analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan dengan tahapan sebagai berikut:

#### a. Sebelum ke lapangan

Pada tahap ini analisis data dilakukan terhadap data sekunder hasil studi pendahuluan sehingga data yang diperoleh dapat memperjelas fokus penelitian.

#### b. Selama dan setelah dari lapangan

Selama pengumpulan data di lapangan dilakukan juga analisis data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi. Hasil analisis data yang belum memuaskan dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data kembali sampai pada tahap tertentu dimana data

yang diperoleh sudah jenuh. Setelah dari lapangan, analisi data dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

1) Mereduksi data

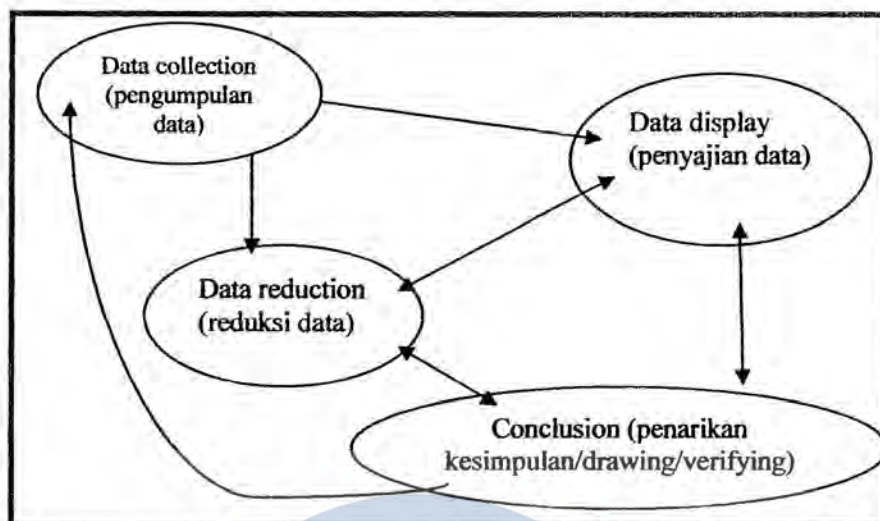
Kegiatan mereduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya mengingat data yang diperoleh di lapangan sangat banyak. Sehingga hasil reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas.

2) Menyajikan data

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kualitatif, bagan, grafik, tabel, dan gambar sehingga data yang diperoleh mudah dipahami dan dapat menggambarkan jawaban atas masalah penelitian yang dirumuskan.

3) Penarikan kesimpulan

Berdasarkan data yang telah disajikan selanjutnya dilakukan kegiatan menarik kesimpulan. Kesimpulan inilah yang menjadi jawaban pertanyaan penelitian, sehingga berdasarkan kesimpulan tersebut disusun solusi pemecahan masalah yang sesuai dengan temuan hasil penelitian.



Gambar 3.2: Analisis data model interaktif  
(Sumber: Miles and Huberman, 2002)

Adapun variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana Tabel 3.1 berikut.



Tabel 3.1  
Variabel dan Indikator Penelitian

No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Jenis Data	Cara Pengumpulan Data	Informan	Metode Analisis Data
1.	Menganalisis pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan.	<p>a. Keadaan peserta didik</p> <p>b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tenaga kependidikan (guru, non guru, kepala sekolah, pengawas)</p> <p>d. Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan (guru, non guru, kepala</p>	<p>Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Dasar SMPMTs oleh Kabupaten/Kota</p> <p>a. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;</p> <p>b. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;</p> <p>c. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;</p> <p>d. Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.</p> <p>e. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;</p> <p>f. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk</p>	Primer	Observasi dan Wawancara	<p>Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kabid Dikdas, Kabid Saprast, Kasi Dikdas SMP/Mts, Kepala UPTD PPDM, Kepala Sekolah, Ketua Dewan Pendidikan, Petugas Pengelola Dapodik, Petugas Pengelola Data Sertifikasi Guru, Petugas Pengelola Aset Sekolah.</p>	<p>Analisis Data Kualitatif Model Interaktif (Miles dan Hubberman)</p>

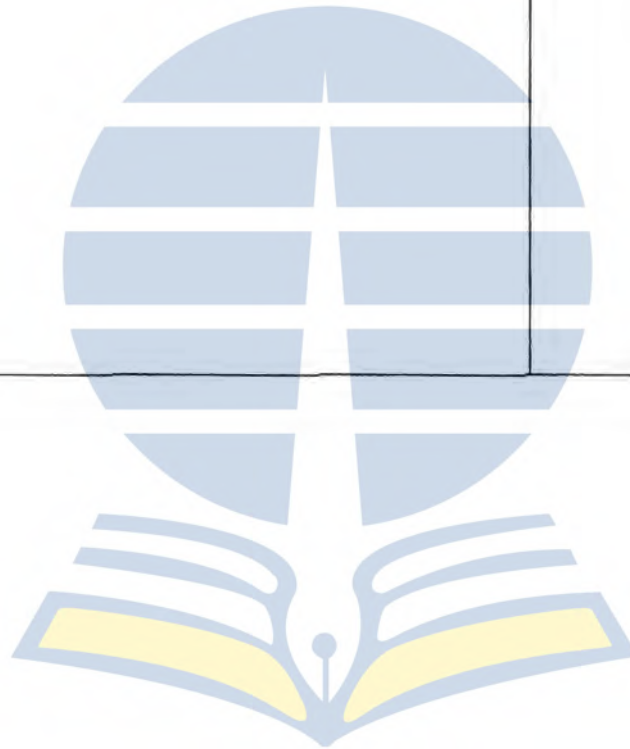
		<p>sekolah, pengawas)</p> <p>e. Proses pemberian layanan dan penyelenggaraan pembelajaran</p> <p>f. Dukungan kebijakan dan program</p>	<p>daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;</p> <p>g. Setiap SMP/MTs telah tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;</p> <p>h. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>i. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>j. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan</p> <p>k. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.</p> <p>SPM Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan meliputi:</p> <p>n. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;</p> <p>o. Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;</p> <p>p. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;</p> <p>q. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka Kelas VII – IX : 27 jam per minggu;</p> <p>r. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>s. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>t. Setiap guru di SMP/MTs mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;</p> <p>u. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;</p> <p>v. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;</p> <p>w. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan</p> <p>x. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).</p>				
2.	Menganalisis faktor-faktor yang menentukan pencapaian	<p>a. Pengaruh faktor-faktor pendukung</p> <p>b. pengaruh factor-faktor</p>	<p>a. Faktor-faktor pendukung</p> <p>b. Factor-faktor penghambat</p>	Sekunder	Wawancara dan Studi Dokumentasi	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid Dikdas, Kabid Saprasi, Kasi Dikdas	Analisis data kualitatif Model Interaktif



	indikator SPM pendidikan dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan.	penghambat				SMP/Mts, Kepala UPTD PPDM, Kepala Sekolah, Ketua Dewan Pendidikan, Petugas Pengelola Dapodik, Petugas Pengelola Data Sertifikasi Guru, Petugas Pengelola Aset Sekolah.	(Miles dan Hubberman)
--	---	------------	--	--	--	--	--------------------------

Sumber: Penulis



## 2. Teknik analisis keabsahan data

Untuk menjamin kebenaran data (*credibility*), memperoleh tingkat relatifitas kesamaan data pada situasi lain yang lebih tinggi (*transferability*), konsistensi yang sesuai dengan setiap proses studi dan kenyataan yang ada di lapangan (*dependability*), dan memastikan data dapat dikonfirmasi atau disepakati oleh subyek atau informan (*confirmability*), teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

### a. Teknik uji kredibilitas (kebenaran data)

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

#### 1) Teknik Triangulasi

Peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber (triangulasi sumber) dengan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi teknik) untuk meng*cross-check* silang jawaban dari masing-masing sumber data. Misalnya informasi yang diperoleh dari informan yang satu ditanyakan kembali kepada informan yang lain dan sebaliknya. Melalui penggunaan berbagai teknik, informasi yang telah diperoleh melalui wawancara digali kembali melalui teknik observasi dan/atau dokumentasi dan sebaliknya. Kegiatan triangulasi ini dilakukan untuk mendapat kepastian data yang lebih obyektif.

## 2) Analisis kasus negatif

Teknik ini digunakan untuk mencari data yang berbeda dan bertentangan dengan data yang telah ditemukan dengan asumsi bahwa bila data yang berbeda semakin minim berarti data yang telah diperoleh sudah dapat dipercaya.

## 3) Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi digunakan peneliti untuk membuktikan data yang telah ditemukan melalui pendukung kebenaran data seperti hasil rekaman wawancara dan foto-foto tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan.

## 4) *Member check* (pengecekan anggota).

*Member check* adalah proses pengecekan atas data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data baik sumber data utama maupun sumber data pendukung untuk mengetahui kesesuaian data yang telah diperoleh dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Dalam konteks penelitian ini, *member check* dilakukan dengan mengkonfirmasi lagi data yang telah diperoleh kepada sumber data yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh dari sumber data utama dan pendukung dikonfirmasi kepada masing-masing sumber data yang bersangkutan.

## b. Pengujian *transferability*

Pengujian *transferability* hasil penelitian dilakukan dengan cara memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya

untuk menunjukkan sejauhmana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain yang memiliki karakteristik sama.

c. Pengujian *dependability* dan *confirmability*

Pengujian *dependability* atau disebut reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian sehingga hasil penelitian akan dianggap reliabel apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menyerahkannya pada pembimbing melalui proses bimbingan yang memfokuskan pada masalah penelitian dan sub-sub masalahnya, landasan berpikir dan konsep-konsep yang digunakan, tujuan dan manfaat penelitian, teknik pengumpulan data termasuk instrumen dan pedoman pengumpulan datanya, teknik analisis data, teknik pengujian kebenaran data, hingga jadwal dan langkah-langkah penelitian mulai dari penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian sampai dengan penyusunan laporan penelitian. Sedangkan pengujian *confirmability* hasil penelitian adalah untuk menguji obyektivitas penelitian berkaitan dengan proses penelitian. Semakin banyak orang yang menyepakati hasil penelitian tersebut maka semakin obyektif. pengujian *confirmability* dilakukan bersamaan dengan *dependability*.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

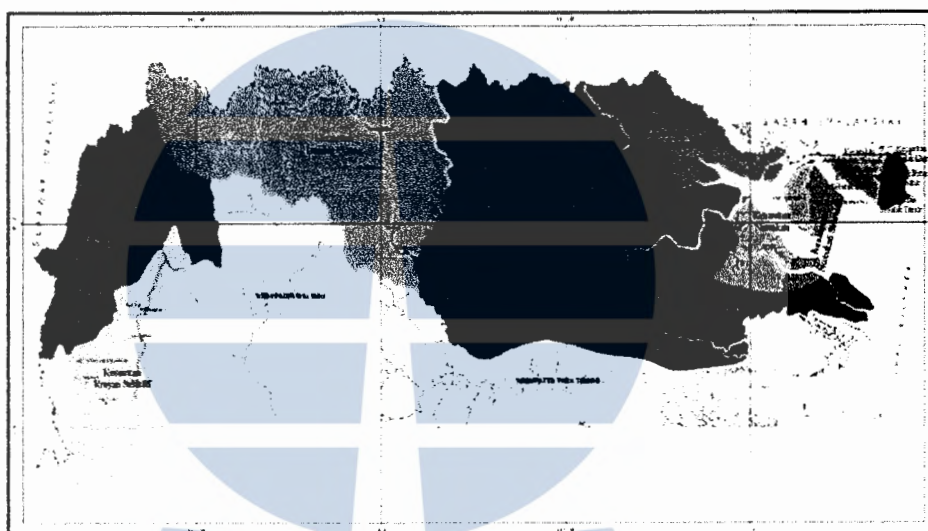
### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Nunukan merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Utara yang secara administrasi terdiri dari 16 kecamatan yakni 2 kecamatan di Pulau Nunukan (Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan), 5 kecamatan di Pulau Sebatik (Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah) dan 9 kecamatan di daratan Pulau Kalimantan (Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulay, Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan).

Pulau Nunukan sendiri merupakan ibu kota kabupaten dengan Kecamatan Nunukan sebagai pusat kota kabupaten dan Kecamatan Nunukan Selatan sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Sebagai ibu kota kabupaten dan pusat pemerintahan, di kedua kecamatan ini sudah tersedia fasilitas publik seperti kantor-kantor pemerintahan dan lembaga-lembaga pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun instansi vertikal sebagai perpanjangan pemerintah pusat. Infrastruktur di wilayah ini juga cukup memadai mulai dari sarana dan prasarana transportasi seperti jalan raya, bandara, pelabuhan kapal besar dan pelabuhan kapal kecil yang menghubungkan baik dengan ibu kota kabupaten dengan kota-kota kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan maupun dengan kota-kota di luar kabupaten. Bahkan aksesnya hingga ke luar negeri.

Jarak orbitasi dari 14 kecamatan yang ada di luar Pulau Nunukan ke ibu kota kabupaten dari yang terdekat yakni Kecamatan Sebatik Barat dan terjauh yakni Kecamatan Lumbis Ogong antara 30 menit sampai dengan 4,5

jam dengan menggunakan alat transportasi laut, darat dan udara. Sedangkan jarak orbitasi dari ibu kota kabupaten ke ibu kota propinsi dapat ditempuh dengan menggunakan speedboat selama  $\pm 3,5$  jam atau dengan pesawat jenis foker atau air bus selama 40 menit. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Nunukan memiliki batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Sabah-Malaysia, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, dan sebelah Barat berbatasan dengan Serawak-Malaysia.



Gambar 4.1: Peta Wilayah Kabupaten Nunukan 2015

Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah  $\pm 14.247,50$  km<sup>2</sup> yang penggunaan lahannya meliputi  $\pm 398.867$  ha merupakan wilayah Hak Penguasaan Hutan (HPH) perkebunan. Lahan untuk hutan lindung (HL), hutan produksi (HP), hutan produksi yang dikonversi (HPK), dan kawasan budidaya non kehutanan berjumlah 1.420.889 ha. Sisanya adalah area yang dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum seperti perkantoran,

pclabuhan, bandara, lokasi industri, pasar, pemakaman, taman kota, stadion olah raga, dan jalan raya.

Kabupaten Nunukan pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk sebanyak 162.711 jiwa atau  $\pm$  40.677 KK yang terdiri dari 86.888 jiwa penduduk laki-laki dan 75.823 jiwa penduduk perempuan dengan komposisi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Komposisi Penduduk Kabupaten Nunukan Berdasarkan  
Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2013

No.	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 5	11.638	10.156	21.794	13.4
2	6 – 11	11.400	9.949	21.349	13.1
3	12 – 17	10.480	9.145	19.625	12.1
4	18 – 23	8.745	7.632	16.377	10.1
5	24 – 29	9.030	7.881	16.911	10.4
6	30 – 35	9.308	8.122	17.430	10.7
7	36 – 41	8.324	7.264	15.588	9.58
8	42 – 47	6.384	5.571	11.955	7.35
9	48 – 53	4.468	3.899	8.367	5.14
10	54 – 59	2.915	2.544	5.459	3.36
11	60 ≤	4.195	3.661	7.856	4.83
<b>Jumlah</b>		<b>86.888</b>	<b>75.823</b>	<b>162.711</b>	<b>100</b>

Sumber Data: BPS Nunukan, Nunukan Dalam Angka 2014.

Tabel 4.1 menggambarkan jumlah penduduk kelompok umur 0 - 5 tahun merupakan kelompok paling banyak yakni 21.794 jiwa atau  $\pm$  13.4 %. Disusul jumlah penduduk kelompok umur 6 – 11 tahun sebanyak 21.349 jiwa atau 13.1% dan kelompok umur 12 – 17 tahun sebanyak 19.625 jiwa atau sebesar 12.1%. Jumlah penduduk usia 30 – 35 tahun sebanyak 17.430 atau sekitar 10.7% dan penduduk usia antara 24 – 29 tahun 18 – 23 masing-masing adalah 16.911 dan 16.377 atau 10.4% dan 10.1%. Sedangkan penduduk kelompok umur 36 – 41 dan 42 – 47, masing-masing adalah 15.588 dan

11.955 jiwa. Selanjutnya penduduk kelompok umur 48 – 53 dan 54 – 59 masing-masing sebanyak 8.367 dan 5.459 atau 5.14% dan 3.36%. Sisanya adalah kelompok umur 60 tahun keatas (lanjut usia) yaitu 7.856 jiwa atau 4.83%.

Kondisi penduduk berdasarkan usia diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Nunukan merupakan penduduk usia produktif yang ditunjukkan oleh kelompok umur yang termasuk dalam usia angkatan kerja 18 – 59 tahun berjumlah 92.807 jiwa atau  $\pm$  56.60 % dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut penduduk usia 13-15 tahun 9.314 jiwa atau  $\pm$  5.7%.

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kabupaten Nunukan usia 12 tahun keatas pada tahun 2013 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2  
Komposisi Penduduk Kabupaten Nunukan  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		L	P		
1.	Tamat SD	6.933	6.399	13.332	11.15
2.	Tamat SMP/SLTP	21.662	19.996	41.658	34.84
3.	Tamat SMA/SLTA	25.274	23.330	48.604	40.65
5.	Tamat Akademi (D1-D3)	5.708	5.268	10.976	9.18
6.	Tamat Sarjana (S1-S3)	2.599	2.399	4.998	4.18
<b>Jumlah</b>		<b>62.176</b>	<b>57.392</b>	<b>119.568</b>	<b>100</b>

Sumber Data: BPS Nunukan, Nunukan Dalam Angka 2014.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Nunukan sebagian besar adalah lulusan SLTA yakni sebanyak 48.604 orang atau sekitar 40,65%. Jumlah penduduk yang lulus SLTP sebanyak 41.658 orang atau sebesar 34,84%. Penduduk yang lulus perguruan tinggi adalah 15.974 orang



yang terdiri dari tamatan diploma (D1-D3) 10.976 orang dan sarjana (S1-S3) 4.998 orang. Sedangkan penduduk yang masih memiliki pendidikan setingkat Sekolah Dasar sebanyak 13.332 orang yang terdiri dari para lanjut usia.

Dilihat dari struktur sosialnya, masyarakat Kabupaten Nunukan sebagian masih merupakan masyarakat tradisional khususnya kecamatan diluar Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Sementara untuk masyarakat di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik merupakan masyarakat peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat perkotaan yang memiliki ciri-ciri sosiologi kota dan desa dimana pembagian kerja mulai jelas, dan lembaga-lembaga pelayanan publik seperti rumah sakit, kantor polisi, kantor birokrasi, lembaga pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi sudah tersedia. Hal ini mengingat Pulau Nunukan merupakan pusat kota dan pusat pemerintahan kabupaten, sedangkan Pulau Sebatik merupakan daerah transit yang berbatasan langsung dengan Kota Tawau Malaysia sehingga pengaruh Kota Tawau juga memberikan pengaruh modernisasi bagi masyarakat Pulau Sebatik.

Masyarakat Nunukan terdiri dari beragam suku bangsa baik suku lokal maupun pendatang. Suku lokal yakni suku Tidung dan Dayak hanya  $\pm 20\%$  dari jumlah penduduk. Sebagian besar  $\pm 80\%$  adalah suku pendatang yang terdiri dari suku Bugis sekitar  $\pm 50\%$ , suku Jawa  $\pm 20\%$ , dan sisanya  $\pm 10\%$  terdiri dari suku Toraja, Timor, Tionghoa, dan lain-lain. Mayoritas penduduk beragama Islam (95%) dan sisanya beragama Kristen, Katolik dan Budha.

Struktur kepemimpinan dalam masyarakat ini bersifat formal dan informal. Kepemimpinan formal terdiri dari RT, RW, Lurah dan seterusnya.

Sedangkan kepemimpinan informal terdiri dari ketua suku, tokoh agama (ustad, kyai, pendeta dsb.), dan ketua paguyuban yang menjadi panutan dalam hal-hal tertentu seperti keagamaan, adat istiadat dan sebagainya.

Nilai budaya yang dianut adalah nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya serta tradisi masing-masing suku yang masih terjaga meskipun mulai mengalami pemudaran. Masyarakat disini masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Hal ini ditunjukkan masih adanya keterkaitan keluarga dari masing-masing individu yang tergabung dalam hampir di setiap kelompok lembaga kemasyarakatan yang ada.

Sementara itu gambaran umum kondisi pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan yang menjadi obyek penelitian ini, menurut data pokok pendidikan (Dapodik) 2015, saat ini memiliki 51 SMP/MTs yang terdiri dari 38 sekolah negeri dan 13 sekolah swasta. Jumlah guru yang tersedia sebanyak 627 orang yang terdiri dari 571 orang berkualifikasi S1/D-IV dan 56 orang sisanya masih dibawah S1/D-IV. Sementara jumlah siswa sebanyak 9314 orang, yang terbagi dalam 317 rombongan belajar dengan jumlah kelas yang tersedia sebanyak 292 kelas. Angka Partisipasi Murni (APM) baru mencapai 56,80% yang berarti bahwa sebanyak 43-44 anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah di SMP/MTs. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) baru mencapai 73,56%. Berdasarkan data tersebut baik APM maupun APK untuk jenjang pendidikan dasar SMP/MTs belum mencapai SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs yang menetapkan APM dan APK sebesar 90%. Sementara itu APM dan APK untuk SD/MI telah mencapai masing-masing 98% dan 112% atau melebihi APM dan

APK yang ditentukan dalam SPM yakni 90% dan 95%. Kondisi ini menggambarkan belum tercapainya pemerataan akses pelayanan pendidikan khususnya jenjang pendidikan SMP/MTs.

## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan analisis *gap* (kesenjangan) untuk melihat disparitas antara indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 15 Tahun 2010 dengan kondisi riil yang telah dicapai di Kabupaten Nunukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh satuan pendidikan, diperoleh gambaran hasil penelitian sebagai berikut:

### **1. Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan**

Hasil penelitian tentang pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dideskripsikan dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut :

#### **a. Jarak antara pemukiman permanen dengan sekolah**

Tuntutan SPM Pendidikan Dasar pada jenjang SMP/MTs adalah bahwa pemerintah kabupaten/kota menyediakan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs. Hasil penelitian tentang indikator ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3  
Jarak antara Pemukiman Permanen dengan Sekolah

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Maksimal 6 km	< 3 km	34	66,67
	3-6 km	12	23,53
	6 km <	5	9,80
Jumlah		51	100,00

Sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 4.3 diatas dapat digambarkan bahwa dari 51 SMP/MTs yang ada di Kabupaten Nunukan, sebesar 66,67% atau sebanyak 34 sekolah memiliki jarak kurang dari 3 km, dan 23,53% atau 12 sekolah berjarak antar 3-6 km, dan sisanya yakni 5 sekolah atau 9,80% berjarak lebih dari 6 km dari pemukiman tetap.

- b. Jumlah peserta didik dalam setiap rombel dan ketersediaan ruang kelas serta meja kursi peserta didik dan guru

Sesuai ketentuan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar yaitu maksimal 36 orang untuk SMP/MTs dan setiap rombongan belajar tersedia ruang kelas serta meja kursi peserta didik dan guru. Hasil penelitian terhadap indikator ini dapat terlihat pada Tabel 4.4 dan 4.5 berikut :

Tabel 4.4  
Jumlah Peserta Didik dalam Setiap Rombel

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah Rombel	%
Setiap rombongan belajar maksimal terdiri dari 36 orang	≤ 36 orang	293	92,43
	37-40 orang	0	0,00
	40 orang <	24	7,57
Jumlah		317	100,00

Tabel 4.5  
Ketersediaan Ruang Kelas, Meja Kursi, Papan Tulis Setiap Rombel

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah Rombel	%
Setiap rombongan belajar memiliki 1 ruang kelas yang dilengkapi meja kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	Belum	25	7,89
	Sudah	292	92,11
Jumlah		317	100,00

Tabel 4.4 dan 4.5 menunjukkan bahwa terdapat 317 rombongan belajar SMP/MTs, 293 rombongan belajar atau 92,43% telah memenuhi standar SPM yang ditetapkan yakni setiap rombel maksimal berjumlah 36 peserta didik. Sedangkan jumlah peserta didik pada 24 rombongan belajar sisanya yaitu 7,57% adalah lebih dari 40 peserta didik per rombongan belajar. Sedangkan indikator ketersediaan ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang telah dilengkapi ruang kelas yang dilengkapi meja kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis, baru dipenuhi untuk 292 rombongan belajar atau 92,11%. Sementara sisanya sebanyak 25 rombongan belajar atau 7,89% belum terpenuhi.

c. Ketersediaan ruang laboratorium IPA, meja kursi, peralatan praktek

Indikator tentang ketersediaan ruang laboratorium, meja dan kursi, dan peralatan praktik IPA ditetapkan SPM Pendidikan Dasar jenjang SMP/MTs adalah bahwa di setiap sekolah harus tersedia ruang ruang laboratorium, meja dan kursi, dan alat praktik IPA yang cukup memadai untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Hasil penelitian tentang indikator ini digambarkan sebagaimana tabel 4.6

berikut:

Tabel 4.6  
Ketersediaan Ruang Laboratorium IPA, Meja Kursi  
dan Peralatan Praktek

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap sekolah tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi meja kursi yang cukup untuk peserta didik dan satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	Belum	22	43,14
	Tersedia tetapi peralatan praktik IPA tidak lengkap	12	23,53
	Tersedia dan lengkap	17	33,33
Jumlah		51	100,00

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hanya 17 sekolah dari 51 sekolah atau sebesar 33,33% yang telah tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi meja kursi yang cukup untuk peserta didik dan satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Sedangkan sekolah yang telah tersedia ruang laboratorium dan meja kursi yang cukup tetapi belum lengkap peralatan praktiknya berjumlah 12 sekolah atau sebesar 23,53%. Sementara sisanya 43,14% atau sebanyak 22 sekolah belum memiliki sama sekali ruang laboratorium IPA yang dilengkapi meja kursi yang cukup untuk peserta didik dan satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

d. Ketersediaan ruang kepala sekolah dan guru

Setiap SMP/MTs dituntut memiliki ruang guru yang dilengkapi dengan meja kursi dan memiliki ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruang guru. Hasil penelitian mengenai hal tersebut dapat terlihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7  
Ketersediaan Ruang Kepsek dan Guru

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Di setiap sekolah tersedia satu ruang guru dilengkapi meja dan kursi dan ruang kepek yang terpisah dengan ruang guru	Belum Ada	0	0,00
	Tersedia ruang guru dilengkapi meja dan kursi dan tetapi menyatu dengan ruang kepek	0	0,00
	Tersedia ruang guru dilengkapi meja dan kursi dan terpisah dengan ruang kepek	51	100,00
Jumlah		51	100,00

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 51 sekolah atau 100% telah tersedia ruang guru yang terpisah dengan ruang kepala yang dilengkapi meja dan kursi untuk setiap guru dan tenaga kependidikan non guru.

e. Ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran di SMP/MTs

Setiap SMP/MTs dituntut ketersediaan satu orang guru untuk setiap mata pelajaran. Untuk di daerah khusus minimal tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun pelajaran. Hasil penelitian tentang ketersediaan guru tersebut dapat digambarkan pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8  
Ketersediaan Guru untuk Setiap Mata Pelajaran di SMP/MTs

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Tersedianya guru untuk setiap mata pelajaran	Belum Tersedia	0	0,00
	Tersedia	51	100,00
Jumlah		51	100,00

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa di setiap sekolah dari 51 sekolah SMP/MTs di Kabupaten Nunukan atau sebesar 100% telah tersedia guru yang mengajar untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang

pendidikan SMP/MTs.

- f. Ketersediaan guru di SMP/MTs yang berkualifikasi akademik D-IV/S1 dan bersertifikat pendidik

Di setiap SMP/MTs dituntut ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya atau 35% telah memiliki sertifikat pendidik. Hasil penelitian tentang ketersediaan guru yang berkualifikasi dan bersertifikat pendidik ini ditunjukkan oleh tabel 4.9 dan 4.10 berikut:

Tabel 4.9  
Persentase Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
70% dari jumlah guru di setiap sekolah harus S1/D-IV	<60%	4	7,84
	60-69%	3	5,88
	70%	44	86,28
Jumlah		51	100,00

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa 44 sekolah SMP/MTs di Kabupaten Nunukan atau sebesar 86,28% telah memiliki 70% dari jumlah guru-gurunya berkualifikasi S1/D-IV, 3 sekolah atau 5,88% memiliki 60-69% dari jumlah gurunya berkualifikasi S1/D-IV, dan 4 sekolah atau 7,84% memiliki kurang dari 60% jumlah gurunya berkualifikasi S1/D-IV.

Tabel 4.10  
Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidikan di Sekolah

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
35% dari jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik	<35%	12	23,53
	35-40%	39	76,47
	> 40%	0	0,00
Jumlah		51	100,00



Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 39 sekolah atau 76,47% memiliki 35-40% dari jumlah gurunya bersertifikasi sebagai pendidik, dan 12 sekolah lainnya atau sebesar 23,53% memiliki kurang dari 35% jumlah gurunya belum bersertifikasi sebagai pendidik.

g. Ketersediaan guru Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang bersertifikat pendidik

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik D-IV/S1 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang guru untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Hasil penelitian tentang jumlah guru mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 4.11 sampai dengan tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.11  
Ketersediaan Guru Matematika yang Bersertifikat Pendidik

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap sekolah minimal memiliki 1 orang guru bersertifikat matematika	Belum ada	33	64,71
	Memiliki 1	14	27,45
	Memiliki lebih dari 1	4	7,84
Jumlah		51	100,00

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa jumlah sekolah yang memiliki satu orang guru yang bersertifikasi sebagai pendidik untuk mata pelajaran Matematika sebanyak 14 sekolah atau sebesar 27,45%. Sedangkan yang memiliki lebih dari satu orang guru bersertifikasi pendidikan untuk mata pelajaran Matematika sebanyak 4 sekolah atau sebesar 7,84%. Sementara sisanya sebanyak 33 sekolah atau 64,71% belum memiliki guru yang bersertifikasi pendidik untuk mata pelajaran Matematika.

Tabel 4.12  
Ketersediaan Guru IPA yang Bersertifikat Pendidik

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap sekolah minimal memiliki 1 orang guru bersertifikat guru IPA	Belum ada	49	96,08
	Memiliki 1	2	3,92
	Memiliki lebih dari 1	0	0,00
Jumlah		51	100,00

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki satu guru yang bersertifikasi sebagai pendidik untuk mata pelajaran IPA sebanyak 2 sekolah atau 3,92%, sedangkan 49 sekolah lainnya atau sebesar 96,08% belum memiliki guru yang bersertifikasi pendidik untuk mata pelajaran IPA.

Tabel 4.13  
Ketersediaan Guru Bahasa Indonesia yang Bersertifikat Pendidik

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap sekolah minimal memiliki 1 orang guru bersertifikat guru Bahasa Indonesia	Belum ada	37	72,55
	Memiliki 1	1	1,96
	Memiliki lebih dari 1	13	25,49
Jumlah		51	100,00

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki satu orang guru bersertifikasi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 1 sekolah atau 1,96%, lebih dari satu orang guru sebanyak 13 sekolah atau 25,49%, dan sisanya 37 sekolah atau 72,55% belum memiliki sama sekali.

Tabel 4.14  
Ketersediaan Guru Bahasa Inggris yang Bersertifikat Pendidik

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap sekolah minimal memiliki 1 orang guru bersertifikat guru Bahasa Inggris	Belum ada	32	62,75
	Memiliki 1	4	7,84
	Memiliki lebih dari 1	15	29,41
Jumlah		51	100,00

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa sebanyak 4 sekolah atau sebesar 7,84% telah memiliki satu orang guru bersertifikasi pendidik untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, sementara sebanyak 15 sekolah atau 29,41% memiliki lebih dari satu, sedangkan sisanya sebanyak 32 sekolah atau 62,75% sama sekali belum memiliki.

- h. Kualifikasi akademik kepala sekolah SMP/MTs dan kepemilikan sertifikat pendidik

Di setiap kabupaten/kota setiap kepala SMP/MTs dituntut berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Gambaran hasil penelitian tentang indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 4.15 dan 4.16 berikut:

Tabel 4.15  
Gambaran Kualifikasi Akademik Kepala Sekolah

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap kepala sekolah berkualifikasi akademik S1/D-IV	D-III ke bawah	1	1,96
	S1/D-IV	50	98,04
	S2 keatas	0	0,00
Jumlah		51	100,00

Tabel 4.16  
Gambaran Sertifikasi Kepala Sekolah

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap kepala sekolah bersertifikasi pendidik	Belum	0	0,00
	Sudah	51	100,00
Jumlah		51	100,00

Tabel 4.15 dan 4.16 menunjukkan bahwa 50 kepala sekolah atau 98,04% telah memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-IV sementara sisanya 1 orang kepala sekolah atau 1,96% belum berkualifikasi S1/D-IV. Sedangkan dari gambaran kepemilikan sertifikasi pendidik, sudah semua kepala sekolah atau 100% bersertifikasi sebagai pendidik.

i. Kualifikasi pengawas SMP/MTs dan kepemilikan sertifikat pendidik

Di setiap kabupaten/kota semua pengawas SMP/MTs dituntut berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Gambaran hasil penelitian indikator ini dapat dilihat pada tabel 4.17 dan 4.18 berikut :

Tabel 4.17  
Kualifikasi Akademik Pengawas SMP/MTs

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah Pengawas	%
Semua pengawas berkualifikasi akademik S1/D-IV	D-III ke bawah	1	14,29
	S1/D-IV	6	85,71
	S2 keatas	0	0,00
Jumlah		7	100,00

Tabel 4.18  
Kepemilikan Sertifikasi Pengawas

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah Pengawas	%
Setiap pengawas sekolah bersertifikasi pendidik	Belum	1	14,29
	Sudah	6	85,71
Jumlah		7	100,00

Tabel 4.17 dan 4.18 menunjukkan bahwa jumlah pengawas SMP/MTs sebanyak 7 orang. 6 orang atau 85,71% telah berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi sebagai pendidik. Sedangkan 1 orang atau 14,29% belum memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi sebagai pendidik.

j. Frekuensi kunjungan pengawas ke satuan pendidikan

Pengawas harus melakukan kunjungan ke satuan pendidikan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam dalam rangka supervise dan pembinaan. Hasil penelitian mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut :

Tabel 4.19  
Gambaran Kunjungan Pengawas Sekolah

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah Pengawas	%
Kunjungan pengawas ke sekolah minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk supervise dan pembinaan	Belum	0	0,00
	Sudah	7	100,00
Jumlah		7	100,00

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa seluruh pengawas atau 100% yakni 7 orang pengawas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam rangka supervisi dan pembinaan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama 3 jam.

- k. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran

Setiap pemerintah kabupaten/kota dituntut memiliki perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran untuk membantu satuan pendidikan. Hasil penelitian tentang inidkator ini digambarkan oleh tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20  
Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum  
dan Proses Pembelajaran Yang Efektif

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	
	Sudah	Belum
Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki Perencanaan dan Pelaksanaan pengembangan Kurikulum dan Proses pembelajaran yang efektif untuk membantu satuan pendidikan	√	

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan telah memiliki perencanaan dan melakukan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar SMP/MTs dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kantor Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Nunukan.

## 2. Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan

Analisis terhadap pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan dilakukan terhadap tiap-tiap sekolah berdasarkan data laporan yang disampaikan oleh sekolah-sekolah tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Namun tidak semua data

yang dibutuhkan untuk analisis termuat dalam laporan dimaksud. Untuk melengkapi informasi penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap 14 (empat belas) sampel SMP/MTs dari 51 SMP/MTs yang terdiri dari 6 sekolah negeri dan 8 sekolah swasta yang berada di Kabupaten Nunukan.

Hasil penelitian tentang pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh satuan pendidikan SMP/MTs dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Ketersediaan buku teks yang layak dan mencakup semua mata pelajaran

SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan harus menyiapkan buku teks yang layak dan mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. Hasil penelitian tentang indikator ini digambarkan dalam Tabel 4.21 berikut:

Tabel 4.21  
Ketersediaan Buku Teks Yang Mencakup Semua Mata Pelajaran

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap sekolah menyediakan buku teks yang layak dan mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	< 50%	8	57,14
	50%-75%	4	28,57
	<75% - <100%	2	14,29
	100% dan lebih	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa belum satupun sekolah dari 14 sekolah yang menjadi sampel penelitian yang telah menyediakan buku teks yang layak dan mencakup semua mata pelajaran dengan

perbandingan satu set untuk setiap peserta didik lengkap atau 0%. Sedangkan 2 sekolah atau 14,29% baru memenuhi lebih dari 75% tapi kurang dari 100%. Sementara sekolah yang hanya memenuhi kurang dari 75% tapi lebih dari 50% sebanyak 4 sekolah atau 28,57%. Sisanya 8 sekolah atau 57,14% memenuhi kurang dari 50%.

b. Ketersediaan buku pengayaan dan buku referensi

Setiap satuan pendidikan minimal harus menyediakan 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi. Hasil penelitian tentang indikator ini digambarkan dalam Tabel 4.22 dan Tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.22  
Ketersediaan Buku Pengayaan

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap sekolah menyediakan 200 judul buku pengayaan	<100	4	28,57
	100-150	4	28,57
	150< - <200	6	42,86
	200 dan lebih	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.23  
Ketersediaan Buku Referensi

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap sekolah menyediakan 20 judul buku referensi	<10 judul	0	0,00
	10-15 judul	0	0,00
	15< - <20 judul	0	0,00
	20 judul dan lebih	14	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.22 dan 4.23 menunjukkan bahwa indikator ketersediaan buku pengayaan, belum satu sekolahpun yang memiliki 200 atau lebih judul buku. Ada 6 sekolah saja atau hanya 46,15% yang baru memenuhi



lebih dari 150 dan kurang dari 200 judul buku pengayaan. Selebihnya 4 sekolah atau 28,57% hanya memiliki buku pengayaan lebih dari 100 dan kurang dari 150 judul buku, dan 4 sekolah sisanya memiliki kurang dari 100 judul buku pengayaan. Sementara itu sudah semua sekolah yang memiliki 20 bahkan lebih judul buku referensi.

c. Jam kerja guru

Indikator tentang jam kerja guru ditetapkan minimal 37,5 jam perminggu. Hasil penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh tabel 4.24 berikut:

Tabel 4.24  
Jam Kerja Guru Per-Minggu

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah Guru	%
Setiap guru bekerja 37,5 jam perminggu	<37,5 jam	0	0,00
	37,5 jam dan lebih	251	100,00
Jumlah		251	100,00

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa dari 251 orang guru yang terdiri dari 169 guru PNS dan 82 guru honorer di setiap sekolah SMP/MTs yang menjadi obyek penelitian yang telah memenuhi jam kerja 37,5 jam per minggu sebanyak 251 orang atau 100%.

d. Proses pembelajaran dan kegiatan tatap muka

Indikator tentang proses pembelajaran pertahun dan kegiatan tatap muka perminggu ditetapkan minimal yakni 34 minggu pertahun untuk proses pembelajaran, dan 27 jam perminggu untuk kegiatan tatap muka. Hasil penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh Tabel 4.25 dan Tabel 4.25 berikut:

Tabel 4.25  
Proses Pembelajaran Per-Minggu

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap sekolah menyelenggarakan proses pembelajaran 34 minggu pertahun	<34 minggu	0	0,00
	34 minggu dan lebih	14	100,00
Jumlah		14	100,00

Tabel 4.26  
Kegiatan Tatap Muka Per-Minggu

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap sekolah menyelenggarakan kegiatan tatap muka kelas VII-IX 27 jam per minggu	<27 minggu	0	0,00
	27 minggu dan lebih	14	100,00
Jumlah		14	100,00

Tabel 4.25 menunjukkan seluruh sekolah yang menjadi sampel penelitian atau 100% telah menyelenggarakan proses pembelajaran 34 minggu pertahun. Demikian juga penyelenggaraan kegiatan tatap muka kelas VII-IX selama 27 jam per minggu telah dilaksanakan oleh setiap sekolah sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 4.26.

e. Penerapan kurikulum KTSP

Indikator menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan harus menerapkan kurikulum KTSP sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh tabel 4.27 berikut:

Tabel 4.27  
Penerapan KTSP Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah SMP/MTs	%
Setiap sekolah menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku	Belum	0	0,00
	Sudah	14	100,00
Jumlah		14	100,00

Tabel 4.27 menunjukkan bahwa setiap sekolah dari 14 sekolah yang menjadi sampel penelitian telah menerapkasn KTSP. Ini juga ditunjukkan prosentase pencapaian indikator ini adalah sebesar 100%.

f. Penerapan RPP

Indikator menetapkan bahwa setiap guru harus menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang dimpunya. Hasil penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh Tabel 4.28 berikut:

Tabel 4.28  
Penerapan RPP

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah Guru	%
Setiap guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	Belum	0	0,00
	Sudah	251	100,00
Jumlah		251	100,00

Tabel 4.28 menunjukkan bahwa Penerapan Rencana Proses Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya oleh setiap guru telah dilakukan oleh semua guru atau sebesar 100%.

g. Pengembangan dan Penerapan Program Penilaian

Indikator menetapkan bahwa setiap guru harus mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Hasil penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh Tabel 4.29 berikut:

Tabel 4.29  
Pengembangan dan Penerapan Program Penilaian

Tuntutan SMP/MTs	SPMP	Hasil Penelitian	Jumlah Guru	%
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		Belum	0	0,00
		Sudah	251	100,00
Jumlah			251	100,00

Tabel 4.29 menunjukkan bahwa sebanyak 251 orang guru atau seluruh guru di SMP/MTs yang menjadi obyek penelitian telah melakukan pengembangan dan penerapan program penilaian untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik atau sebesar 100%.

h. Frekwensi supervisi kepala sekolah

Indikator tentang frekwensi supervisi kepala sekolah terhadap kelas dan memberikan umpan balik kepada guru ditetapkan SPM Pendidikan Dasar untuk jenjang SMP/MTs adalah dua kali dalam setiap semester. Hasil penelitian mengenai indikator ini ditunjukkan oleh Tabel 4.30 berikut ini:

Tabel 4.30  
Frekwensi Supervise Kepala Sekolah

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah Kepsek	%
Setiap kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	Belum	0	0,00
	Sudah	14	100,00
Jumlah		14	100,00

Tabel 4.30 di atas menunjukkan bahwa setiap kepala sekolah sudah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester. Dari tabel diatas diperoleh gambaran prosentase kepala sekolah yang melakukan supervise kelas dari 14 sekolah yang menjadi sampel adalah 100%.

i. Penyampaian laporan hasil evaluasi guru kepada kepala sekolah

Setiap guru harus menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. Hasil penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh Tabel 4.31 berikut:

Tabel 4.31  
Penyampaian laporan hasil evaluasi guru kepada kepala sekolah

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah Guru	%
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	Belum	0	0,00
	Sudah	251	100,00
Jumlah		251	100,00

Tabel 4.31 diatas menunjukkan bahwa indikator penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik oleh guru kepada kepala sekolah pada akhir semester telah dilakukan oleh semua guru dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik atau sebesar 100%.

- j. Penyampaian laporan hasil UAS, UKK, US/UN oleh kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag

Setiap kepala sekolah harus menyampaikan laporan hasil Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Kenaikan Kelas (UKK), Ujian Sekolah (US)/Ujian Nasional (UN) kepada Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama setempat. Hasil penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh tabel 4.32 berikut:

Tabel 4.32  
Penyampaian Laporan Hasil UAS, UKK dan US/UN

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah Kepsek	%
Setiap kepala sekolah menyampaikan laporan hasil UAS dan UKK serta US/UN kepada Diknas/Kantor Kemenag pada setiap akhir semester	Belum	0	0,00
	Sudah	14	100,00
Jumlah		14	100,00

Penyampaian laporan hasil UAS dan UKK serta US/UN kepada Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama pada setiap akhir semester telah dilaksanakan oleh semua kepala sekolah atau 100%.

- k. Penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

Indikator tentang penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) ditetapkan bahwa setiap sekolah telah menerapkan

prinsip-prinsip MBS ini. Hasil penelitian ditunjukkan oleh Tabel 4.33 berikut ini:

**Tabel 4.33**  
**Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

Tuntutan SPMP SMP/MTs	Hasil Penelitian	Jumlah Sekolah	%
Setiap sekolah menerapkan prinsip-prinsip MBS	Belum	0	0,00
	Sudah	14	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.33 menunjukkan bahwa setiap sekolah yang menjadi obyek penelitian telah menerapkan prinsip-prinsip MBS. Dari tabel tersebut diperoleh gambaran prosentase sekolah yang telah menerapkan MBS adalah 100%.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Analisis pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs**

Berdasarkan gambaran pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs baik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh Satuan Pendidikan SMP/MTs teridentifikasi indikator-indikator yang telah tercapai maupun yang belum tercapai, yang telah memenuhi SPM Pendidikan Dasar SMP/MTS sesuai Permendiknas No. 15 Tahun 2010 maupun yang belum.

##### **a. Analisis pencapaian indikator SPM oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan**

Pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTS oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel 4.34 berikut:

Tabel 4.34  
Gambaran Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh  
Pemerintah Kabupaten Nunukan

No.	Indikator SPM Pelayanan pendidikan dasar SMP/MTs oleh kabupaten/kota	Tingkat Pencapaian (%)	Gap (%)
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	90,20	9,80
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	R. 92,43 Kl.92,11 Rt=92,27	R. 7,57 Kl. 7,89 Rt=7,73
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	33,33	66,67
4	Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100	0,00
5	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	100	0,00
6	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	K. 86,28 S. 76,47 Rt=81,38	K. 13,72 S. 23,53 Rt=18,62
7	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	Mtk 35,29 IPA 3,92 B. Ind 27,45 B. Ing 37,25 Rt=25,98	Mtk 64,71 IPA 96,08 B. Ind 72,55 B. Ing 62,75 Rt=74,02
8	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	K. 98,04 S. 100 Rt. 99,02	K. 1,96 S. 0,00 Rt. 0,98
9	Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	K. 85,71 S. 85,71 Rt=85,71	K. 14,29 S. 14,29 Rt=14,29
10	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan	100,00	0,00
11	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100,00	0,00

Ket.: R=Rombel, Kl=Kelas, K=Kualifikasi, S=Sertifikasi, Rt=Rata-Rata

Sumber: Penulis



Tabel 3.34 menunjukkan bahwa indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah tercapai adalah:

- 1) ketersediaan ruang guru dan kepala sekolah di setiap sekolah yang terpisah dan dilengkapi dengan meja dan kursi yang memadai mencapai 100%;
- 2) Ketersediaan seorang guru untuk setiap mata pelajaran di setiap sekolah yang mencapai 100%
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran mencapai 100%
- 4) Frekwensi kunjungan setiap pengawas satu kali setiap bulan dan kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi/pembinaan yang mencapai 100%

Berkaitan dengan indikator “ketersediaan ruang guru dan kepala sekolah di setiap sekolah yang terpisah dan dilengkapi dengan meja dan kursi yang memadai yang mencapai 100%, salah seorang informan dari pengawas SMP/MTs menyatakan:

“Setiap sekolah telah memiliki ruang kepala sekolah dan ruang guru yang terpisah dan dilengkapi meja dan kursi sesuai kebutuhan. Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta menyediakan ruang guru dan ruang kepala sekolah secara terpisah. Hal ini untuk menjaga konsentrasi kerja guru diluar kegiatan mengajar. Soalnya kalau bercampur dengan kepala sekolah terkesan diawasi terus menerus oleh kepala sekolah.

Pernyataan ini dibenarkan oleh salah seorang guru yang menjadi informan yang menyatakan:

“Kalau ruang guru bercampur dengan kepala sekolah, justru kami kurang bisa konsentrasi mengerjakan pekerjaan di luar kegiatan mengajar. Kesannya seolah-olah diawasi terus menerus. Sehingga kami merasa kurang leluasa bekerja.”

Terkait dengan indikator “Ketersediaan seorang guru untuk setiap mata pelajaran di setiap sekolah” yang mencapai 100%, hal ini disebabkan karena kekurangan guru telah terpenuhi dengan adanya rekrutmen tenaga guru honor. Selain itu sebagai pusat kota dan pusat pemerintahan, sekolah-sekolah yang ada di Pulau Nunukan menjadi tolok ukur dari wajah pendidikan di Kabupaten Nunukan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Seksi Pendidikan Dasar SMP/MTs menjelaskan bahwa:

“Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan merupakan pusat kota sekaligus pusat pemerintahan kabupaten. Sehingga ini menjadi tolok ukur bagi wajah pendidikan di Kabupaten Nunukan. Selain itu jumlah sekolah dan peserta didik terbanyak di Pulau Nunukan ini. Oleh karenanya, kami berupaya memenuhi kebutuhan guru dimaksud baik dari guru yang sudah PNS maupun dari guru yang masih berstatus honor. Disamping itu, banyak guru mutasi dari sekolah di kecamatan lain ke Pulau Nunukan, sehingga dapat dikatakan ketersediaan guru di Pulau Nunukan malah berlebihan.”

Berkaitan dengan indikator “Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran”, yang tingkat pencapaiannya juga telah mencapai 100% sesuai target SPM, Kepala Seksi Pendidikan Dasar SMP/MTs, menyatakan bahwa:

“Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan adanya dukungan kebijakan pembentukan tim perencana dan pengembang kurikulum dan proses pembelajaran di Kabupaten Nunukan. Tim inilah yang berfungsi sebagai perencana dan pengembang kurikulum dan proses

pembelajaran. dan melaksanakan tugas menyusun kurikulum dan model-model pembelajaran yang akan diimplementasikan di satuan pendidikan.”

Berkaitan dengan indikator “Frekwensi kunjungan setiap pengawas satu kali setiap bulan dan kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi/pembinaan”, koordinator pengawas SMP/MTs se Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa:

“Keberhasilan pada indikator ini disebabkan karena adanya komitmen para pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan ketaatan pengawas dalam mematuhi peraturan-peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat kenaikan pangkatnya yang salah satunya adalah angka kredit yang diperoleh dari kegiatan pengawasan melalui kunjungan supervisi dan pembinaan. Disamping itu, adanya dukungan anggaran untuk melakukan tugas tersebut.”

Sementara itu dari gambaran pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, teridentifikasi indikator-indikator yang belum tercapai antara lain:

- 1) ketersediaan lembaga sekolah berjarak maksimal 6 km dari pemukiman permanen yang mencapai 90,20%.
- 2) jumlah peserta didik setiap rombongan belajar maksimal 36 orang yang mencapai 92,43%, sedangkan ketersediaan ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta dilengkapi papan tulis mencapai 92,11%.
- 3) ketersediaan ruang laboratorium IPA di setiap sekolah yang dilengkapi dengan peralatan praktik yang memadai untuk

- demonstrasi dan eksperimen peserta didik yang mencapai 33,33%.
- 4) setiap sekolah memiliki guru berkualifikasi S1/D-IV minimal 70% dari jumlah guru yang dimiliki yang mencapai 86,28%, sedang setiap sekolah memiliki guru yang bersertifikasi pendidik minimal separuh dari jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV atau 35% mencapai 76,47%.
  - 5) setiap sekolah minimal memiliki masing-masing satu orang guru yang bersertifikasi guru Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mencapai masing-masing 35,29% guru bersertifikasi pendidik Matematika, 3,92% bersertifikasi pendidik IPA, 27,45% bersertifikasi pendidik Bahasa Indonesia, dan 37,25% bersertifikasi pendidik Bahasa Inggris.
  - 6) setiap kepala sekolah berkualifikasi S1/D-IV mencapai 98,04%.
  - 7) setiap orang pengawas berkualifikasi S1/D-IV dan setiap orang pengawas bersertifikasi sebagai pendidik mencapai 85,71%.

Berkaitan dengan indikator “ketersediaan lembaga sekolah berjarak maksimal 6 km dari pemukiman permanen” yang mencapai 90,20%, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan menyatakan bahwa:

“Ketersediaan sekolah yang masih jauh jaraknya (lebih dari 6km) dari pemukiman permanen penduduk terjadi di wilayah tiga yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan dan Lumbis Ogong. Ini disebabkan secara geografis di ketiga kecamatan ini sulit dijangkau, jarak antara pemukiman yang satu dengan yang lain sangat jauh, jumlah penduduknya di setiap pemukiman ini sangat sedikit. Sehingga kita kesulitan menentukan dimana lokasi sekolah akan dibangun. Tetapi kedepannya secara bertahap minimal setiap kecamatan memiliki 1-2 SMP/MTs”

Dengan demikian masih terdapat kesenjangan sebesar 9,80% dari SPM dimana masih terdapat 5 sekolah yang jaraknya lebih dari 6 km dari pemukiman permanen di daerah terpencil. Berkaitan dengan indikator “jumlah peserta didik setiap rombongan belajar maksimal 36 orang” yang mencapai 92,43% dan “ketersediaan ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta dilengkapi papan tulis” mencapai 92,11%, Kepala Bidang Pendidikan Dasar menyatakan bahwa:

“kelebihan siswa terjadi di SMPN 2 Nunukan. Jumlah siswa di sekolah ini 1.082 siswa, sedang kelas yang tersedia 12 kelas dengan jumlah rombel 24. Itu artinya setiap rombel berisi 45 siswa. Sementara secara keseluruhan jumlah kelas 292 ruang yang dilengkapi sarana belajar untuk siswa dan guru, sedang jumlah rombongan belajar sebanyak 317. Itu artinya ada 25 rombongan belajar yang tidak memiliki kelas permanen. Untuk meniasati kondisi ini maka sekolah yang kelebihan rombongan belajar melakukan 2 shift kegiatan belajar yaitu masuk pagi dan siang.”

Lebih lanjut Kepala Seksi Pendidikan Dasar SMP/MTs menambahkan:

“sebenarnya dengan jumlah kelas 292 dan jumlah siswa 9.347 orang, secara matematis rata-rata jumlah siswa per rombongan belajar adalah 32 orang. Artinya, jika terjadi pemerataan maka indikator jumlah siswa per rombongan belajar sudah tercapai. Akan tetapi, ada sekolah yang berlebihan siswanya dan disisi lain ada yang kekurangan siswa. Ini disebabkan karena minat orangtua siswa yang selalu ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang tidak bisa diterima oleh SMPN 1 Nunukan. Padahal masih ada SMPN 3 Nunukan. tetapi mereka beralasan jarak yang cukup jauh dari rumah mereka. Kami sampaikan alternatif lain yaitu beberapa SMP/MTs swasta di Kecamatan Nunukan. tetap saja mereka tidak berminat dengan alasan kualitas sekolahnya yang menurut mereka masih rendah.”

Uraian diatas menunjukkan rata-rata pencapaian dari indikator “jumlah peserta didik setiap rombongan belajar maksimal 36 orang dan “ketersediaan ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta dilengkapi papan tulis” adalah 92,27%. Meskipun capaian dari indikator ini cukup besar tetapi belum bisa dikatakan berhasil dicapai. Mengingat masih ada kesenjangan sebesar 7,73% dari SPM atau masih terdapat 24 rombongan belajar yang terdiri dari 40 orang siswa bahkan lebih serta 25 rombongan belajar yang tidak memiliki kelas permanen.

Berkaitan dengan indikator “ketersediaan ruang laboratorium IPA di setiap sekolah yang dilengkapi dengan peralatan praktik yang memadai untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik” yang hanya mencapai 33,33%, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan menyatakan:

“Sekolah yang punya ruang laboratorium IPA yang lengkap dengan alat praktik baru 17 sekolah dari 51 sekolah. 12 sekolah sudah ada ruang laboratorium tapi belum lengkap. Sisanya 22 sekolah belum memiliki. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Tetapi kami sudah merencanakan secara bertahap. Selain itu ada beberapa sekolah baru yang sedang dibangun. Ini karena ada beberapa kecamatan pemekaran yang harus disediakan sekolah SMP/MTs. Disamping itu, untuk sekolah swasta tentu saja berkaitan dengan kemampuan keuangan yayasan dan instansi pembinaanya seperti Kementerian Agama.”

Menanggapi hal ini, salah satu informan Kepala Sekolah swasta menegaskan:

“Untuk menyediakan ruang laboratorium IPA yang lengkap di sekolah swasta seperti kami, memang membutuhkan biaya

yang tidak sedikit. Kami masih menunggu kecukupan dana bantuan dari yayasan atau kementerian yang menjadi pembina sekolah kami. Selain itu kami menunggu partisipasi baik dari orang tua siswa maupun pihak lain.”

Hasil penelitian terhadap indikator “ketersediaan ruang laboratorium IPA di setiap sekolah yang dilengkapi dengan peralatan praktik yang memadai untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik” dan penjelasan informan diatas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan sebesar 66,67% dari SPM, dimana 12 sekolah meski telah memiliki ruang laboratorium IPA tetapi belum dilengkapi peralatan praktik yang lengkap. Bahkan 22 sekolah lainnya sama sekali belum memiliki ruang laboratorium dan peralatan praktik.

Berkaitan dengan indikator “setiap sekolah memiliki guru berkualifikasi S1/D-IV minimal 70% dari jumlah guru yang dimiliki” yang mencapai 86,28%, sedang “setiap sekolah memiliki guru yang bersertifikasi pendidik minimal separuh dari jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV atau 35%” yang mencapai 76,47%, Kepala Seksi Pendidikan Dasar SMP/MTs menyatakan:

“Sebenarnya dalam proses rekrutmen baik guru PNS maupun honor disyaratkan yang berkualifikasi S1/D-IV. Bahkan sudah mulai mengharuskan berasal dari disiplin ilmu yang linier dengan mata pelajaran yang akan diampunya. Namun, karena keterbatasan SDM dengan kualifikasi dan sertifikasi tersebut, dan untuk menghindari kekosongan dan mengganggu proses belajar, sebagian guru PNS direkrut dari lulusan S1/D-IV dari non kependidikan. Sedangkan di beberapa sekolah swasta ada yang direkrut dari lulusan D-III. Tapi kedepannya, semua guru berasal dari lulusan kependidikan, dan memiliki sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan.”

Hasil penelitian terhadap indikator “setiap sekolah memiliki guru berkualifikasi S1/D-IV minimal 70% dari jumlah guru yang dimiliki dan minimal separuh dari jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV atau 35% bersertifikasi pendidik” tersebut, dapat dipahami bahwa rata-rata capaian indikator ketersediaan guru yang berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi pendidik sebesar 81,38%. Artinya masih terdapat kesenjangan 18,62% dari SPM.

Rata-rata pencapaian sebesar 25,98% terdapat pada indikator “setiap sekolah minimal memiliki masing-masing satu orang guru yang bersertifikasi guru Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris”. Pencapaian dari masing-masing guru bersertifikasi yaitu 35,29% untuk guru bersertifikasi pendidik Matematika, 3,92% untuk guru bersertifikasi pendidik IPA, 27,45% untuk guru bersertifikasi pendidik Bahasa Indonesia, dan 37,25% untuk guru bersertifikasi pendidik Bahasa Inggris. Dengan demikian kesenjangan pencapaian indikator ini masih cukup besar yakni 74,02% dari SPM.

Berkaitan dengan indikator “Setiap kepala sekolah SMP/MTs telah memiliki kualifikasi S1/D-IV dan sertifikasi sebagai pendidik” yang rata-rata pencapaiannya adalah 99,03% dimana capaian ini sudah cukup berhasil. Bahkan tingkat pencapaian indikator kepala sekolah yang memiliki sertifikasi sebagai pendidik mencapai 100%. Sedangkan tingkat pencapaian indikator kepala sekolah berkualifikasi S1/D-IV mencapai 98,04%. Namun masih ada kesenjangan 0,97% dari SPM. Dengan demikian indikator ini dapat dikatakan belum tercapai.



Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan:

“Kebijakan pengangkatan kepala sekolah adalah direkrut dari guru senior. Dengan demikian, dapat dipastikan kalau mereka sudah bersertifikasi dan berpengalaman sebagai pendidik meskipun ada yang kualifikasi pendidikannya masih D-III.”

Sebenarnya indikator tersebut sudah cukup berhasil dan memenuhi SPM. Keberadaan satu orang kepala sekolah yang masih berkualifikasi dibawah S1/D-IV, penempatannya pada sekolah yang berada di kecamatan pedalaman dimana di sekolah tersebut belum ada guru baik senior maupun junior yang berkualifikasi S1/D-IV. Selain itu pengangkatan kepala sekolah masih dipengaruhi oleh faktor politis. Ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang menyatakan:

“Pengangkatan kepala sekolah merupakan kewenangan Bupati. Di sekolah yang berada di wilayah kecamatan pedalaman masih sulit dicari yang berkualifikasi S1/D-IV. Kalaupun pernah ada penempatan guru yang berkualifikasi S1/D-IV disana, ternyata mereka diluluskan untuk mutasi ke kota. Masalah mutasi guru inilah yang seringkali dipengaruhi faktor politis dan ketidakkonsistenan dalam penempatan guru.”

Berkaitan dengan indikator “setiap orang pengawas berkualifikasi S1/D-IV dan setiap orang pengawas bersertifikasi sebagai pendidik” yang mencapai 85,71%, Kepala Dinas Pendidikan juga menyatakan hal yang sama seperti tentang pengangkatan kepala sekolah. Yaitu adanya faktor politis dan ketidakkonsistenan dalam pengangkatan pengawas sekolah. Untuk indikator ini terjadi kesenjangan sebesar 14,29% dari SPM sehingga indikator ini dapat dikatakan belum tercapai.

Kenyataannya meskipun jumlah kelas mencukupi untuk peserta didik, akan tetapi berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) Kabupaten Nunukan, Angka Partisipasi Murni (APM) baru mencapai 56,80% yang berarti bahwa sebanyak 43-44 anak dari 100 anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah di SMP/MTs. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) baru mencapai 73,56%. Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang menyebutkan bahwa tidak semua anak lulus dari jenjang SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Data angka putus lanjut dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir (2013-2015) jumlah lulusan SD/MI usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs masing-masing 100 dari 3172 anak pada tahun 2013 (3,2%), 189 dari 3372 anak pada tahun 2014 (5,6%), dan 244 dari 3519 anak pada tahun 2015 (6,9%). Data tersebut semakin tegas menunjukkan belum tercapainya pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun untuk anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs meskipun secara kuantitas jumlah ruang kelas mencukupi. Itu berarti pencapaian indikator ketersediaan ruang kelas belum menjamin pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar bagi anak usia 13-15 tahun. Namun demikian jika seluruh anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs maka akan terdapat kekurangan kelas yang cukup signifikan.

Terkait dengan SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs itu sendiri, sebagian besar masyarakat belum memahami sepenuhnya sebenarnya

apa hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak yang semestinya didapatkan dalam pelayanan pendidikan. Disisi lain, aparatur pelaksana pada Dinas Pendidikan di daerah sendiri belum memahami sepenuhnya apa yang harus dilakukan dalam memenuhi pencapaian indikator SPM. Dengan demikian secara kelembagaan ada kesenjangan persepsi antara harapan SPM dengan persepsi aparatur Dinas Pendidikan di daerah tentang SPM. Oleh karenanya perlu adanya peningkatan pemahaman aparatur Dinas Pendidikan baik aparatur pengambil keputusan maupun pelaksana keputusan. Sehingga program-program dan kegiatan benar-benar diprioritaskan pada pemenuhan indikator SPM Pendidikan Dasar.

b. Analisis pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTS oleh Satuan Pendidikan dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel 4.35 berikut:

Tabel 4.35  
Gambaran Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs  
oleh Satuan Pendidikan

Indikator SPM Pelayanan Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan		Tingkat Pencapaian (%)	Gap (%)
1	Setiap SMP/MTs tersedia buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	0,00	100,00
2	Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	P. 0,00 R. 100,00 Rt=50,00	P. 100,00 R. 0,00 Rt=50,00
3	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk membuat rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	100,00	0
4	Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka Kelas VII – IX : 27 jam per minggu.	Pr. 100,00 T. 100,00 Rt=100,00	Pr. 0,00 T. 0,00 Rt=0,00
5	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.	100,00	0,00
6	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk masing-masing mata pelajaran yang diampunya.	100,00	0,00
7	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa.	100,00	0,00
8	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	100,00	0,00
9	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.	100,00	0,00
10	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester.	100,00	0,00
11	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	100,00	0,00

Ket.: P=Buku Pengayaan, R=Buku Referensi, Pr=Proses Pembelajaran, T=Tatap Muka, Rt=Rata-Rata (Sumber: Penulis)

Gambaran pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan sebagaimana tabel 4.35 diatas dari hasil penelitian di 14 (empat belas) sekolah yang menjadi sampel

penelitian teridentifikasi indikator-indikator yang telah tercapai, yaitu:

- 1) Jam kerja setiap guru di setiap sekolah 37,5 jam per minggu yang mencapai 100%;
- 2) Proses pembelajaran di setiap sekolah 34 minggu per tahun dan kegiatan tatap muka 27 jam per minggu di setiap sekolah yang mencapai 100%;
- 3) Setiap sekolah menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku yang mencapai 100%;
- 4) Setiap guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya yang mencapai 100%;
- 5) Setiap guru melakukan pengembangan dan penerapan program penilaian mencapai 100%;
- 6) Frekwensi kepala sekolah melakukan supervisi ke kelas-kelas 2 kali per semester mencapai 100%;
- 7) Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi belajar peserta didik setiap akhir semester kepada kepala sekolah mencapai 100%;
- 8) Setiap kepala sekolah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK, US/UN kepada Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama mencapai 100%; dan
- 9) Setiap sekolah menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) telah mencapai 100%.

Menanggapi keberhasilan pencapaian indikator tentang jam kerja guru 37,5 jam perminggu, para kepala sekolah menjelaskan sebagai berikut:

“Proses belajar mengajar telah ditetapkan 6 hari seminggu, yaitu Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai pukul 7.15 sampai dengan 13.30. bagi guru yang tidak taat pada jam kerja tersebut harus terima konsekwensi baik berupa pemotongan TPP maupun tidak terima tunjangan sertifikasi. Jadi reward dan punishment inilah yang menjadi salah satu pendorong kedisiplinan kerja guru.”

Mengenai proses pembelajaran 34 minggu pertahun dan kegiatan tatap muka 27 jam perminggu di setiap sekolah, para kepala sekolah dan guru menyatakan bahwa hal ini sudah menjadi komitmen dan diatur dalam ketentuan tentang proses belajar mengajar. Oleh karenanya setiap sekolah telah melaksanakan standar tersebut.

Sedangkan tentang indikator “setiap sekolah menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku” yang mencapai 100%, para kepala sekolah yang menjadi sumber informasi menyatakan:

“Proses belajar mengajar telah ditetapkan 6 hari seminggu, yaitu Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai pukul 7.15 sampai dengan 13.30. bagi guru yang tidak taat pada jam kerja tersebut harus terima konsekwensi baik berupa pemotongan TPP maupun tidak terima tunjangan sertifikasi. Jadi *reward* dan *punishment* inilah yang menjadi salah satu pendorong kedisiplinan kerja guru. Selain itu juga disiplin guru berpengaruh terhadap PKG (Penilaian Kinerja Guru) yang berdampak pada SKP (Sasaran Kerja Pegawai) sebagai syarat untuk kenaikan pangkatnya.”

Mengenai indikator “setiap guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya” yang mencapai 100% dan “setiap guru melakukan pengembangan dan penerapan program penilaian” yang mencapai 100%, salah seorang guru yang menjadi sumber informasi menyatakan:

“Setiap guru memang diharuskan menyusun rencana proses pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampu dan selanjutnya untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. Demikian juga tentang kewajiban melakukan pengembangan dan penerapan program penilaian. Kepala sekolah selalu mengingatkan tentang hal ini, sehingga kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin dan budaya kerja bagi guru.”

Sedangkan untuk indikator “frekwensi kunjungan kepala sekolah melakukan supervisi ke kelas-kelas 2 kali per semester” yang mencapai 100%, koordinator pengawas SMP/MTs menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap kepala sekolah sudah melakukan kunjungan ke kelas-kelas saat belajar mengajar berlangsung. Meskipun minimal 2 kali setiap semester harus dilakukan, tetapi sebagian besar melakukan kunjungan kelas lebih dari 2 kali dalam setiap semester. Hal ini dilakukan untuk memonitoring apakah proses belajar benar-benar dilaksanakan oleh guru dan sesuai dengan RPP dan jadwal tematik setiap pertemuan tatap muka atau tidak.”

Selanjutnya mengenai indikator “setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi belajar peserta didik setiap akhir semester kepada kepala sekolah” yang mencapai mencapai 100%, para kepala sekolah menyatakan:

“Penyampaian laporan hasil evaluasi peserta didik adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh setiap guru di setiap akhir semester. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan prestasi siswa. Sehingga menjadi bahan evaluasi bagi setiap guru dalam mengembangkan pola atau model pembelajarannya.”

Indikator “setiap kepala sekolah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK, US/UN kepada Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama” yang mencapai 100%, semua kepala sekolah

menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap usai UAS, UKK, US dan UN.

Sementara itu indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan yang belum tercapai antara lain adalah:

- 1) Tiap-tiap SMP/MTs yang telah menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik mencapai 0%.
- 2) Setiap SMP/MTs yang telah memiliki 200 judul buku pengayaan mencapai 0% dan buku referensi mencapai 100% sehingga rata-rata pencapaian indikator ini sebesar 50%.

Berkaitan dengan pencapaian indikator “setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik” dan indikator “Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan” yang mencapai 0%, beberapa kepala sekolah mengungkapkan bahwa:

“Pemenuhan kebutuhan tentang buku teks dan buku pengayaan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan yang dalam hal ini menjadi tupoksi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Sekolah sudah melaporkan jumlah siswa dan jumlah buku teks dan buku pengayaan yang tersedia. Jadi tinggal menunggu pengadaan dan distribusi buku teks dan buku pengayaan dari Dinas Pendidikan saja”

Sementara itu, salah seorang informan kepala sekolah menyatakan:

“Sebenarnya kebutuhan buku teks tahun lalu sudah bisa terpenuhi. Akan tetapi muncul terjadinya kasus korupsi



dalam pengadaan buku, dimana jumlah buku yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pengadaannya. Oknum pelakunya juga sudah divonis dan menjalani hukuman.”

Menanggapi keberhasilan pencapaian indikator “ketersediaan buku referensi minimal 20 judul buku setiap sekolah”, salah seorang kepala sekolah yang menjadi sumber informasi menyatakan:

“Untuk penyediaan buku referensi di setiap sekolah di target hanya 20 judul buku, sehingga kebutuhan anggaran untuk pengadaan buku tersebut tidak terlalu banyak. Itulah kenapa setiap sekolah telah memenuhi target dari ketersediaan buku referensi ini. Tidak seperti buku teks dan buku pengayaan yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.”

Namun demikian, meski buku referensi telah tersedia dan mencapai 100% tetapi ketersediaan buku pengayaan masih 0%. Artinya rata-rata pencapaian indikator ini sebesar 50% atau masih ada kesenjangan sebesar 50% dari SPM untuk penyediaan buku pengayaan dan buku referensi.

## 2. Analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pencapaian indikator SPM/MTs, teridentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs baik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun Satuan Pendidikan.

### a. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor pendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan antara lain:
- a) Ada ketersediaan ruangan untuk guru dan kepala sekolah
  - b) Ada kebijakan rekrutmen tenaga guru honor untuk memenuhi kebutuhan guru
  - c) Ada standar dan kebijakan internal yang mengatur frekwensi kunjungan pengawas ke sekolah-sekolah dan dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut

Standar dan kebijakan internal Dinas Pendidikan yang mengharuskan pengawas melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah secara reguler untuk memonitor perkembangan proses belajar dan kinerja guru dan non guru menjadi faktor pendukung kinerja pengawas. Kebijakan ini juga didukung dengan ketersediaan anggaran untuk membiayai kunjungan para pengawas. Hal ini sesuai dengan penjelasan koordinator pengawas sebagai berikut:

“Kami sudah diinstruksikan untuk melakukan kunjungan secara reguler ke sekolah-sekolah. Untuk itu pihak Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk biaya kunjungan tersebut.”

- d) Ada standar dan kebijakan internal yang mengatur tentang penyusunan perencanaan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran dan petunjuk pelaksanaannya

Berkaitan dengan faktor pendukung ini, Sekretaris Dinas Pendidikan mengungkapkan, bahwa di Pemerintah Kabupate Nunukan melalui Dinas Pendidikan telah membentuk

tim penyusun dan perencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran serta petunjuk pelaksanaannya melalui Keputusan Bupati.

2) Faktor-faktor penghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan antara lain:

a) Kondisi geografis dan demografis

Kabupaten Nunukan memiliki wilayah yang terpisah yaitu di 3 pulau (Pulau Kalimantan, Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik) dimana kecamatan-kecamatan di wilayah Pulau Kalimantan seperti Krayan, Krayan Selatan, dan Lumbis Ogong sangat sulit dijangkau. Selain itu letak pemukiman-pemukiman di ketiga kecamatan ini sangat jauh antara satu pemukiman dan pemukiman yang lain. Selain kondisi geografis, juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang masih sangat sedikit yang dimiliki oleh pemukiman-pemukiman tersebut. Ini menyulitkan dalam menentukan dimana lokasi sekolah akan disediakan. Kondisi inilah yang menghambat penyediaan satuan pendidikan yang terjangkau jaraknya dari pemukiman permanen dengan berjalan kaki.

b) Partisipasi masyarakat yang rendah dalam penataan jumlah ideal rombongan belajar di setiap sekolah

Partisipasi masyarakat rendah, khususnya di wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik, dimana penduduknya cukup padat, berpengaruh

terhadap penataan jumlah ideal rombongan belajar. Sebagian besar orang tua menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri yang jaraknya dekat dengan rumah mereka. Meski ada sekolah SMP/MTs swasta yang dekat mereka lebih memilih ke sekolah negeri yang terdekat. Akibatnya terdapat sekolah negeri yang berlebihan jumlah siswanya dibanding dengan jumlah kelas yang tersedia. Disisi lain terdapat sekolah swasta yang jumlah siswanya justru lebih sedikit dari jumlah kelasnya.

- c) Ada *miss*-persepsi masyarakat tentang sekolah negeri dan swasta

Berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat diatas, ternyata pencapaian indikator SPM oleh Kabupaten Nunukan juga dipengaruhi oleh *miss*-persepsi oleh sebagian orang tua siswa. Mereka menganggap sekolah swasta mempunyai mutu yang kurang dibanding sekolah negeri. Inilah juga yang menyebabkan sekolah negeri berlebihan siswanya dan sekolah swasta berkekurangan siswa. Kondisi ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat bahwa mutu pendidikan bukan disebabkan oleh status sekolahnya tetapi input yang tersedia dan proses pelayanan pendidikan itu sendiri.

- d) Ada kesenjangan sarana dan prasaran antar sekolah

Pencapaian indikator SPM oleh Kabupaten Nunukan juga terhambat oleh faktor kesenjangan sarana dan prasarana

yang dimiliki antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Terlebih antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Inilah salah satu yang memicu kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah yang berakibat pada miss-persepsi masyarakat tentang mutu sekolah.

- e) Ada keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah

Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah juga menjadi hambatan tersendiri dalam pencapaian indikator SPM. Terlebih bagi sekolah swasta yang bergantung pada bantuan yayasan atau partisipasi orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Sehingga sekolah swasta kesulitan dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai.

- f) Kebutuhan SDM guru yang sesuai kualifikasi dan sertifikasi belum terpenuhi

Meskipun secara kuantitas kebutuhan guru untuk setiap mata pelajaran terpenuhi, akan tetapi sebagian guru yang tersedia belum berkualifikasi S1/D-IV. Bahkan jumlahnya makin menyusut jika dituntut harus bersertifikasi sebagai pendidik karena sebagian guru bukan bersertifikasi sebagai pendidik, dan semakin sedikit lagi SDM guru yang bersertifikasi pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA,

Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Belum terpenuhinya kebutuhan guru yang berkualifikasi dan bersertifikasi pendidik sesuai mata pelajaran tersebut berdampak pada mutu pelayanan pendidikan yang diberikan sekolah.

g) Penempatan guru di setiap sekolah belum merata

Penempatan SDM guru yang belum merata merupakan salah satu faktor penghambat pencapaian indikator SPM. Hal ini disebabkan adanya ketidakkonsistenan para pengambil keputusan yang berwenang dalam penempatan guru. Hal ini ditunjukkan oleh bertumpuknya jumlah guru di sekolah-sekolah di Pulau Nunukan dan Sebatik. Sementara di sekolah-sekolah lain di luar kedua Pulau ini masih kurang. Kondisi ini salah satu yang menyebabkan kesenjangan mutu pelayanan pendidikan antar sekolah di kota dan di desa/pedalaman.

h) Ada pengaruh politis dalam penempatan guru dan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas

Dalam hal penempatan guru dan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas masih dipengaruhi oleh nuansa politis. Sehingga banyak guru yang seharusnya bertugas di wilayah kecamatan di luar Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik, berpindah tugas ke Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Demikian juga dengan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas. Terdapat pengawas dan kepala sekolah yang belum berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi pendidik diangkat sebagai kepala sekolah

dan pengawas dikarenakan unsur politis. Ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penataan dan penempatan guru dan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas. Kondisi ini berakibat pada kesenjangan jumlah guru di sekolah-sekolah yang ada di Pulau Nunukan dan Sebatik dengan yang ada di luar kedua pulau tersebut. Terjadi pula kesenjangan personal antara guru senior yang merasa dirinya sudah layak dan memenuhi syarat menjadi kepala sekolah atau pengawas dengan kepala sekolah dan pengawas yang sudah diangkat.

Berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah, sebenarnya selain dipengaruhi faktor politis juga dipengaruhi faktor geografis dan faktor sosial budaya. Hal ini dijelaskan oleh informan pengawas sebagai berikut:

“Ada 1 sekolah yang kepala sekolahnya belum berkualifikasi S1/D-IV. Tetapi letaknya di pedalaman. Sebagian besar guru yang pernah disana mengajukan mutasi ke kecamatan lain terutama ke Pulau Nunukan karena disini lebih ramai. Bahkan mereka menolak untuk menjadi kepala sekolah. Selain itu, adanya permintaan masyarakat setempat agar kepala sekolahnya diangkat dari orang yang berasal dari daerah tersebut.”

Dengan demikian faktor politis, geografis dan sosial budaya menjadi penghambat dalam pencapaian indikator “setiap kepala sekolah harus berkualifikasi S1/D-IV”. Namun demikian jika dilihat dari rata-rata pencapaian, sebenarnya indikator ini sudah cukup berhasil yakni 99,02%. Karena hanya satu sekolah yang kepala sekolahnya belum berkualifikasi

## S1/D-IV.

**b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan****1) Faktor-faktor pendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan antara lain:**

- a) Pembagian tugas mengajar baik guru PNS maupun guru honor oleh Dinas Pendidikan sesuai kebutuhan mata pelajaran yang diajarkan di setiap sekolah
- b) Ada partisipasi guru dalam memenuhi kebutuhan buku referensi yang dibutuhkan untuk mata pelajaran yang diampunya di setiap sekolah
- c) Ada standar dan kebijakan yang mengatur tentang jam kerja guru dan sanksi yang tegas melalui pemotongan tunjangan dan sertifikasi, penundaan kenaikan pangkat bagi yang memiliki hasil PKG dan penilaian SKP yang tidak memenuhi syarat
- d) Konsistensi dan ketaatan sekolah dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kegiatan tatap muka, penerapan KTSP, penerapan RPP, dan pengembangan dan penerapan program penilaian sesuai standar yang ditetapkan
- e) Ketaatan dan konsistensi kepala sekolah dalam melakukan supervisi kelas sesuai standar yang ditetapkan
- f) Ketaatan guru dan kepala sekolah sekolah dalam menyampaikan laporan hasil evaluasi belajar siswa setiap semester, hasil UAS, UKK, US/UN



- g) Ketaatan dan konsistensi sekolah dalam melaksanakan MBS
- 2) Faktor-faktor penghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan antara lain:
- a) Keterbatasan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk memenuhi kelengkapan buku teks yang memadai untuk peserta didik; dan
  - b) Keterbatasan anggaran satuan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan buku pengayaan yang memadai di sekolahnya masing-masing.

Berdasarkan uraian tentang faktor pendukung dan penghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs baik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh Satuan Pendidikan diatas dapat dianalisis dan dipetakan dengan menggunakan metode analisis SWOT untuk memperoleh gambaran faktor-faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ditunjukkan oleh table 4.36 berikut:



Tabel 4.36  
Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)		Weaknesses (Kelemahan)	
1.	Jumlah kelas SMP/MTs yang cukup memadai untuk jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs (13-15 tahun)	1.	Kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya di wilayah pedalaman
2.	Jumlah SDM PTK yang cukup memadai	2.	Kurangnya SDM PTK yang berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi pendidik
3.	Komitmen dan ketaatan PTK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	3.	Kurangnya SDM tenaga guru yang bersertifikasi pendidik untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
4.	Adanya kebijakan dan standar internal yang mengatur tentang jam kerja guru, kunjungan pengawas, dan supervise kelas oleh kepala sekolah	4.	Belum meratanya penempatan SDM guru yang bersertifikasi pendidik untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang ada
5.	Adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan kunjungan pengawas ke sekolah-sekolah	5.	Belum memadainya alokasi anggaran untuk penyediaan ruang laboratorium, peralatan praktik IPA, pengadaan buku teks dan buku pengayaan
6.	Komitmen dan ketaatan satuan pendidikan dalam melaksanakan MBS	6.	Kurangnya sosialisasi tentang SPM kepada masyarakat oleh Dinas Pendidikan
		7.	Rendahnya komitmen pejabat pengambil keputusan dalam penempatan tenaga guru
Opportunities (Kesempatan)		Treaths (Ancaman)	
1.	Adanya kebijakan tentang otonomi daerah	1.	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan
2.	Adanya kebijakan anggaran pendidikan 20% dari APBD/APBN	2.	Kemungkinan perubahan regulasi tentang standar penyelenggaraan pendidikan dasar
3.	Adanya kebijakan tentang Wajib Belajar 9 Tahun	3.	Kemungkinan perubahan kebijakan di bidang pendidikan akibat pergantian kepala daerah
4.	Adanya kebijakan tentang SPM Pendidikan Dasar		
5.	Adanya kebijakan tentang sanksi bagi guru, kepala sekolah dan pengawas yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku		
6.	Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan		
7.	Adanya kebijakan percepatan pembangunan di daerah 3 T dimana Nunukan termasuk sebagai daerah 3T		

3. Implikasi *gap* (kesenjangan) terhadap upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat dalam pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs baik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh satuan pendidikan SMP/MTs yang menjadi sampel penelitian, menyebabkan terjadinya kesenjangan antara target pelayanan pendidikan yang diharapkan dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan.

Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Umaedi (2000) yang dikutip oleh Sri Sumarni dalam tesisnya (2010) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata adalah kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekwen. Pendekatan ini melihat bahwa sekolah berfungsi sebagai pusat produksi SDM yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka sekolah akan menghasilkan output SDM yang dikehendaki.

Sri Sumarni sendiri dalam tesisnya (2010) menambahkan bahwa mutu pendidikan yang tidak mengalami peningkatan secara merata juga disebabkan karena penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara birokratik-sentralistik. Dikaitkan dengan hasil penelitian ini, memang nampak bahwa pihak sekolah masih sangat bergantung dengan keputusan birokratis dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta pasokan sumber daya

manusia tenaga pendidik sebagai input pelayanan pendidikan. Artinya posisi sekolah hanya menunggu “kebaikan hati” pemerintah.

Kesenjangan input yang dimiliki oleh sekolah swasta dibanding sekolah negeri juga mempengaruhi citra sekolahnya. Inilah yang menyebabkan sekolah swasta kekurangan siswa dibanding sekolah negeri. Masyarakat menganggap sekolah swasta memiliki mutu yang rendah dibanding sekolah negeri dilihat dari sarana dan prasarananya. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Steve Macaulay dan Sarah Cook (1997) yang dikutip oleh Marhany VP. Pua dalam tesisnya (2010:24) yang menyatakan bahwa pelayanan merupakan citra organisasi yang diantaranya tercermin dari kualitas produk dan layanan yang dihasilkan dan cara karyawan memberikan pelayanan. Cara karyawan dalam memberikan pelayanan tentu saja dipengaruhi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan.

Kesenjangan antara pencapaian indikator SPM dengan target SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan, menunjukkan terjadinya kesenjangan (*gap*) kualitas pelayanan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh Satuan Pendidikan SMP/MTs dimana dalam kenyataannya pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. *Gap* kualitas pelayanan terjadi akibat dari akumulasi dari *gap* persepsi manajemen, *gap* persepsi kualitas, *gap* kinerja pelayanan, dan *gap* komunikasi pasar sebagaimana model kualitas pelayanan yang diformulasikan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990).

*Gap* persepsi manajemen ditunjukkan oleh adanya perbedaan antara harapan-harapan indikator SPM dengan persepsi manajemen terhadap harapan-harapan indikator tersebut. Pemerintah daerah sebagai pihak pelaksana SPM mempersepsi pelayanan minimal yang diberikan kepada masyarakat merupakan kondisi “minimal” dari sudut pandangnya. Padahal seharusnya istilah “minimal” dari sudut pandang SPM mengandung arti “optimal” bagi pemerintah daerah. Ini disebabkan tidak dimanfaatkannya/diakomodirnya indikator SPM serta terlalu banyak tingkatan manajemen birokrasi dalam pengambilan keputusan. *Gap* persepsi kualitas ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara persepsi manajemen tentang harapan-harapan indikator SPM dengan spesifikasi kualitas pelayanan yang dirumuskan. Penyebab terjadinya *gap* ini adalah lemahnya komitmen birokrasi daerah terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. *Gap* kinerja pelayanan ditunjukkan oleh perbedaan antara pelaksanaan pelayanan dengan spesifikasi kualitas pelayanan yang telah dirumuskan dalam SPM. Salah satu penyebab kesenjangan ini adalah kurang tepatnya program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan tuntutan indikator SPM. *Gap* komunikasi pasar ditunjukkan dengan adanya perbedaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan komunikasi eksternal terhadap masyarakat dan satuan pendidikan. Penyebab kesenjangan ini antara lain adalah adanya kecenderungan untuk mengobral janji. Misalnya, alokasi anggaran bidang pendidikan 20% dari APBD akan sanggup memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan dasar. Padahal angka 20% dari jumlah APBD ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan input

bagi pelayanan pendidikan. Semisal kebutuhan input untuk pelayanan pendidikan sebesar 300 miliar, sedang APBD sebesar 1 triliun, ini berarti alokasi anggaran untuk pendidikan 200 miliar. Artinya alokasi anggaran 20% dari APBD belum mencukupi kebutuhan pelayanan pendidikan.

Kesenjangan-kesenjangan yang terjadi diatas menjadi penghambat dalam upaya pemerataan akses pelayanan pendidikan antar wilayah kecamatan, antar sekolah, dan antar sekolah negeri dan swasta. Sehingga berakibat pada ketidakseimbangan kualitas pendidikan antar sekolah antar kecamatan, antar sekolah negeri dengan sekolah negeri lainnya, dan antar sekolah negeri dengan sekolah swasta. Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Dinas Pendidikan menyatakan:

“Beberapa tahun terakhir, setiap pengumuman UN diumumkan, prestasi nilai UN terbaik selalu diraih oleh pelajar dari Pulau Nunukan, disusul Sebatik. Selain itu didominasi oleh sekolah negeri. Memang masih ada kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah kecamatan bahkan antar sekolah negeri dan swasta.”

Selain itu, dampak kesenjangan dapat terlihat dari status akreditasi sekolah ditetapkan secara nasional. Dari 51 SMP/MTs yang ada, 6 sekolah terakreditasi A, 12 sekolah terakreditasi B, 11 sekolah terakreditasi C dan sisanya 22 sekolah belum terakreditasi. Tentang hal ini Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nunukan, menjelaskan:

“sekolah yang terakreditasi A telah memenuhi standar sarana dan prasarana yang ditetapkan yakni 120 sampai dengan 136 item, sementara yang terakreditasi B hanya memenuhi 100 sampai dengan kurang dari 120 item, sedangkan yang terakreditasi C hanya memenuhi 80 sampai dengan 100 item persyaratan akreditasi. Kurang dari itu tidak terakreditasi.”

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa masih banyak sekolah SMP/MTs yang belum memenuhi standar akreditasi yang

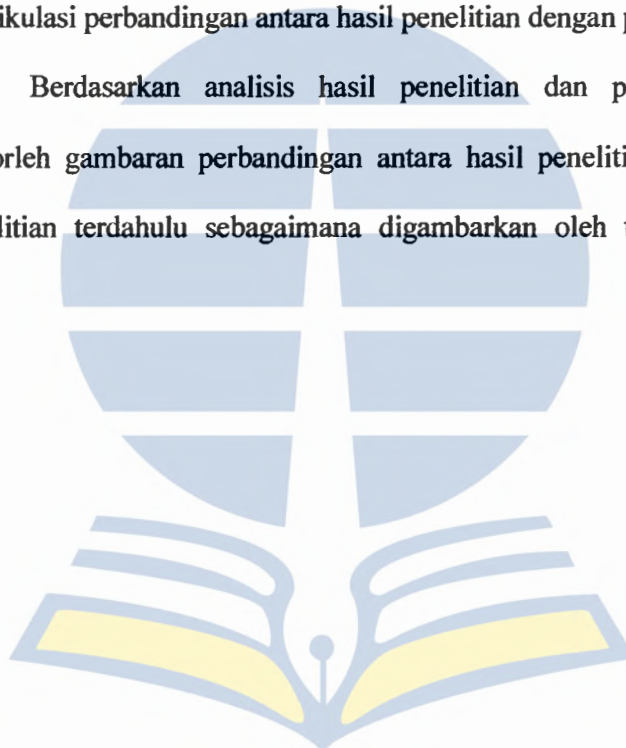
dipersyaratkan. Selain itu menunjukkan kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah. Padahal aspek input dalam pelayanan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan mutu.

Disisi lain, capaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs belum dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar SMP/MTs bagi anak usia 13-15 tahun. Ketersediaan sekolah SMP/MTs di ibu kota kecamatan di daerah pedalaman misalnya, meski jumlah kelas berbanding lurus dengan jumlah anak usia 13-15 tahun di daerah tersebut, akan tetapi jumlah anak yang tidak bersekolah di SMP/MTs cukup banyak yakni 43-44 orang anak dalam 100 orang anak. Jumlah anak yang tidak bersekolah tersebut terdiri dari putus sekolah dan putus lanjut. Penyebab kondisi ini adalah jarak geografis yang cukup jauh antara pemukiman anak-anak usia 13-15 tahun berasal dengan letak sekolah. Inilah mengapa meski sudah tersedia sekolah dengan jumlah kelas yang cukup memadai, namun karena keberadaannya di ibu kota kecamatan dan sulit dijangkau, maka indikator ini tetap tidak mempengaruhi pemerataan akses pelayanan pendidikan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa meskipun pemerintah berupaya menyediakan lembaga sekolah di wilayah pedalaman tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah pemerataan akses pelayanan pendidikan. Oleh karenanya, perlu ada solusi yang tepat dan upaya agar anak-anak putus sekolah dan putus lanjut tersebut dapat bersekolah. Misalnya melalui pembentukan kelompok-kelompok belajar di pemukiman masing-masing yang kemudian difiliatkan dengan sekolah yang ada di kecamatan atau

melalui jalur pendidikan nonformal kesetaraan paket B, atau jika memungkinkan melalui pendidikan rumah (homeschooling) yang dijamin legalitasnya. Dengan demikian tanpa menyediakan sarana dan prasarana SMP/MTs formal, anak-anak putus sekolah dan putus lanjut tetap dapat melanjutkan sekolahnya dengan waktu belajar yang lebih fleksibel. Sehingga indikator penyediaan lembaga sekolah dengan jarak maksimal 6 km perlu dikaji kembali untuk karakteristik daerah pedalaman yang kondisi geografisnya sulit dijangkau.

4. Matrikulasi perbandingan antara hasil penelitian dengan penelitian terdahulu

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan diatas, diperoleh gambaran perbandingan antara hasil penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu sebagaimana digambarkan oleh tabel 4.37 berikut:





Tabel 4.37  
Matrikulasi Perbandingan Antara Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

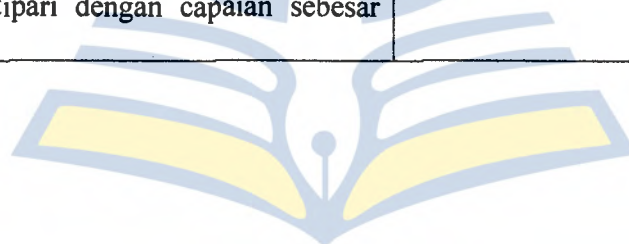
No.	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Penulis
1.	<p>Tesis berjudul “Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok)” oleh Herwin, S.T (2014). Analisis <i>gap</i> menghasilkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang kelas dan guru telah berlebih di Kecamatan Sangir bila distribusi siswa dan guru mengacu kepada SPM Dikdas, bahkan terkesan boros.</li> <li>Jumlah guru pada tahun 2010 masih berlebih hingga tahun 2015.</li> <li>Jumlah ruang kelas SD cukup sampai 2015, dan perlu tambahan 6 lokal untuk SLTP.</li> <li>Kualifikasi guru masih jauh dari pemenuhan SPM.</li> <li>Kualifikasi kepala sekolah belum memenuhi SPM.</li> <li>Fasilitas-fasilitas pendukung masih terdapat kekurangan.</li> <li>Buku dan alat peraga masih kurang.</li> <li>Alokasi biaya untuk operasi nonpersonalia di sekolah masih kecil.</li> <li>Alokasi anggaran untuk Alat Tulis Sekolah dan Bahan/Alat Habis Pakai belum memadai.</li> </ol>	<p>Tesis berjudul “Pencapaian Indiaktor SPM Dikdas SMP/MTs di Kabupaten Nunukan”. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis <i>gap</i> antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang kelas lengkap dengan meja kursi untuk peserta didik masih kurang 7,89%.</li> <li>Jumlah guru sudah mencukupi tapi tidak sampai berlebihan.</li> <li>Ruang kelas SMP/MTs masih membutuhkan 25 lokal.</li> <li>Kualifikasi guru masih jauh hanya mencapai 86,28%, sekolah yang memiliki 70% jumlah guru berkualifikasi S1/D-IV dan hanya 76,47% sekolah yang memiliki 35% guru yang bersertifikasi pendidik.</li> <li>Fasilitas pendukung seperti ruang laboratorium IPA, peralatan praktik, buku teks masih kurang.</li> <li>Penelitian ini tidak menganalisis kebutuhan biaya operasional non personalia.</li> <li>Penelitian ini hanya fokus pada pencapaian indikator SPM Dikdas SMP/MTs.</li> </ol>
2.	<p>Tesis berjudul “Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar Penerima Dana Bos 2014 Di Kabupaten Ponorogo” oleh Subangun (FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo) Tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:</p>	<p>Tesis berjudul “Pencapaian Indiaktor SPM Dikdas SMP/MTs di Kabupaten Nunujan”. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis <i>gap</i> menyimpulkan bahwa SMP/MTs di Kabupaten Nunukan belum memenuhi SPM</p>

<p>a. sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar.</p> <p>b. Hal ini dibuktikan bahwa SD di Kabupaten Ponorogo yang memenuhi kelayakan dalam pengelolaan dana BOS tahun 2014 mencapai 83% dan penyediaan sarana dan prasarana mencapai 77%.</p> <p>c. Adapun sekolah dasar yang memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar pada umumnya belum mencapai 100%, terutama pada penyediaan buku teks SD empat mapel per siswa mencapai 73%; penyediaan peraga IPA dan bahan berupa model mencapai 82%; penyediaan buku pengayaan dan 10 buku referensi mencapai 81%; pelaksanaan jam kerja guru melaksanakan tugas 78%; jumlah jam pembelajaran per minggu 95%; penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 96%, penyampaian laporan hasil evaluasi kepada atasan 87%;</p> <p>d. Adapun jumlah sekolah dasar yang memenuhi standar pelayanan minimal mencapai 100% adalah penerapan RPP dalam pembelajaran; pengembangan program penilaian; pelaksanaan supervisi; penyampaian laporan hasil evaluasi kepada masyarakat dan penerapan MBS adalah 100%.</p>	<p>Dikdas SMP/MTs. Ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator sbb:</p> <p>a. Ketersediaan lembaga sekolah berjarak maksimal 6 km dari pemukiman permanen mencapai 90,20%</p> <p>b. Penelitian ini tidak dikaitkan dengan dana BOS.</p> <p>c. Pencapaian SPM SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan mencapai 36,36%, sedangkan pencapaian oleh satuan pendidikan sebesar 81,82%. Kekurangan meliputi indikator ketersediaan ruang kelas dan jumlah siswa per rombel mencapai 92,27%, penyediaan ruang laboratorium IPA lengkap dengan peralatan praktik 33,33%, ketersediaan guru berkualifikasi 86,28%, ketersediaan guru bersertifikasi pendidik 76,47%, ketersediaan guru yang bersertifikasi guru Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mencapai masing-masing 35,29% guru bersertifikasi pendidik Matematika, 3,92% bersertifikasi pendidik IPA, 27,45% bersertifikasi pendidik Bahasa Indonesia, dan 37,25% bersertifikasi pendidik Bahasa Inggris, kualifikasi kepala sekolah 98,04%, dan sertifikasi dan kualifikasi pengawas 85,71%, penyediaan buku teks yang mencapai 0%, dan penyediaan buku pengayaan dan buku referensi 50%.</p> <p>d. Indikator lainnya sudah mencapai 100% SPM seperti: Ketersediaan seorang guru untuk setiap mata pelajaran di setiap sekolah yang mencapai 100%, Kepemilikan</p>
---	--

		sertifikasi kepala sekolah mencapai 100%, Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran mencapai 100%, Frekwensi kunjungan setiap pengawas satu kali setiap bulan dan kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi/pembinaan yang mencapai 100%
3.	<p>Hasil penelitian Fitri Intendia dari Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor pada tahun 2012 yang berjudul “Penentuan Indikator Standar Pelayanan Minimal Mutu Sekolah Dengan Cart Dan Regresi Logistik”</p> <p>Berdasarkan hasil analisis, diperoleh tiga indicator SPM yang mempengaruhi nilai UN, dengan urutan indikator yang paling berpengaruh adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan minimal 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi, penyampaian laporan ulangan akhir sekolah oleh Kepala SMP/MTs,</li> <li>Penyampaian hasil evaluasi mata pelajaran oleh guru.</li> </ol> <p>Sedangkan indikator SPM yang mempengaruhi status akreditasi sekolah ada delapan indikator, dengan urutan indikator yang paling berpengaruh adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan minimal 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi,</li> <li>Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,</li> <li>Supervisi Kepala SMP/MTs,</li> <li>Lama guru tetap bekerja per minggu <math>\geq 37.5</math> jam,</li> <li>Adanya laporan tahunan, penyampaian laporan ulangan kenaikan kelas oleh Kepala SMP/MTs,</li> <li>lama jam belajar minimal 34 minggu per tahun dan 27 jam per</li> </ol>	<p>Tesis berjudul “Pencapaian Indiaktor SPM Dikdas SMP/MTs di Kabupaten Nunujan”. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis gap menyimpulkan bahwa SMP/MTs di Kabupaten Nunukan belum memenuhi SPM Dikdas SMP/MTs. Penelitian ini tidak dikaitkan dengan nilai UN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketidak tercapaian SPM SMP/MTs dikaitkan dengan status akreditasi dimana dari 51 SMP/MTs 6 sekolah terakreditasi A, 12 sekolah terakreditasi B, 11 sekolah terakreditasi C dan sisanya 22 sekolah belum terakreditasi.</li> <li>Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pencapaian indikator sbb: Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik yang mencapai 0%. Penyediaan buku pengayaan 200 judul dan buku referensi 20 judul yang mencapai 50%, penyediaan ruang laboratorium IPA lengkap dengan peralatan praktik 33,33%,</li> </ol>

	minggu, g. serta komite sekolah berfungsi dengan baik.	
4.	<p>Laporan Penelitian Riska Muliawati Permata (Departemen Administrasi Pendidikan- Fakultas Ilmu Pendidikan-Universitas Pendidikan Indonesia, (riskamp@gmail.com) pada tahun 2015 yang berjudul “Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Studi Kasus Pada 12 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya)</p> <p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencapaian SPM Pendidikan Dasar di 12 Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ini masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi,</li> <li>Berdasarkan hasil penghitungan data yang didapatkan dari lapangan di 12 SDN Kecamatan Mangkubumi, bahwa capaian SPM sebesar 70,44%,</li> <li>Capaian di gugus IV yang dijadikan sampel sebesar 73,33%.</li> <li>Untuk sekolah dengan capaian SPM terbesar yakni SDN Cibantaran dengan capaian sebesar 85,71% dan capaian terendah yakni pada SDN I Mangkubumi dan SDN I Cipari dengan capaian sebesar 61,90%.</li> </ol>	<p>Tesis berjudul “Pencapaian Indiator SPM Dikdas SMP/MTs di Kabupaten Nunukan”. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis gap menyimpulkan bahwa SMP/MTs di Kabupaten Nunukan belum memenuhi SPM Dikdas SMP/MTs. Penelitian ini hanya fokus pada SMP/MTs yang menghasilkan kesimpulan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencapaian indikator SPM Dikdas SMP/MTs masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi.</li> <li>Perlu adanya peningkatan pada aspek-aspek yang kurang di setiap sekolah.</li> <li>Berdasarkan penghitungan data yang diperoleh dari 14 SMP/MTs di Kecamatan Nunukan dan Nunukan selatan, bahwa capaian SPM oleh Satuan Pendidikan sebesar 81,18%, sedangkan capaian SPM oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 36,36%.</li> </ol>

Sumber : Penulis



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan belum optimal. Masih terdapat kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan antara hasil penelitian dengan indikator SPM Pendidikan Dasar yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar baik yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh satuan pendidikan sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs

Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah tercapai sebanyak 4 indikator dari 11 indikator atau sebesar 36,36%, sedangkan indikator yang belum tercapai sebanyak 7 dari 11 indikator atau sebesar 63,64%. Sementara indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan SMP/MTs yang telah tercapai sebanyak 9 indikator dari 11 indikator atau sebesar 81,82%, sedangkan indikator yang belum tercapai sebanyak 2 dari 11 indikator atau sebesar 18,18%. Secara akumulatif pencapaian indikator SPM/MTs di Kabupaten Nunukan adalah 13 dari 22 indikator atau sebesar 59,09%. Dengan demikian masih terdapat kesenjangan 40,91% dari SPM Pendidikan Dasar SMP MTs yang ditetapkan. Tingkat pencapaian ini juga ditunjukkan dari status akreditasi sekolah ditetapkan secara nasional. Dari 51 SMP/MTs yang ada, 6 sekolah terakreditasi A, 12 sekolah terakreditasi

B, 11 sekolah terakreditasi C dan sisanya 22 sekolah belum terakreditasi.

## 2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs

Faktor-faktor pendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan antara lain: 1) Adanya kebijakan rekrutmen tenaga guru honor untuk memenuhi kebutuhan guru; 2) Adanya kebijakan pengangkatan Kepala sekolah yang bersertifikasi sebagai pendidik; 3) Adanya standar dan kebijakan internal yang mengatur frekwensi kunjungan pengawas ke sekolah-sekolah dan dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut; dan 4) Adanya standar dan kebijakan internal yang mengatur tentang penyusunan perencanaan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran dan petunjuk pelaksanaannya.

Sedangkan faktor-faktor penghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan antara lain: 1) Kondisi geografis; 2) Kondisi demografis; 3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan jumlah ideal rombongan belajar di setiap sekolah; 4) Adanya miss-persepsi masyarakat tentang sekolah negeri dan swasta; 5) Adanya kesenjangan sarana dan prasaran antara sekolah negeri dan swasta; 6) Adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah; 7) Belum terpenuhinya kebutuhan SDM guru yang sesuai kualifikasi dan sertifikasi; 8) Belum meratanya penempatan guru di setiap sekolah; dan, 9) Adanya

pengaruh politis dalam penempatan guru dan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas.

Faktor-faktor pendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan antara lain: 1) Pembagian tugas mengajar baik guru PNS maupun guru honor oleh Dinas Pendidikan sesuai kebutuhan mata pelajaran yang diajarkan di setiap sekolah; 2) Dukungan anggaran yang mencukupi untuk pengadaan buku referensi yang dibutuhkan setiap sekolah; 3) Adanya standar dan kebijakan yang mengatur tentang jam kerja guru dan sanksi yang tegas melalui pemotongan tunjangan dan sertifikasi; 4) Konsistensi dan ketaatan sekolah dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kegiatan tatap muka, penerapan KTSP, penerapan RPP, dan pengembangan dan penerapan program penilaian sesuai standar yang ditetapkan; 5) Ketaatan dan konsistensi kepala sekolah dalam melakukan supervise kelas sesuai standar yang ditetapkan; 6) Ketaatan guru dan kepala sekolah sekolah dalam menyampaikan laporan hasil evaluasi belajar siswa setiap semester, hasil UAS, UKK, US/UN; 7) Ketaatan dan konsistensi sekolah dalam melaksanakan MBS.

Sedangkan faktor-faktor penghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan antara lain: 1) Keterbatasan anggaran dalam memenuhi kelengkapan buku teks yang memadai untuk peserta didik; dan, 2) Keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan buku pengayaan yang memadai di setiap sekolah.

Namun secara umum faktor penyebab belum tercapainya indikator SPM pendidikan dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan antara lain: 1) SPM belum sepenuhnya dijadikan acuan dan pedoman pembangunan pendidikan dasar di daerah; 2) Pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya mendukung pencapaian SPM; 3) Pendidikan Dasar belum menjadi fokus pembangunan di bidang pendidikan di daerah

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan dan Satuan Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Nunukan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saran kepada pemerintah Kabupaten Nunukan
  - a. Menyediakan pelayanan pendidikan SMP/MTs di daerah-daerah terpencil melalui pembentukan kelompok-kelompok belajar yang difilialkan pada sekolah yang ada di ibu kota kecamatan atau melalui jalur nonformal pendidikan kesetaraan paket B dan *homeschooling* (sekolah rumah).
  - b. Melakukan pemetaan kembali kebutuhan guru dan non guru SMP/MTs di wilayah Kabupaten Nunukan.
  - c. Menyusun perencanaan kebutuhan guru dan non guru sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk selanjutnya diusulkan kepada BKDD Kabupaten Nunukan untuk melakukan rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah.



- d. Melakukan pemerataan penempatan guru sesuai kebutuhan setiap sekolah agar tidak terjadi penumpukan pada sekolah yang satu dan kekosongan pada sekolah yang lain.
  - e. Menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah (ruang laoratorium, peralatan praktik IPA, buku teks, buku pengayaan) baik di sekolah negeri maupun swasta sesuai dengan jumlah sekolah dan kebutuhan jumlah rombongan belajar di setiap sekolah yang ditetapkan sesuai prioritas untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
  - f. Membuat kebijakan tentang pengangkatan kepala sekolah dan pengawas yang berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi sebagai pendidik sesuai dengan tuntutan SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs.
  - g. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam penataan jumlah ideal siswa di setiap rombongan belajar dan tentang mutu pelayanan pendidikan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta kepada masyarakat
  - h. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja sekolah dan proses pembelajarannya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Saran kepada satuan pendidikan SMP/MTs
    - a. Mengidentifikasi kebutuhan buku teks dan buku pengayaan sesuai dengan jumlah siswa dan kebutuhan di sekolahnya masing-masing.
    - b. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan buku teks dan buku pengayaan dengan mengkomunikasikannya kepada pemerintah daerah dan pusat.

- c. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai melalui kerjasama dengan komite sekolah.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Amstrong, M. (2004). *Performance Management*. Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Barata, A.A. (2003). *Dasar-dasar Pelayanan Prima : Persiapan Membangun Budaya Pelayanan Prima untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Furtwengler, D. (2003). *Penuntun Sepuluh Menit Penilaian Kinerja*. (Alih Bahasa: Fandy Tjiptono). Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Public*. Yogyakarta: MLA Citation.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution, S. (2005). *Metode Research (Penelitian Ilmiah Edisi Keenam)*. Bandung: Bumi Aksara.
- Oentarto. (2004). *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Prasojo, E. dan Kurniawan, T. (2008). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practice dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Dipresentasikan dalam The 5th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia. (Banjarmasin, 22-25 Juli 2008).
- Sadhana dan Kridawati. (2010). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citrab.
- Sinambela dan Lijan P. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudarjat, A. (2012). Aspek dan Indikator Kompetensi Pedagogik Guru. <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/01/29/kompetensi-pedagogik-guru/>. Diambil pada tanggal 13 Juni 2016.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, H. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Tilaar, H.A.R. (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tjiptono, F. dan Diana, A. (2003). *Total Quality Management*. Yogyakarta: Penerbit Andi

**Dokumen-Dokumen:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun.

Peraturan, Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Peraturan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan Tahun 2013. APK/APM PAUD, SD, SMP, SMA DAN PT (Termasuk Madrasah dan sederajat) Tahun 2012/2013. Jakarta: Kemendikbud RI.

\_\_\_\_\_.2015. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2015. Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

\_\_\_\_\_. 2015. *Nunukan Dalam Angka 2014*. Nunukan: BPS Nunukan.

**Skripsi dan Tesis:**

Herwin, 2014. Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok). ([www.pasca.unand.ac.id](http://www.pasca.unand.ac.id). diambil pada 13 Januari 2015).

Subangun (FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo). 2014. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar Penerima Dana Bos 2014 Di Kabupaten Ponorogo.

Fitri Intendia dari Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. 2012. Penentuan Indikator Standar Pelayanan Minimal Mutu Sekolah Dengan Cart Dan Regresi Logistik.

Riska Muliawati Permata (Departemen Administrasi Pendidikan- Fakultas Ilmu Pendidikan-Universitas Pendidikan Indonesia. 2015. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Studi Kasus Pada 12 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya). (riskamp@gmail.com).

Rabiatul Adawiah dari Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. 2011. Laporan Penelitian Yang Berjudul Standar Pelayanan Pendidikan Di Kabupaten Balangan.

Sri Sumarni Styati dari FISIP UI. 2010. Diterminan Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP Negeri 5 Yogyakarta dan SMP Negeri 8 Yogyakarta.

Marhany V.P. Pua dari FISIP UI (Program Studi : Ilmu Administrasi Kekhususan : Administrasi Dan Kebijakan Publik). 2010. *Kualitas Pelayanan Publik Pasca Kekosongan Jabatan Pada Pemerintah Daerah Kota Manado*.

**Website-Website:**

Kemendiknas. (2010). *Data dan Indikator Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014*. Jakarta. <http://www.pakguruonline.pendidikan.net>, (diambil pada 23 September 2015 pukul 20.45 Wita).

Kushandjani. (2004). *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dan Peningkatan Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah*. <http://www.mia.undip.ac.id/>. (diambil pada 23 September 2015 pukul 21.00).

\_\_\_\_\_. (2011). *Education for All Global Monitoring Report UNESCO*. <http://www.indonesiaberkibar.org>. (diambil pada 23 September 2015 pukul 21.30 Wita).

Rifika Sari Midorini. (2011). Analisis Formulasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 Tentang SPM Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota. <http://www.academia.edu>. (diambil pada 23 September 2015 pukul 22.15 Wita).

- \_\_\_\_\_. (2012). Peran Pemerintah Dalam Pelayanan Publik. <http://www.psychologymania.com>. (diambil pada tanggal 23 September 2015 pukul 23.15 Wita).
- \_\_\_\_\_. (2015). Potret Dunia Pendidikan di Indonesia. <http://www.pendidikanindonesia.com> (diambil pada 23 September 2015 pukul 22.30 Wita).
- \_\_\_\_\_. (2014). Pendidikan Indonesia Gawat Darurat. <http://www.educasi.kompas.com> (diambil pada 24 September 2015 pukul 20.22 Wita).



**DAFTAR LAMPIRAN**

Nomor	Judul Lampiran	Hal.
1.	Pedoman Wawancara.....	153
2.	Pedoman Observasi.....	155
3.	Pedoman Studi Dokumentasi.....	156
4.	Dokumentasi Kegiatan Wawancara.....	157
5.	Dokumentasi Kegiatan Observasi.....	158
6.	Dokumentasi Kegiatan Telaah Dokumen.....	159
7.	Surat Izin Penelitian.....	160



## Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Nama informan :  
 Jabatan informan :  
 Instansi informan :  
 Tanggal wawancara :

<b>PEDOMAN WAWANCARA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM DIKDAS SMPMTs OLEH KAB. NUNUKAN</b>				
<b>No.</b>	<b>Pertanyaan Wawancara</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Tingkat Pencapaian (%)</b>	<b>Gap (%)</b>
1	Bagaimanakah ketersediaan satuan pendidikan bagi kelompok permukiman permanen di setiap daerah terpencil?			
2	Bagaimanakah keadaan peserta didik dan rombongan belajar dalam kaitannya dengan ketersediaan ruang dan meja kursi bagi peserta didik dan guru			
3	Bagaimanakah ketersediaan laboratorium IPA peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik?			
4	Bagaimanakah ketersediaan ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya?			
5	Bagaimanakah ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran?			
6	Bagaimanakah kualifikasi dan kompetensi guru?			
7	Bagaimanakah ketersediaan guru terkait dengan kualifikasi dan kompetensi untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris?			
8	Bagaimanakah kualifikasi dan kompetensi kepala SMP/MTs?			
9	Bagaimanakah kualifikasi dan kompetensi pengawas SMP/MTs?			
10	Apakah Pemerintah kabupaten/kota telah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif?			
11	Bagaimanakah kunjungan pengawas ke satuan pendidikan SMP/MTs terkait supervisi dan pembinaan?			
12	Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Kabupaten Nunukan?			
13	Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Kabupaten Nunukan?			



Nama informan :  
 Jabatan informan :  
 Instansi informan :  
 Tanggal wawancara :

<b>PEDOMAN WAWANCARA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM DIKDAS SMPMTs OLEH SATUAN PENDIDIKAN</b>				
<b>No.</b>	<b>Pertanyaan Wawancara</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Tingkat Pencapaian (%)</b>	<b>Gap (%)</b>
1	Bagaimanakah ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang mencakup semua mata pelajaran?			
2	Bagaimanakah ketersediaan buku pengayaan dan buku rederensi?			
3	Bagaimanakah jam kerja guru per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan?			
4	Bagaimanakah penyelenggaraan proses pembelajaran per minggu dan per tahun terkait dengan kegiatan tatap muka?			
5	Bagaimanakah penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku?			
6	Bagaimanakah penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) oleh guru?			
7	Bagaimanakah pengembangan dan penerapan program penilaian oleh guru untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik?			
8	Bagaimanakah kegiatan kepala sekolah terkait supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru?			
9	Bagaimanakah penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik oleh guru kepada kepala sekolah pada akhir semester?			
10	Bagaimanakah penyampaian laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) oleh kepala satuan pendidikan SMP/MTs kepada orang tua peserta didik dan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama?			
11	Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) oleh satuan pendidikan?			
12	Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan anda?			
13	Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan anda?			

## Lampiran 2: Pedoman Observasi

<b>PEDOMAN OBSERVASI</b>		
<b>No.</b>	<b>Situasi Sosial Yang Diamati</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
<b>1</b>	<b>Keadaan Peserta Didik</b>	
<b>2</b>	<b>Keadaan Sarana dan Prasarana</b>	
<b>3</b>	<b>Keadaan SDM Pendidik dan Non Pendidik</b>	
<b>4</b>	<b>Keadaan Kinerja Pelayanan dan Proses Pembelajaran</b>	
<b>5</b>	<b>Keadaan Lingkungan Eksternal Sekolah</b>	

## Lampiran 3: Pedoman Studi Dokumentasi

**PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI**

<b>JENIS DOKUMEN</b>			
<b>A.</b>	<b>Dokumen yang berasal dari Dinas Pendidikan:</b>	<b>B.</b>	<b>Dokumen yang berasal dari sekolah:</b>
1.	Data mengenai jumlah penduduk Kabupaten Nunukan dan komposisinya menurut umur, jenis kelamin, dan mata pencaharian tahun 2015.	1.	Data mengenai jumlah buku teks mata pelajaran yang tersedia di sekolah tahun 2015.
2.	Data mengenai jumlah sekolah SMP/MTs baik negeri maupun swasta, jumlah peserta didik, jumlah peserta didik usia 13-15 tahun, jumlah rombel tahun 2015.	2.	Data mengenai jumlah buku pengayaan dan buku referensi yang tersedia di sekolah tahun 2015.
3.	Data mengenai jumlah kelas, jumlah meja dan kursi peserta didik, jumlah buku mapel, jumlah buku pengayaan, jumlah buku referensi tahun 2015.	3.	Data mengenai kinerja guru perminggu dan aktivitasnya dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran serta aktivitas bimbingan dan latihan bagi peserta didik.
4.	Data mengenai ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang laboratorium IPA, meja dan kursi kepala sekolah dan staf non guru lainnya, dan perpustakaan sekolah tahun 2015.	4.	Data mengenai penyelenggaraan proses pembelajaran per minggu dan per tahun terkait dengan kegiatan tatap muka.
5.	Data mengenai jumlah guru, jumlah guru untuk mata pelajaran, kualifikasi guru dan sertifikasi kompetensi guru tahun 2015.	5.	Data mengenai penerapan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku.
6.	Data mengenai jumlah kepala sekolah, kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah tahun 2015.	6.	Data mengenai penerapan RPP oleh guru.
7.	Data mengenai jumlah pengawas, kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah tahun 2015.	7.	Data mengenai aktivitas pengembangan dan penerapan program penilaian oleh guru untuk peningkatan kemampuan belajar peserta didik.
8.	Dokumen kebijakan, program, rencana dan pelaksanaannya terkait pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif yang dibuat oleh pemerintah daerah tahun 2015.	8.	Data mengenai kegiatan kepala sekolah terkait supervisi kelas dan umpan balik kepada guru.
9.	Data mengenai laporan aktivitas supervisi dan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah tahun 2015.	9.	Data mengenai laporan hasil evaluasi mapel dan hasil penilaian peserta didik, hasil UAS/UKK/US/UN dan kegiatan penerapan MBS oleh sekolah.

## Lampiran 4: Dokumentasi Kegiatan Wawancara



## Lampiran 5: Dokumentasi Kegiatan Observasi



## Lampiran 6: Dokumentasi Kegiatan Telaah Dokumen



## Lampiran 7: Surat Izin Penelitian

Lampiran 7: Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Kompleks Rusuawa RT 05 Nunukan Selatan – Kab. Nunukan, Kalimantan Utara (77482)  
 Telp./Faks. (8536) 22831

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 072.05/40 /BKBP-I

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan ;
- b. Memperhatikan : Surat Pokjar Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Samarinda Universitas Terbuka Nomor 15/POKJAR-S2/UT/Nnk/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Ijin Penelitian ;

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN,**

memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : MISADI
- b. Nomor Induk Kependudukan : 640502028740001
- c. Alamat : Jl. Perum Griya Sejahtera Permai Blok A2/17 RT. 001 Kel. Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan
- d. Pekerjaan : PNS
- e. Nama Lembaga/Penanggung Jawab : Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Samarinda Universitas Terbuka
- f. Alamat Lembaga/Penanggung Jawab : Jl. Antasari Baru Sei Sembilan Kel. Selison Kecamatan Nunukan Selatan

- untuk : 1. Melakukan kegiatan penelitian/survey/riset dengan judul "Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar SMP/MTS di Kabupaten Nunukan."
2. Lokasi Penelitian : Kabupaten Nunukan
3. Masa Penelitian : 118 (seratus delapan belas) hari terhitung mulai tanggal 5 April s/d 31 Juli 2016
1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset, wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi terkait dan/atau Camat/Lurah/Kepala Desa lokasi penelitian/survey/riset ;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey/riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/survey/riset dimaksud ;

3. Wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengindahkan norma/aturan adat istiadat setempat ;
4. Setelah selesai penelitian/survey/riset dilaksanakan, diminta untuk menyampaikan Laporan Hasil Penelitian/Survey/Riset kepada Bupati Nunukan c.q. Ka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan ;
5. Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama masa penelitian/survey/riset ;
6. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian/survey/riset belum selesai dilaksanakan, maka Rekomendasi Penelitian ini dapat diperpanjang setelah Pemegang Rekomendasi ini melapor kembali kepada Bupati Nunukan c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, disertai alasan/keterangan tertulis bahwa penelitian/survey/riset belum selesai pada waktunya ; dan
7. Rekomendasi Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila Pemegang Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Nunukan  
pada tanggal 7 April 2018

KEPALA  
BEMERINTAH KABUPATEN  
BADAN KESEKUTUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
\*  
**JOKO SANTOSA, SH**  
Kabupaten Utara Muda  
NIP. 19670927 199703 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Nunukan  
c.q. Ka Bag. Pemerintahan Setkab Nunukan
2. Yth. KAPOLRES Nunukan Kab. Nunukan
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Nunukan
4. Yth. Sekretaris Poljar UPBJJ Universitas Terbuka di Samarinda
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nunukan  
c.q. Kepala Bidang Pendidikan Dasar  
c.q. Kepala Bidang Pendidikan Dasar SMP/MTS
6. Yth. Kepala Bidang SAPRAS DIRNAS Nunukan
7. Yth. Kepala Kaseubbag Snggram DIRNAS Kab. Nunukan  
c.q. Pengelola Depodik dan Pengelola Aset Ditnas
8. Yth. Kepala UPTD PPDII Se-Kab. Nunukan
9. Yth. Kepala SMP/MTS Se-Kab. Nunukan
10. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Nunukan
11. Yth. Ketua Komite Sekolah SMP/MTS
12. Yth. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Nunukan
13. Yth. LSM Pemerintah Pendidikan Nunukan
6. Yang bersangkutan
7. --- Arsip ---